



UNIVERSITAS INDONESIA

**SIKAP ASERTIF CHINA SEBAGAI *GREAT POWER*
STUDI KASUS: LAUT CHINA SELATAN
(2008-2011)**

TESIS

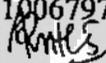
RUTH IVANNA SIHITE

1006797175

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

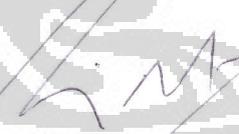
Nama : Ruth Ivanna Sihite
NPM : 1006797175
Tanda Tangan: 
Tanggal : 25 Juni 2012

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ruth Ivanna Sihite
NPM : 1006797175
Judul : Sikap Asertif China Sebagai *Great Power*
Kasus : Laut China Selatan Periode 2008-2011

Dosen Pembimbing



Makmur Keliat, Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ruth Ivanna Sihite
NPM : 1006797175
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Sikap Asertif China Sebagai *Great Power*
Kasus : Laut China Selatan Periode 2008-2011

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Zainuddin Djafar Ph.D (.....)
Sekretaris : Asra Virgianita, MA (.....)
Pembimbing : Makmur Keliat, Ph.D (.....)
Penguji Ahli : Evi Fitriani, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Depok, 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Syukur dan Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi sumber dari segala berkat dan yang senantiasa menyertai penulis terutama dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulisan tesis ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Makmur Keliat, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini.
2. Dewan penguji sidang tesis : Prof. Zainuddin Djafar selaku ketua sidang, Evi Fitriani, Ph.D sebagai penguji ahli dan Asra Virgianita, MA sebagai sekretaris sidang yang telah banyak memberi saran dan masukan dalam memperbaiki tesis ini.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberi dukungan dalam segala bentuk: Doa, semangat, materi, tenaga, inspirasi, terutama cinta kasih disegala waktu terlebih selama masa studi dan penulisan tesis ini.
4. Teman-teman S2 HI angkatan 2010 yang menjadi teman seperjuangan, teman berbagi keceriaan dan teman yang saling memberi dukungan selama proses perkuliahan terlebih sepanjang penulisan tesis ini. Angkatan 2010, *you're the best!*

Saya berharap tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian keamanan internasional.

Depok, 25 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruth Ivanna Sihite
NPM : 1006797175
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Sikap Asertif China Sebagai *Great Power*” Studi Kasus: Laut China Selatan Periode 2008-2011 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan



(Ruth Ivanna Shite)

Nama : Ruth Ivanna Sihite
NPM : 1006797175
Judul : Sikap Asertif China Sebagai *Great Power*
Kasus : Laut China Selatan Periode 2008-2011

ABSTRAK

Sengketa wilayah di Laut China Selatan kembali mengalami peningkatan ketegangan sejak akhir 2011. Konflik antar negara-negara yang mengajukan klaim atas wilayah Laut China Selatan kembali mencuat sejak 2008 dan berlanjut hingga pertengahan 2012. Beberapa peristiwa yang terjadi menjadi sinyal akan potensi terjadinya konflik bersenjata. China melakukan beberapa aksi militer terutama terhadap Vietnam dan Filipina yang melakukan aktifitas dalam batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara berdasarkan konvensi UNCLOS. Dari lima negara yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan: Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam, tiga diantaranya adalah merupakan negara anggota ASEAN, organisasi kawasan yang menjadi mitra China dalam beberapa kerjasama. Dualisme China yang di satu sisi bersikap multilateralis dengan ASEAN namun unilateralis dengan beberapa anggotanya dalam kasus Laut China Selatan menjadi latar belakang penelitian ini.

Konflik Laut China Selatan merupakan konflik yang sudah terjadi sejak puluhan tahun. Klaim kedaulatan di wilayah tersebut ditengarai semakin meningkat karena negara-negara pengklaim ingin mendapatkan kedaulatan atas sumber energi yang ada di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus menganalisa faktor pemicu China yang bersikap asertif bahkan unilateralis sebagai faktor utama terjadinya ketegangan di wilayah tersebut.

Kata kunci : Laut China Selatan, klaim wilayah, sengketa wilayah, unilateral, *great power*,

Nama : Ruth Ivanna Sihite
NPM : 1006797175
Judul : Sikap Asertif China Sebagai *Great Power*
Kasus : Laut China Selatan Periode 2008-2011

ABSTRACT

Tension continue to rise following military actions deployed by claimants of the territorial dispute. In the third quarter of 2011 incidents which potentially lead to armed conflict worsen the situation in South China Sea. In the mid of 2012 China's military actions threat Vietnam's and Philipina's sovereignty while doing actions within their exclusive economic zone (EEZ). There are five countries involved with China in South China Sea dispute: Brunei, the Philippines, Malaysia, Taiwan and Vietnam. Three of them are ASEAN members which in some cooperations related and connected with China. This situation describe China's dualism. On one side China is multilateralist but on the other side to be unilateralist. China's dualism to it's neighbour country is the idea of research question of this thesis. Since China at the same time being cooperative but also unilateralist, there must be factors that driven China to act this way. South China Sea conflict had occurred since decades. Claims to sovereignty in the region identified as a motivation to unlimited right for energy resources surround the region. In this thesis, researcher will try to analyse the most influenced factor that dirive China to be asertive even unilateralist in South China Sea. This factor is getting more crucial as China's action said to be trigger to rising tension in the region

Keywords: South China Sea, Claimants, Unilateral, Great Power, Rising Tension, Military Action in South China Sea

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	2
1.1.1 Kepentingan China di Laut China Selatan	4
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	9
1.3 Kerangka Pemikiran	13
1.3.1 Tinjauan Pustaka	13
1.3.2 Kerangka Teori.....	17
1.3.2.1 Unilateralis Jika Memiliki Power	19
1.4 Metode Penelitian	22
1.5 Asumsi dan Hipotesa	23
1.6. Model Analisa	24
1.7 Operasionalisasi Konsep	25
1.8 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	24
1.8.1 Tujuan Penelitian.....	27
1.8.2 Signifikansi Penelitian.....	27
1.9 Sistematika Penelitian.....	27
2. SIKAP ASERTIF CHINA di LAUT CHINA SELATAN	28
2.1 Sejarah Laut China Selatan	28
2.1.1 Klaim China	31
2.1.2 Klaim Taiwan.....	34
2.1.3 Klaim Vietnam	35
2.1.4 Klaim Malaysia.....	36
2.1.5 Klaim Filipina.....	36
2.2 Kehadiran Pihak-pihak Lain di Laut China Selatan	38
2.3 Mekanisme Penyelesaian Konflik Laut China Selatan	43
2.3.1 UNCLOS	43
2.3.2 Mekanisme Regional.....	50
2.3.3 Mekanisme Penyelesaian Bilateral	49
2.3.2.1 China-Vietnam	50
2.3.2.2 China-Filipina	50
2.3.3.3 China-Taiwan.....	52

2.4 Unilateralisme China.....	54
2.2.3 Penggunaan Kekuatan	69
3. CHINA SEBAGAI GREAT POWER	61
3.1 Power dan Distribusinya	61
3.2 Definisi <i>Power</i> , <i>Superpower</i> , <i>Great Power</i> dan Elemen yang Membanggunya	65
3.2.1 <i>Superpower</i>	68
3.2.2 <i>Great Power</i>	72
3.3 Kekuatan dan Dominasi China di Laut China Selatan.....	74
3.3.1 Kapabilitas Militer	78
3.3.2 Kapabilitas Ekonomi China	81
3.5 Kebijakan Luar Negeri dan <i>Grand Strategy</i> China	84
4. CHINA SEBAGAI DOMINANT POWER di ASIA	95
4.1 Distribusi Power di Asia : China Sebagai <i>Great power</i> diantara <i>Major Power</i>	95
4.2 China dan Jepang, <i>Great Power</i> dalam Satu Kawasan	99
4.3 Pengaruh Dominasi China Terhadap Stabilitas Kawasan Asia.....	104
5 KESIMPULAN dan SARAN	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 1.1	Peta Sengketa Laut China Selatan	5
Gambar 1.2	Model Analisa Penelitian	23
Gambar 1.3	Model Analisa Hipotesa I	24
Gambar 1.4	Model Analisa Hipotesa II	25
Gambar 2.1	Peta Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS ..	47
Gambar 2.2	Peta Larangan Memancing	53
Gambar 3.1	Perubahan Distribusi Kekuasaan Sistem Internasional	62
Gambar 3.2	Peningkatan Kapabilitas Militer China 2001-2011.....	80
Gambar 3.3	Perbandingan Belanja Militer Negara-negara Bersengketa...	81
Gambar 3.4	Perbandingan GDP tahun 2011	84
Gambar 4.1	Distribusi Power berdasarkan data 2011.....	98
Gambar 4.2	Perbandingan Kapabilitas China dengan Great Power Lainnya di Asia	99
Gambar 4.3	Peta Sengketa Laut China Timur.....	101

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1.1	Produksi dan Konsumsi Minyak China	9
Tabel 2.1	Sengketa Pulau Spratly dan Paracel	23
Tabel 2.2	Tindakan China yang Tidak Sesuai dengan Konvensi...	58
Tabel 3.1	Belanja Militer China 2001-2011	79
Tabel 4.1	Aksi Berbalasan China dan Jepang	103
Tabel 4.2	Perbandingan Anggaran Militer China dan Jepang	104
Tabel 4.3	Perbandingan Belanja Militer China dengan Jepang dan Korea	106

BAB 1. PENDAHULUAN

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Sikap Asertif China Sebagai *Great Power*” Studi Kasus: Laut China Selatan Periode 2008-2011. Pemilihan judul ini didasarkan pada peningkatan ketegangan dalam sengketa Laut China Selatan sejak akhir 2011. Ketegangan di Laut China Selatan kembali mencuat pada 2008 setelah sebelumnya sempat tidak mengalami pergolakan yang berarti. Penelitian ini akan berfokus pada *power* yang dimiliki China negara yang bersikap asertif¹ bahkan unilateralis² di Laut China Selatan. Penelitian ini akan mencoba menemukan faktor pemicu sikap tersebut dalam kaitannya dengan *power* yang dimiliki China. Adapaun pemilihan periode 2008-2011 didasarkan pada awal peningkatan sengketa di kawasan tersebut terjadi sejak 2008 ketika China meningkatkan kapabilitas persenjataannya dan menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelian kapal induk yang mereka lakukan adalah untuk menjaga keamanan Laut China Selatan³. Meskipun periode penelitian dibatasi dari 2008-2010, peneliti juga menggunakan data-data hingga tahun berjalan (2012) sebagai data pendukung, terlebih karena selama awal hingga pertengahan 2012 ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat.

Tema Laut China Selatan sudah banyak diteliti, namun dalam penelitian ini, fokus yang dipilih oleh peneliti adalah faktor pemicu sikap China di Laut China Selatan sebagai pihak yang mengajukan klaim paling kuat, berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang lebih fokus pada persoalan energi sebagai pemicu sengketa. Dalam bab pendahuluan ini peneliti akan memaparkan latar belakang pemilihan permasalahan, kerangka teori, latar belakang pemilihan teori, model analisis serta asumsi dan hipotesa yang akan diuji.

¹ Sikap asertif merupakan sikap yang tegas yang dinyatakan secara langsung

² Unilateral merupakan sikap sepihak yang tidak mempertimbangkan pihak lain

³ Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/cv.htm> pada 22 April 2012 pukul 20.34 WIB

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Konflik berkepanjangan di Laut China Selatan belum juga menemukan titik penyelesaian karena masing-masing negara yang bersengketa tidak ada yang menarik klaim atas wilayah tersebut. Demikian juga dengan China yang bahkan semakin memperkuat klaim atas Pulau Paracel dan Sparty yang sudah terjadi sejak abad 19⁴. Klaim tersebut bahkan meningkat, China menyatakan kedaulatannya atas keseluruhan wilayah Laut China Selatan baik perairan maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE). Klaim China akan menutup kesempatan negara-negara lain yang juga bersengketa untuk mendapatkan bagian atas wilayah tersebut⁵. Karena itu, konflik di Laut China Selatan semakin sulit untuk diselesaikan dengan negosiasi.

Konflik teritori Laut China Selatan menjadi semakin kompleks akibat banyaknya pihak yang terlibat dan masing-masing memiliki dasar klaim yang berbeda yaitu alasan historis dan juga klaim berdasarkan konvensi. Sengketa tidak hanya melibatkan negara-negara yang mengajukan klaim tetapi juga pihak luar seperti Amerika Serikat yang terlibat dalam konflik tersebut untuk tujuan mengamankan kepentingannya dan menjalankan salah satu perannya sebagai *superpower* yang bertanggung jawab atas keamanan internasional.

Amerika beraksi ketika China menunjukkan dominasinya terhadap wilayah Laut China Selatan karena hal tersebut berarti memberikan pengaruh pada aktifitas *shipping* Amerika dengan Jepang maupun Korea. Agustus 1999 Amerika menempatkan dua kapal induk di Laut China Selatan bertepatan dengan ketegangan antara Beijing dan Taiwan yang sedang memanas dan kedua belah pihak masing-masing akhirnya meningkatkan kekuatan⁶. Perang pernyataan dari negara-negara yang terlibat juga terjadi.

Klaim China mendapat tanggapan negatif. Isu yang banyak beredar terhadap klaim dan sikap China adalah keinginan negara tersebut untuk

⁴Paracel (Xisha) Islands – 1974 diakses dari:

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/paracel.htm> pada 24 April 2012 pukul 19:36

⁵*Ibid.*

⁶ Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/art6-w04.htm> pada 20 April 2012 pukul 23.22 WIB

menguasai keseluruhan Laut China Selatan⁷. China dinilai sebagai pihak yang tamak dan ingin memperebutkan wilayah teritorial Laut China Selatan untuk mendapatkan akses penuh terhadap energi yaitu minyak dan gas yang ada di kawasan itu⁸.

Hal tersebut memperkuat pencitraan China sebagai negara yang bersikap asertif yang dapat dilihat dari kebijakan luar negerinya terutama tentang energi dan bahan mentah sebagai sumber penting dalam menjalankan perekonomian China⁹. Pendapat lain mengatakan bahwa keinginan untuk mengambil kembali wilayah teritorial adalah bagian dari komitmen elit-elit China. Menguasai wilayah Laut China Selatan berarti memperkuat posisi tawar yang dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam proses negosiasi¹⁰. Klaim China juga dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan akses penangkapan ikan seperti di wilayah Hainan.¹¹

Konflik Laut China Selatan telah melibatkan proses diplomasi internasional. Upaya negosiasi dan alternatif kerjasama juga telah diajukan sebagai proses penyelesaian namun hingga pertengahan tahun 2012 belum ada tanda konflik di wilayah tersebut akan berakhir. Keadaan bahkan bertambah buruk. Juni 2011, Vietnam menuduh China memutus jalur eksplorasi minyak dan gas mereka. Menurut Vietnam peristiwa itu adalah kali kedua China melakukan hal yang sama¹².

Akibat perseteruan tersebut, aksi masing-masing pihak mengundang tanggapan dari pihak lain. Vietnam membeli kapal selam rusia, ditanggapi China dengan meningkatkan aktifitas latihan militernya. China juga menyatakan bahwa jumlah pasukannya yang akan ditempatkan di kawasan Laut China Selatan akan

⁷ Esmond Smith. D, "China's Aspirations in the Spratly Islands" dalam *Contemporary Southeast Asia* 16, no. 3 (1994) hlm. 274–294.

⁸ Willian J. Dobson dan M. Taylor Fravel, "Red Herring Hegemon: China in the South China Sea" dalam *Current History*, September, 1997 hlm. 258.

⁹ David Zweig dan Bi Jianhai, "China's Global Hunt for Energy", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 84, No. 5 (2005), hlm. 25-38.

¹⁰ Eric Hyer, "The South China Sea Disputes: Implications of China's Earlier Territorial Settlements" dalam *Pacific Affairs* 68, no. 1 (Spring 2006) hlm. 34–54.

¹¹ Daojiong Zha, "Localizing the South China Sea Problem: The Case of China's Hainan" dalam *Pacific Review* 14, no. 4 (2001) hlm. 575–598.

¹² Michael Wines, "Dispute Between Vietnam and China Escalates Over Competing Claims in South China Sea" diakses dari

http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html?_r=1

terus meningkat hingga tahun 2020¹³. Demikianlah ketegangan sengketa China dan Vietnam di Laut China Selatan semakin meningkat.

Tidak hanya dengan Vietnam, ketegangan antara China juga meningkat dengan Filipina. Sejak 1992, kerjasama militer antara Filipina dan Amerika terjalin semakin baik terutama untuk tujuan kontra teroris dan keamanan maritim. Dalam agenda kebijakan keamanannya, Amerika juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan kebijakan negaranya adalah meningkatkan aliansi dengan Filipina untuk satu alasan utama yaitu stabilitas Laut China Selatan¹⁴. Seperti yang telah banyak diperdiksi, ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat menyusul peningkatan kerjasama Amerika dan Filipina tersebut, terutama latihan militer yang intensif antara Amerika dan Filipina sebagai upaya menyediakan pengamanan eksplorasi minyak di Laut China Selatan. Hal ini memancing kekuatiran dan reaksi China yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan di Laut China Selatan semakin buruk¹⁵.

Demikianlah satu aksi dari satu pihak memicu reaksi dari pihak lain yang kemudian menimbulkan ketegangan. Aksi militer di Laut China Selatan tidak terjadi secara konstan. Peningkatan ketegangan dipicu oleh aksi salah satu pihak yang bersengketa yang menimbulkan reaksi dari pihak lainnya.

Meskipun konflik telah berlangsung puluhan tahun, ketegangan yang melibatkan pihak-pihak lain yang bersengketa dan juga pihak lain baru terjadi beberapa kali dalam kurun waktu beberapa dekade. Peta sengketa wilayah Laut China Selatan akan digambarkan berikut ini¹⁶.

¹³ Diakses dari: <http://factsanddetails.com/> pada 05 Juni 2012 pukul 22.34 WIB

¹⁴ Thomas Lum, "The Republic of Philipines and U.S Interest" dalam *Congressional Research Service*, 2012

¹⁵ David Alexander dan Manuel Mogato, "U.S. and Philippines Eye Stronger Defense Ties" diakses dari <http://www.reuters.com/article/2012/01/26/us-philippines-us-idUSTRE80P22320120126> pada 01 Juni 2012 pukul 23.39 WIB

¹⁶ Diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13748349> pada 08 Februari pukul 20.28 WIB yang merupakan peta berdasarkan sumber UNCLOS dan CIA

Gambar 1.1 : Peta Sengketa Laut China Selatan



1.1.1 Kepentingan China di Laut China Selatan

Dari jaman dahulu, laut sangat penting bagi kehidupan manusia. Laut berfungsi sebagai jalur transportasi, jalur informasi dan sebagai jalur perdagangan. Fungsi laut yang sedemikian besar menjadikan laut sebagai elemen yang memiliki fungsi sama besar dalam membangun kerjasama internasional demikian sebaliknya, laut dapat menjadi sumber sengketa internasional. Tiga perempat penduduk dunia tinggal di daerah pesisir, 80% kota besar dan hampir semua pusat perdagangan internasional maupun pusat kekuatan militer berada di pesisir.¹⁷

Laut merupakan sumber dari sumberdaya alam yang berguna bagi manusia seperti: minyak, gas, ikan, mineral, dll. Minyak adalah salah satu sumber daya strategis dalam kemajuan suatu negara, demikian juga dengan China. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat didorong oleh peningkatan industri, sektor yang paling banyak menggunakan energi dari segala bentuk sumber daya baik minyak bumi, gas, batubara yang digunakan sebagai penghasil

¹⁷ Geoffrey Till, "Seapower: A Guide for the Twenty-First Century. (New York: Routledge, 2009) hlm. 226-231.

tenaga listrik untuk menggerakkan peralatan-peralatan industri. Peningkatan kebutuhan China akan minyak dan sumber energi lainnya mendorong China untuk melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan akses terhadap sumber energi terutama minyak di seluruh dunia.

Peningkatan ekonomi nasional yang sangat drastis berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah peningkatan angka urbanisasi yang tinggi dan peningkatan taraf hidup masyarakat China pada umumnya. Peningkatan penghasilan diikuti dengan peningkatan permintaan kendaraan bermotor yang secara otomatis menaikkan kebutuhan minyak bumi dan gas alam China seperti halnya peningkatan terhadap bahan-bahan industri dan konstruksi lainnya¹⁸.

Perubahan drastis terjadi dalam masa 20 tahun. China yang semula adalah negara pengekspor minyak terbesar kedua di Asia Timur berubah menjadi negara pengimpor minyak kedua terbesar sejak tahun 1997¹⁹. Lalu pada tahun 2007, China menempati urutan kedua sebagai negara pengguna minyak terbanyak di dunia.

Untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang bertambah dengan sangat cepat, China melakukan 3 langkah : melakukan ekspansi ke negara-negara Timur Tengah sebagai pemasok minyak, memperluas sumber impor hingga ke negara Afrika, Rusia, Asia Tengah, dan Amerika Selatan serta mengamankan jalur transportasi minyak ke negaranya²⁰.

China memperkirakan bahwa Laut China Selatan adalah sumber cadangan energi yang bisa diandalkan. Karena itu Laut China Selatan menjadi sangat penting bagi China²¹. Prediksi China tentang cadangan energi di Laut China Selatan ditengarai sebagai alasan sikap unilateralis China. China optimis bahwa Laut China Selatan memiliki kandungan energi yang sangat besar. Meskipun pengeboran minyak di Laut China Selatan harus dilakukan dengan teknik

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

¹⁹ David Zweig dan Bi Jianhai, "China's Global Hunt for Energy", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 84, No. 5 (2005), hlm. 25-38.

²⁰ Lai Hongyi Harri, "China's Oil Diplomacy: Is It a Global Security Threat?" dalam *Third World Quarterly*, Vol. 28, No. 3 (2007), hlm. 519-537.

²¹ Leszek Buszaynski dan Iskandar Sazlan, "Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea" dalam *Contemporary Southeast Asia: A journal of Internasional and Strategic Affairs*, Vol. 29, No. 1 (2007), hlm. 25-38.

pengeboran ultra dalam dibawah 600 meter,²² berbeda dengan prediksi *Energi Information Administration* Amerika Serikat, yang memperkirakan jumlah cadangan minyak di wilayah Laut China Selatan adalah sekitar 7 milyar barrel atau sekitar 960 juta ton²³. Untuk jumlah energi tersebut China tidak bersedia membagi risiko melalui kerjasama dengan negara lain. China tidak memilih *energy cooperation* melainkan memilih untuk menerapkan strategi peningkatan kekuatan laut²⁴.

Reaksi China yang sangat agresif dalam pencarian energi dapat membahayakan keamanan internasional. Perburuan atas sumber daya potensial yang meliputi air, minyak dan gas potensial pada umumnya akan berakhir pada konflik. Kepemilikan sumber minyak dan gas di Laut China Selatan adalah salah satu motivasi negara-negara yang mengajukan klaim di kawasan itu dan juga menjadi alasan terjadinya konflik bersenjata antara China dan beberapa negara lain yang menyatakan klaim kepemilikan atas Laut China Selatan²⁵.

Diplomasi minyak China dan pendekatan yang sangat agresif kepada negara-negara penghasil minyak membentuk pola hubungan baru dalam peta politik dunia. Strategi tersebut membuat China memiliki kedekatan yang lebih baik dengan negara-negara pemilik sumber daya alam baik gas, batubara maupun sumber daya lain yang merupakan alternatif energi bagi China. Sebaliknya, diplomasi tersebut semakin mempertajam persaingan China dengan negara-negara importir minyak lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang²⁶.

Perburuan minyak global yang dilakukan China menarik perhatian dunia serta menimbulkan pengaruh pada hubungan internasional terutama di Asia Pasifik. Sikap tersebut mempengaruhi hubungan China dengan negara-negara

²² *Ibid.*, hlm. 25.

²³ Data diperoleh dari US Energi Information tahun 2003

²⁴ Geoffrey Till, "Seapower: A Guide for the Twenty-First Century. (New York: Routledge, 2009) hlm. 145-148.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lai Hongyi Harri, "China's Oil Diplomacy: Is It a Global Security Threat?" dalam *Third World Quarterly*, Vol. 28, No. 3 (2007) hlm. 519-537.

importir minyak dari Asia terutama dan memberi pengaruh pada kebijakan luar negeri Amerika²⁷.

Tahun 1985 China adalah eksportir minyak terbesar di Asia timur. Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, pada 2004 China membukukan 31% dari permintaan minyak dunia²⁸. Tahun 2010 China menempati urutan ketiga sebagai importir minyak terbesar dunia²⁹. Konsumsi minyak China per hari mencapai 9.189 juta barrel. Dengan angka tersebut China menempati urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai pengguna minyak terbesar di dunia³⁰.

Akan tetapi, disamping angka konsumsi yang tinggi China juga merupakan produsen minyak dalam jumlah yang cukup besar. Angka ekspor minyak China tahun 2009 mencapai 480.600 barrel per hari, menempati urutan ke-30. Di tahun 2010 China menempati urutan keempat sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan angka produksi 4.273 juta barrel per hari. Dengan jumlah produksi yang demikian pada 1 Januari 2011 China memiliki cadangan minyak sebesar 20,35 milyar barrel³¹.

Dalam tabel³² berikut ini disajikan perbandingan produksi dan konsumsi; ekspor dan impor, serta jumlah cadangan minyak China dibandingkan dengan saingannya, Amerika Serikat.

²⁷ Leszek Buszynsk dan Iskandar Sazlan, "Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea" dalam *Contemporary Southeast Asia: A journal of Internasional and Strategic Affairs*, Vol. 29, No. 1 (2007) hlm. 25-38.

²⁸ Lai Hongyi Harri, *loc cit.*, hlm. 520.

²⁹ Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2174rank.html>. diakses 10 Januari 2012 pukul 22.42 WIB

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Tabel diolah dari data yang diakses dari Sumber : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

Tabel 1.1 Produksi, konsumsi, ekspor dan impor minyak China dalam barrel.

	Tahun	Amerika Serikat	China
Produksi	2010	9.688.000	4.273.000
Konsumsi	2010	9.189.000	19.150.000
Ekspor	2009	480.600	1.920.000
Impor	2009	4.753.000	10.270.000
Cadangan	2011	20.350.000.000	20.680.000.000

Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa cadangan minyak China tidak jauh berbeda dari Amerika. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi dan kebutuhan nasionalnya, cadangan minyak China masih mencukupi. Namun, perburuan minyak global oleh China semakin intensif. Karena itu klaim China atas Laut China Selatan sering dikaitkan dengan kebutuhan China akan energi, terutama minyak. Dari fakta cadangan minyak China, peneliti menyimpulkan bahwa pemicu utama China di Laut China Selatan bukanlah akses untuk mendapatkan energi.

Fakta di atas menjadi salah satu alasan peneliti untuk memilih tema ini karena tulisan-tulisan tentang Laut China Selatan pada umumnya membahas tema perebutan energi, karena itu peneliti ingin mencari alasan utama yang menjadi faktor pendorong China untuk memperkuat klaimnya atas Laut China Selatan. Untuk meneliti hal tersebut peneliti memilih periode waktu 2008-2011 dan juga menggunakan beberapa kejadian tahun 2012 (tahun berjalan pada waktu penelitian dilakukan).

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Pada dasarnya, China menerapkan diplomasi, kerjasama dan menjalin hubungan yang luas dengan negara-negara lain terutama dalam bidang ekonomi. Dalam sengketa teritori, China juga memiliki sejarah penyelesaian konflik teritori

dengan diplomasi. Para pemimpin China cenderung membuka diri untuk kerjasama daripada menggunakan kekuatan militer terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. China membuka diri lebih luas dengan menjadi bagian dari organisasi-organisasi internasional dan juga secara intensif membangun kerjasama-kerjasama bilateral, baik dengan negara yang sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatik dengan China maupun peningkatan hubungan diplomatik yang telah ada.

China menjadi anggota forum *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) di tahun 1991, menjadi mitra dialog dan mendirikan *Asia-Europe Member Southeast Asian Nations* (ASEAN) di tahun 1994 dan mendirikan *Asia-Europe Meeting* di tahun 1996 serta mendirikan *Shanghai Five* yang menjadi perintis berdirinya *Shanghai Cooperation Organization*³³. Meskipun China di masa-masa ini cenderung sangat multilateralis, terutama dengan negara-negara di Asia, namun China tetap menunjukkan kesiapannya untuk menggunakan kekuatan militer seiring dengan meningkatnya ancaman yang dihadapinya. Kesiediaan China dalam menggunakan kekuatan militer terbukti dalam kasus Sparty pada tahun 1995 dan juga dalam sengketa selat Taiwan pada 1995-1996³⁴.

China adalah negara yang sangat terbuka untuk kerjasama terutama dalam bidang ekonomi, namun dalam sengketa wilayah masih sangat mengandalkan kekuatan militer terutama di Laut China Selatan³⁵. Dengan negara-negara penghasil energi di Afrika, Amerika Selatan dan Asia, China juga menjalin kerjasama³⁶. Pada awal tahun 1990-an, China meningkatkan strategi diplomasi dengan negara-negara tetangganya. China juga membuka negosiasi Sino-Rusia di tahun 1991 atas sengketa wilayah dan menandatangani perjanjian persahabatan kerjasama dengan Mongolia pada 1994.³⁷

³³ Tamara Renee Shie, "Rising Chinese Influence in The South Pacific: Beijing's Island Fever" dalam *Asian Survey*, Vol 47/2 (March/April 2007) hlm 307-326.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

³⁵ Aksi-aksi militer China di Laut China Selatan akan dipaparkan lebih lanjut pada bab dua tesis ini

³⁶ Leszek Buszyansk dan Iskandar Sazlan, "Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea" dalam *Contemporary Southeast Asia: A journal of Internasional and Strategic Affairs*, Vol. 29, No. 1 (2007) hlm. 143-71.

³⁷ Tamara Renee Shie, *loc. cit.*

China yang sejak 1993 menjadi negara importir minyak terbesar kedua dan bahkan menurut Zhu Jianjun dari China National Petroleum akan mencapai 60% di tahun 2020 memerlukan akses energi di Laut China Selatan yang didalamnya kerjasama dengan ASEAN menjadi hal yang penting³⁸. Kerjasama dengan ASEAN menjadi penting, namun disisi lain, persaingan dengan ASEAN adalah juga hal yang sangat berpengaruh sebab tiga negara yang juga mengajukan klaim atas Laut China Selatan yaitu: Malaysia, Filipina dan Vietnam adalah juga anggota ASEAN.

Tahun 1997 China meluncurkan "*charm offensive*" ke Asia Tenggara yang merupakan gabungan antara diplomasi, ekonomi dan budaya baik dalam tingkat bilateral maupun multilateral. China juga bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan dalam forum ASEAN+3 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu, China juga tergabung dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan menandatangani *Code of Conduct* wilayah Laut China Selatan tahun 2002, meningkatkan jumlah pertukaran pelajar serta kunjungan wisata dan pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti jembatan di Surabaya Indonesia dan rel kereta api jalur utara di Filipina. Dalam waktu yang cukup singkat, hubungan China dengan Asia Tenggara meningkat drastis³⁹.

Disisi lain, meskipun kerjasama antara ASEAN dan China meningkat, beberapa negara ASEAN melibatkan perusahaan-perusahaan internasional dalam kerangka kerjasama melakukan eksplorasi terhadap cadangan minyak di kawasan Laut China Selatan yang oleh China diklaim sebagai haknya.⁴⁰ Padahal, eksplorasi tersebut dilakukan dalam batas ZEE eksklusif negara lain.

Kondisi yang demikian mempertajam konflik di Laut China Selatan. Akibatnya, sumberdaya energi di kawasan tersebut tidak dapat dieksplorasi secara maksimal. Perusahaan-perusahaan multinasional menjadi takut untuk melakukan kerjasama eksplorasi di kawasan tersebut⁴¹. *Energy cooperation* tidak dapat dilaksanakan sebagai penyelesaian atas konflik. Padahal, jika energi menjadi

³⁸ Leszek Buszyansk dan Iskandar Sazlan, *loc.cit.,hlm.155*.

³⁹ Leszek Buszynsky dan Iskandar Sazlan , *loc cit*, hlm. 155.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tamara Renee Shie, *loc cit*, hlm. 140.

motivasi utama dalam klaim-klaim di Laut China Selatan, maka *energy coopeation* adalah cara yang tepat untuk memperoleh energi. *Energy cooperation* antara perusahaan-perusahaan minyak nasional dapat membangun rasa percaya diri dan menjadi ukuran stabilitas suatu kawasan yang kemudian dapat membuka jalan kerjasama lebih jauh bahkan menjadi langkah untuk untuk membangun rezim maritim (*regime maritime building*) yang pada akhirnya dapat memaksimalkan eksplorasi sumber daya alam. *Melalui Energy Cooperation*, masalah yang ditimbulkan oleh perebutan kedaulatan dapat dihindarkan, demikian juga ketidakpastian-ketidakpastian di kawasan tersebut⁴².

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya China bersedia melakukan kerjasama dalam mendapatkan energi terlebih dalam bidang ekonomi, akan tetapi China bersikap berbeda di Laut China Selatan. Tidak seperti yang pernah ada di catatan sejarah, China menunjukkan sikap yang tegas untuk tidak terlibat dalam kompromi maupun negosiasi. Dengan organisasi ASEAN, China meningkatkan kerjasama melalui CAFTA, ASEAN+3 dan ARF akan tetapi di sisi lain, dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, China melakukan tindakan-tindakan sepihak yang memicu ketegangan di wilayah tersebut. Dualisme sikap China yang multilateralis terhadap organisasi ASEAN tetapi unilateralis terhadap Vietnam dan Filipina menjadi hal yang sulit bagi ASEAN.

Sikap China yang demikian membawa negara-negara ASEAN berpendapat bahwa hubungan diplomatik yang dibangun China dengan ASEAN adalah diplomatik semu yang bertujuan untuk mencegah bersatunya negara-negara anggota ASEAN dan membangun oposisi dengan China.⁴³

Dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti berpendapat bahwa motivasi utama China untuk bereaksi agresif di Laut China Selatan bukanlah cadangan energi.

Ketidaksesuaian tindakan sepihak China dengan strategi pertahanan China menjadi salah satu latar belakang penelitian ini. Dalam kebijakan pertahanannya, China menyatakan⁴⁴ :

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Salah satu poin dalam diplomasi pertahanan China yang diambil website resmi kementerian China diakses dari <http://eng.mod.gov.cn/> tanggal 11 Juni 2012 pukul 20.27 WIB

“...China implements a military strategy of active defense. Strategically, it adheres to the principle of featuring defensive operations, self-defense and striking and getting the better of the enemy only after the enemy has started an attack. In response to the new trends in world military developments and the requirements of the national security and development strategy, China has formulated a military strategic guideline of active defense for the new period.”

Dari poin diatas, secara normatif maka China melakukan tindakan militer jika mendapat serangan dari pihak lain. Terminologi *active defense* dalam kalimat tersebut menimbulkan kerancuan apakah China menerapkan strategi *offensive* atau *defensive* karena pada kenyataannya di Laut China Selatan, sangat jelas bahwa China adalah pihak yang lebih aktif melibatkan kekuatan militer.

Untuk itu dalam tesis ini peneliti akan mencoba menganalisa apakah yang menjadi pemicu klaim China atas Laut China Selatan yang sangat kuat sehingga China tidak bersedia melakukan negosiasi sebagai penyelesaian di kawasan itu. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah **“Mengapa China bersikap Unilateral di Laut China Selatan?”**

Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti akan menggunakan teori *power* dalam kaitannya dengan unilateralisme suatu negara yang dalam penelitian ini adalah China.

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum melanjutkan tulisan ini dalam bentuk tesis, peneliti terlebih dahulu melakukan survei literatur terhadap tulisan-tulisan dengan tema yang identik sebagai pembanding serta mengumpulkan literatur-literatur yang akan digunakan sebagai pendukung baik dalam penggunaan teori, data, maupun ide dan kritik terhadap data maupun teori.

Literatur yang akan digunakan peneliti adalah dalam bentuk buku, jurnal, pidato kenegaraan, dokumen-dokumen kerjasama, pernyataan-pernyataan pemimpin negara di media dan publikasi hasil penelitian yang relevan dengan tema Laut China Selatan baik konflik dan peta politik di kawasan tersebut,

Universitas Indonesia

mengenai sejarah pergeseran distribusi *power* dalam politik internasional serta tulisan-tulisan ilmiah yang membahas dan mengetengahkan teori-teori *power*.

Konflik Laut China Selatan bukanlah hal baru. Tulisan yang membahas konflik tersebut sudah banyak dihasilkan. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan fokus menggunakan literatur yang membahas konflik Laut China Selatan dan kaitannya faktor pemicu sikap unilateralis tersebut serta perkembangan *power* yang dimiliki China. Lewat tinjauan pustaka ini peneliti akan menganalisa konflik Laut China Selatan, distribusi *power* negara-negara yang terlibat dalam sengketa, mekanisme yang sudah disediakan sebagai penyelesaian konflik, kegagalan mekanisme dan motivasi negara-negara yang bersengketa dan kemudian akan menganalisa kondisi kawasan Asia dengan keberadaan China sebagai negara yang memiliki kekuatan besar dalam kaitannya dengan stabilitas kawasan.

Salah satu sumber utama dalam penelitian tesis ini adalah buku berjudul *Regions and Powers : The Structure of International Security* karangan Barry Buzan dan Ole Waever yang sekaligus menjadi sumber teori yang peneliti gunakan. Barry Buzan dan Weaver mendefinisikan tiga level *power* yaitu *superpower*, *great power* dalam sistem internasional serta *regional power* di tingkat regional. Kriteria *superpower* adalah memiliki kapabilitas yang luas yang dapat menjangkau seluruh sistem internasional. *Superpower* harus memiliki kapabilitas militer dan politik kelas satu yang diukur pada waktu berjalan serta memiliki kapabilitas ekonomi yang dapat mendukung militer dan ekonominya. *Superpower* juga harus mampu menjangkau militer dan politik global dan diterima oleh pihak-pihak lain dari sikap sebagai *superpower*. Kekuatan berikutnya adalah *great power* yang kualifikasinya berada dibawah *superpower* lalu kemudian *regional power* yang merupakan power terbesar ditingkat regional.

Sumber studi pustaka berikutnya yang digunakan oleh peneliti adalah buku berjudul *After Hegemony* karangan Robert O. Keohane. Buku tersebut akan menjadi referensi peneliti dalam mendefinisikan perubahan distribusi kekuasaan yang terjadi dalam politik internasional. Perubahan distribusi kekuasaan yang ekstrim hanya terjadi setelah peperangan besar yang menjadikan pemenang perang menjadi penguasa. Dalam sejarah, ada dua peristiwa yang menyebabkan perubahan besar dalam sistem internasional. Yang pertama adalah Perang Dunia I

Universitas Indonesia

yang mengantarkan Inggris menjadi hegemoni di tahun 1815 dan kemudian berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 yang menjadikan Amerika menjadi hegemoni. Kedua negara tersebut menjadi hegemoni setelah menjadi pemenang perang⁴⁵.

Sumber berikutnya adalah tulisan yang akan digunakan peneliti dalam tesis ini adalah jurnal berjudul *The Bush Foreign Policy 2001-2003: Unilateralist Theory In A Multilateral World, And The Opportunity For Change Offered By Iraq*, yang ditulis oleh Michael J. Kelly. Tulisan tersebut menentang kemunculan kembali wacana unilateralis dalam politik internasional setelah sekian lama berfokus pada multilateralisme yang mengiringi globalisasi.

Para pemikir hubungan internasional kembali lagi memperbincangkan unilateralisme setelah invasi Amerika terhadap Irak. Sikap unilateralis yang secara tegas dideklarasikan Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush pada masa pemerintahan 2001-2003 membawa topik hubungan internasional kembali kepada unilateralisme.⁴⁶ Invasi Amerika ke Irak menjadi bukti paling nyata ketidakperdulian Amerika terhadap PBB sebagai organisasi multilateral yang mewadahi bangsa-bangsa di dunia, dan juga aliansi-aliansi Amerika yang tidak memberikan dukungan atas invasi tersebut. Amerika, negara yang merasa memiliki kekuatan berani mengambil tindakan sepihak sebab negara tersebut mengetahui bahwa tidak ada kekuatan pihak lain yang dapat menghentikannya, atau menjadi ancaman bila keputusan tersebut diambil.

Peneliti juga menggunakan jurnal berjudul "*Chinese Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accomodating and Hedging*" yang ditulis oleh Rosemary Foot, dan dimuat dalam *Foreign Affairs* 82 Tahun 2006. Dalam tulisan tersebut dipaparkan sikap China terhadap kekuatan Amerika Serikat yang merupakan dominasi tunggal di dunia. China yang meskipun tidak dapat menerima dominasi Amerika, tidak lantas melakukan perlawanan terhadap

⁴⁵Robert O. Keohane, "*After Hegemony*" (Princeton: Princeton University Press, 1984).

⁴⁶Michael, J. Kelly, "The Bush Foreign Policy 2001-2003: Unilateralist Theory In A Multilateral World, And The Opportunity For Change Offered By Iraq" diakses dari http://law.wustl.edu/wugslr/issues/Volume2_1/p221kelly.pdf pada 25 Mei 2012 pukul 15.40 WIB

Amerika⁴⁷. China memiliki strategi-strategi tertentu dalam menghadapi dominasi Amerika. Di dalam dunia yang diyakini unipolar, China berusaha untuk menyusul kekuatan Amerika Serikat.

Kemudian karya Ilmiah Leszek Buszynski&Iskandar Sazlan, berjudul “*Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea*”. Dalam karya tulis tersebut disimpulkan bahwa sikap China yang tidak bersedia untuk *energy cooperation* menjadikan ketidakpastian bagi ASEAN. Upaya penyelesaian dengan *joint development* yang kemudian tidak memberi kedaulatan pada pihak manapun menimbulkan protes dari China yang pada dasarnya berambisi untuk mendapatkan kedaulatan untuk mendapatkan legalitas atas tindakan-tindakan China seperti pemutusan hubungan Taiwan dari daratan⁴⁸.

Para pemimpin China yang berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatan China membuat klaim China atas wilayah maritim Laut China Selatan belum mengarah pada penyelesaian⁴⁹. China juga tidak hanya fokus pada sumber energi di Laut China Selatan tapi juga hak untuk menangkap ikan dan wilayah tersebut dan juga sebagai jalur transportasi.

Selain sumber diatas, peneliti juga akan menggunakan buku berjudul *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* karangan Geoffrey Till. Buku tersebut akan membantu peneliti memaparkan serta menganalisa pentingnya laut dan kekuatan laut yang dimiliki suatu negara.

Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa sumber pustaka yang lain. Berikutnya adalah karya ilmiah berjudul *China's Oil Diplomacy: Is It a Global Security Threat?* Yang ditulis oleh Hongyi Harry Lai tahun 2007. Tulisan tersebut menganalisa diplomasi China dalam beberapa tahun terakhir hingga 2006, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan energi China. Untuk memenuhi kebutuhan minyak yang meningkat, China melakukan pencarian minyak di negara-negara lain. Untuk menjaga keamanan energinya, China melakukan kerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan sejumlah Asia Tengah, Amerika

⁴⁷ Rosemary Foot, “Chinse Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accomodating and Hedging” dalam *Foreign Affair Vol 82*. (2006) hlm. 77-94.

⁴⁸ Leszek Buszynsk dan Iskandar Sazlan, “Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea” dalam *Contemporary Southeast Asia: A journal of Internasional and Strategic Affairs*, Vol. 29, No. 1 (2007) hlm. 143-71.

⁴⁹ *Ibid.*

Latin dan Amerika Utara⁵⁰. Tidak hanya di level negara, upaya pencarian energi juga secara intensif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak nasional China. China juga melakukan upaya mengamankan jalur transportasi minyak untuk mengurangi ketergantungan ke Selat Malaka. China yang tidak memiliki kesempatan untuk mencegah campur tangan Amerika Serikat dalam jalur transportasi laut minyaknya, memilih opsi mengamankan jalur darat sebagai pilihan yang paling tepat.

China masih akan kesulitan untuk menjalankan perburuan minyaknya. Beberapa hambatan bagi China adalah sengketa dengan Jepang di laut China Selatan. Baik China maupun Jepang mengajukan klaim atas Pulau Diaoyutai atau Senkaku di kawasan Laut China Selatan. Sengketa atas perairan seluas 300.000 kilometer kuadrat antara kedua negara belum mencapai kesepakatan meskipun telah dilakukan berbagai perundingan⁵¹.

Literatur tersebut memberi suatu pemahaman lain akan konflik dan sengketa di Laut China Selatan. Perebutan wilayah tidak hanya terfokus pada alasan energi melainkan juga alasan kebanggaan dari masa lalu yang ingin dipertahankan. Kedaulatan atas wilayah yang sudah diperebutkan sejak ribuan tahun menjadi salah satu motivasi negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan.

1.3.2. Kerangka Teori

Dalam penelitian sosial, teori merupakan komponen yang penting dalam memberikan latar belakang sosial dan pembenaran serta penunjang data. Teori juga digunakan untuk penyediaan sebuah kerangka kerja untuk memahami fenomena sosial dan menginterpretasikan hasil penelitian⁵².

Landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam tesis ini adalah konsep *power* dan distribusinya serta pengaruhnya terhadap sikap asertif suatu negara.

⁵⁰ David Zweig dan Bi Jianhai, "China's Global hunt for Energy?" dalam , *Foreign Affair*, Vol. 84, No. 5 (2005) hlm. 25-28.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Alan Bryman "Social Research Methods". 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press:Oxford, 2004).

Konsep *power* merupakan terminologi yang paling banyak menimbulkan masalah dalam sistem internasional dan dalam ilmu politik secara umum. *Power* dalam buku *War and Change in World Order* karangan Gilpin mengarah pada kekuatan militer, ekonomi dan kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Definisi ini kemudian mengabaikan elemen-elemen *intangible* lainnya seperti moral publik, aksi-aksi politik, kualitas kepemimpinan dan faktor-faktor institusional. Buku tersebut juga menjadi sumber teori yang mendukung analisa peneliti dalam tesis ini. Perubahan dalam sistem politik, ekonomi, dan teknologi menjanjikan keuntungan bagi pihak tertentu dan ancaman kerugian bagi pihak lainnya⁵³. Dalam banyak kasus, keuntungan dan kerugian ini sifatnya hanya sedikit dan hanya memerlukan sedikit penyesuaian. Perubahan tersebut memerlukan waktu untuk penyesuaian kembali, dan biasanya tidak menyebabkan fase ketidakstabilan bila aktor-aktornya memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Namun pada kenyataannya, perubahan dalam sistem internasional selalu menimbulkan fase ketidakstabilan⁵⁴.

Aspek psikologis *power* yang lebih sering tidak dapat dihitung lebih dekat jika diasosiasikan dengan konsep martabat. Hubungan antara *power* dan martabat memiliki signifikansi yang kuat dalam sistem internasional.⁵⁵ *Power* perlu ditunjukkan untuk mendapatkan legalitas yang lebih kuat atas kepemilikan *power* tersebut. Kekuatan baru dan perubahan sistem internasional yang menjelaskan bahwa selalu ada kekuatan dominan dalam sistem politik internasional dan negara yang akan mengisi posisi tersebut adalah negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjadi pemilik *power* yang paling dominan dan yang bersikap unilateral untuk memperkuat *power* nya.

Berdasarkan teori Gilpin bahwa dalam sistem internasional akan terjadi perubahan distribusi kekuasaan maka China ingin mendapatkan porsi distribusi kekuasaan setelah penurunan kekuasaan Amerika. Hal ini dapat dilakukan Amerika seiring dengan peningkatan kapabilitas militer dan ekonomi China yang mengalami peningkatan luar biasa. Jika China berhasil menjadi pemilik

⁵³ Robert Gilpin "War and Change in World Politics" (Cambridge: Princeton University, 2009) hlm. 9-20.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

kedaulatan di Laut China Selatan legalitas China sebagai pemilik *power* yang terbesar di Asia semakin kuat.

Menurut Mearsheimer, *power* diukur berdasarkan material atau kapabilitas suatu negara. Besarnya *power* yang dimiliki suatu negara dihitung dari penjumlahan *military power* dan *latent power* yang dimilikinya. *Military power* didefinisikan sebagai angkatan bersenjata yang didukung oleh angkatan laut dan angkatan udara. *Power* yang paling dominan adalah angkatan darat karena kesuksesan suatu negara dihitung dari kemampuan negara tersebut untuk menduduki atau mengontrol wilayah teritorial yaitu daratan, sedangkan udara dan laut hanya merupakan pendukung saja.⁵⁶ *Superpower* didefinisikan sebagai aktor rasional (*rational actor*) yang berpikir strategis dan memikirkan preferensi pihak lain. Aktor ini memberi perhatian pada perubahan yang terjadi jangka pendek dan jangka panjang.

Latent power adalah kemampuan suatu negara untuk melakukan transformasi dari kekayaan dan jumlah penduduknya menjadi kekuatan militer. Dalam dimensi *power*, Mearsheimer fokus pada gabungan kekayaan demografi dan ekonomi.

Dalam asumsi :

1. Sistem internasional adalah sistem yang anarkis, dimana terjadi persaingan yang ketat antar aktor didalamnya.
2. *Superpower* (GP) memiliki kekuatan militer yang ofensif
3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh intensi negara lain yang dapat berubah sangat cepat sehingga setiap negara berfokus untuk melakukan penyeimbangan terhadap ketidakpastian tersebut terutama ketidakpastian yang datang dari pesaing terdekat.
4. Survival merupakan tujuan utama terutama dalam mengatur kesatuan wilayah dan otonomi domestik

Berdasarkan teori Mearsheimer tersebut, peneliti melihat keberhasilan China dalam mentransfer jumlah penduduk yang sangat besar menjadi kapabilitas ekonomi lewat tenaga kerja yang murah untuk menghasilkan produk yang murah yang dapat memasuki pasar global dan membentuk China menjadi negara

⁵⁶ John J. Mearsheimer, “*The Tragedy of Great Power Politics* “ (New York: Norton, 2001).

eksportir pertama di dunia. Kekuatan militer China mampu memenangkan klaim negara tersebut atas Laut China Selatan. Lalu dengan berhasil menjadi pemilik kedaulatan di wilayah tersebut maka China telah menunjukkan kekuatannya untuk mendapatkan legalitas yang lebih kuat sebagai *great power* yang berpotensi menyaingi *superpower*.

Definisi *power* berikutnya yang digunakan oleh peneliti adalah *power* menurut Barry Buzan dan Ole Weaver *power* dibagi menjadi tiga level yaitu: *superpower*, *great power*, dan *regional power*. *Power* dinyatakan sebagai komponen yang memicu suatu negara dalam bersikap terhadap negara lain. *Power* yang dimiliki negara-negara akan dibagi ke dalam tiga level yaitu *superpower*, *great power* dan *regional power*⁵⁷. Level *power* yang dimiliki suatu negara menentukan besarnya kewajiban dan tanggung jawab suatu negara.

Konsep *power* dari Buzan dan Weaver inilah yang akan digunakan peneliti. Pemilihan teori ini dilakukan karena teori *power* dari Buzan dan Weaver tersebut memberikan indikator pada tingkatan-tingkatan *power* di setiap level serta menjelaskan hubungan *power* dengan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai *power* dan lebih penting lagi bahwa konsep ini menurut peneliti adalah konsep yang paling tepat digunakan untuk meneliti China sebagai negara yang mengalami peningkatan *power* dan posisi yang semakin kuat akibat terjadinya perubahan distribusi *power* dari kemunduran Amerika dan konsep tersebut paling tepat digunakan untuk China. Berbeda dengan teori Gilpin yang menggambarkan perubahan distribusi *power* namun tidak memberikan indikator-indikator *power* dan pengaruh distribusinya dalam sistem internasional. Akan tetapi, selain menggunakan teori Buzan dan Weaver sebagai teori utama, peneliti juga akan menggunakan teori Gilpin sebagai teori pendukung terutama dalam menggambarkan perubahan sistem internasional yang menyebabkan perubahan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional.

Negara yang memiliki *power* cenderung bersikap lebih unilateralis. Negara yang paling unilateralis di dunia adalah Amerika Serikat. Salah satu bentuk sikap unilateralis negara tersebut terlihat dari G.W Bush dengan semboyan

⁵⁷Barry Buzan dan Ole Weaver, "*Regions and Powers : The Structure of International Security*" (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) hlm. 25-35.

“*go it alone*” yang menjadi dasar keputusan unilateral negara baik untuk domestik maupun hubungan luar negeri⁵⁸.

Sikap unilateral suatu negara mendorong negara tersebut untuk bertindak sepihak tanpa mempertimbangkan pandangan pihak lain. Keyakinan yang besar atas kebenaran keputusan yang diambilnya menjadi dasar tindakan-tindakan sepihak yang merupakan cara untuk melindungi negaranya.

Keputusan unilateral lahir dari keyakinan akan kebenaran yang dimiliki negaranya. Keputusan tersebut kerap terjadi akibat pandangan yang tertutup atas kebenaran lain, kesalahan informasi serta tidak adanya informasi moral yang menyertai informasi lain sehingga menimbulkan penilaian dan justifikasi yang salah. Karena itu, keputusan unilateralis oleh pembuatnya dianggap sebagai sebuah kebenaran tanpa dapat mengukur kebenaran tersebut. Sikap ini kemudian membangun kepercayaan diri yang lebih besar untuk melakukan suatu aksi.

Sikap unilateral suatu negara tumbuh dari pandangan monokromatik yang sangat lugas dan tegas melihat perbedaan dan mendefinisikan sikap. Unilateralisme mendorong suatu negara untuk tidak takut menjadi yang paling berbeda, bahkan dengan aliansinya. Logika “*us versus them*” Amerika adalah salah satu contoh sikap unilateralis pasca serangan teroris yang menjadi pernyataan sikap untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai keinginan Amerika. Dengan doktrin tersebut, Amerika membangun sebuah perbedaan yang nyata antara Amerika dan pihak diluar Amerika.

Unilateralisme hanya bisa dijalankan oleh suatu negara yang memiliki kelebihan, terutama kekuasaan seperti Amerika Serikat. Salah satu sikap unilateralis Amerika terlihat ketika negara tersebut menolak untuk menyepakati Kyoto Protocol ketika negara-negara barat lainnya termasuk Jerman, Prancis dan negara-negara barat lainnya menerima kesepakatan tersebut⁵⁹. Amerika merasa tidak perlu menerima kesepakatan tersebut sebab Amerika memiliki tujuan dan strategi sendiri dan merasa dirinya tidak perlu tunduk pada kesepakatan apapun.

⁵⁸ Michael, J. Kelly, “The Bush Foreign Policy 2001-2003: Unilateralist Theory In A Multilateral World, And The Opportunity For Change Offered By Iraq” diakses dari

http://law.wustl.edu/wugslr/issues/Volume2_1/p221kelly.pdf pada 25 Mei 2012 pukul 15.40 WIB

⁵⁹ *Ibid.*

Tindakan unilateral yang dalam *Second Report on Unilateral acts of States* yang dibuat oleh International Law Commission (ILC) didefinisikan sebagai “*An unequivocal, autonomous expression of will, formulated publicly by one or more States in relation to one or more other States, the international community as a whole or an international organization, with the intention of acquiring international legal obligations*”⁶⁰.

Asumsi dasar yang membangun permasalahan penelitian ini adalah sikap realis China di Laut China Selatan, terutama karena sikap tersebut menambah ketegangan di Laut China Selatan. Dalam konflik sengketa yang melibatkan lima negara lainnya: Brunei, Vietnam, Malaysia, Jepang, dan Filipina, China sebenarnya memiliki pilihan untuk menyepakati *joint development* atau *energy cooperation*, namun hal tersebut tidak dipilih oleh China sebagai solusi sengketa. China memilih untuk meningkatkan klaim dan meningkatkan kapabilitas militernya di Laut China Selatan.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan studi literatur dan observasi. Peneliti menggunakan buku, jurnal, dokumen-dokumen kerja sama, serta pernyataan-pernyataan negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan yang pada umumnya diperoleh dari jurnal, laporan penelitian dan media massa.

Meskipun metode penelitian yang digunakann adalah metode kuantitatif, namun peneliti tidak akan melakukan kuantifisir terhadap variabel dependen dan independen yang diuji. Namun, hasil penelitian sebuah penelitian kuantitatif tidak harus disajikan dalam bentuk kuantitatif melainkan juga dapat ditampilkan dalam bentuk deskriptif yang akurat dari satu variabel dan hubungan antar variabel⁶¹.

⁶⁰ Diakses dari http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_500.pdf pada 13 April 2012 pukul 16.43 WIB

⁶¹Prasetya Irawan, “*Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*” (Depok: Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2003).

Sebagai penelitian kuantitatif penelitian ini akan membandingkan besarnya kekuatan antara China dan negara-negara yang terlibat dalam sengketa, baik negara yang mengajukan klaim maupun pihak lain yang juga turut terlibat dan membandingkan *power* yang dimiliki China dengan *power* yang dimiliki *major powers* lainnya di Asia.

Penelitian ini didasarkan pada logika deduktif, yang dimulai dengan tema yang umum lalu dipersempit menjadi pertanyaan penelitian dan hipotesis yang kemudian diuji menjadi bukti-bukti empiris.

1.5 Asumsi dan Hipotesa

Dalam tesis ini terdapat asumsi yang oleh peneliti dianggap benar dan dijadikan landasan penelitian dan hipotesa yang akan diuji kebenarannya lewat penelitian ini.

Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa sikap unilateralis China di Laut China selatan dipicu kepercayaan diri China atas kapabilitas dan kekuatannya terhadap lawan-lawannya sehingga China merasa tidak perlu bernegosiasi dengan pihak manapun. Peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut memberi keyakinan bahwa tindakan apapun yang menjadi keputusannya tidak akan ditentang oleh pihak lain atau jika terdapat perlawanan dari pihak lain maka hal tersebut diyakini tidak akan menjadi ancaman yang berarti. China juga tidak takut bila harus kehilangan aliansi dengan keputusan tersebut karena China memastikan bahwa kekuatannya yang lebih besar dapat menjadi jaminan keamanannya.

Menurut peneliti pemilihan sikap sepihak oleh China dengan secara terbuka menunjukkan kesiapan menggunakan kekuatan militer bertujuan untuk menunjukkan kekuatan China baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional untuk mendapatkan pengakuan atas *power* yang dimiliki China dan memiliki akses penuh di Laut China Selatan.

Hipotesa yang akan diuji adalah :

1. Kapabilitas ekonomi dan militer China mendorong China untuk bersikap unilateralis di Laut China Selatan.

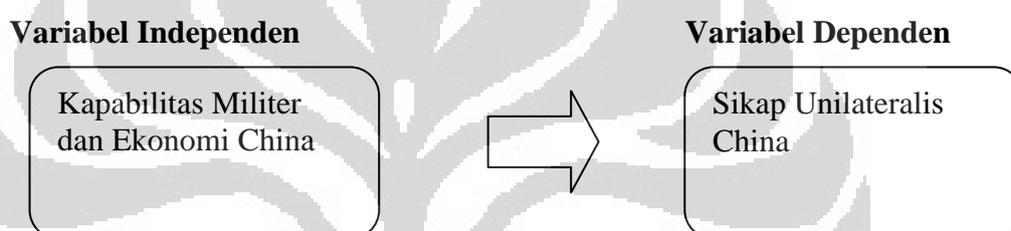
Universitas Indonesia

2. Unilateralisme China lebih terlihat dalam sengketa Laut China Selatan dibandingkan dengan sengketa dengan Jepang di Laut Cina Timur. Hal ini disebabkan negara-negara pengklaim di Laut China Selatan memiliki *power* yang jauh dibawah China dibandingkan dengan *power* yang dimiliki Jepang.

1.6 Model Analisa

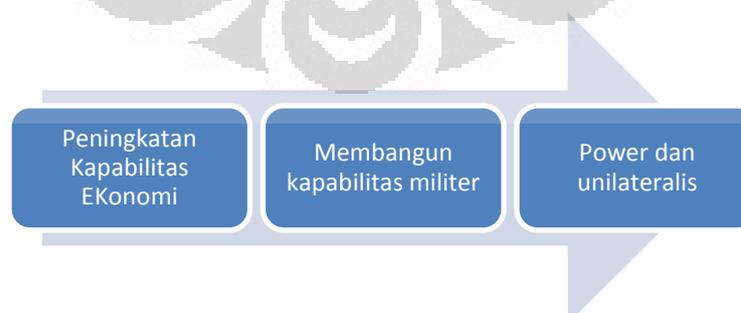
Model analisa penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Model Analisa Penelitian

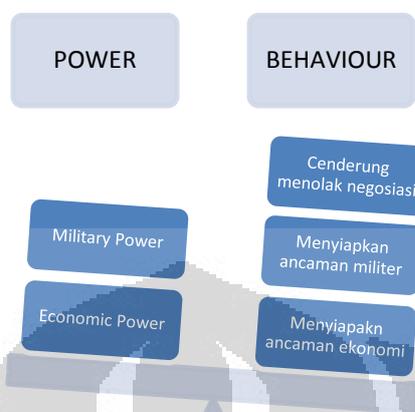


Peningkatan kapabilitas militer dan ekonomi yang sangat tinggi dan jauh lebih besar dibanding dengan lawan-lawannya mendorong China untuk memperkuat klaim atas keseluruhan wilayah Laut China Selatan. Klaim China dalam penelitian ini diartikan sebagai unilateralisme China.

Gambar 1.3 Model Analisa Hipotesa 1



Gambar 1.4 Model Analisa Hipotesa 2

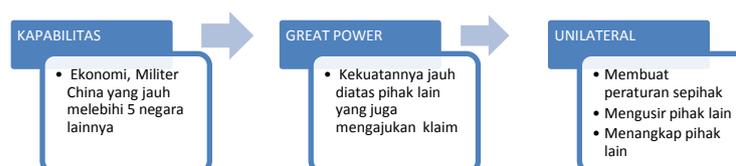


1.7 Operasionalisasi Konsep

Implementasi konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini menjabarkan proses pembentukan kerangka berpikir yang digunakan sebagai alat analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat dua pemikiran utama dalam penelitian ini: konsep *power* dalam hubungan internasional. Dalam sistem internasional terdapat negara-negara yang memiliki *power* lebih besar dibandingkan negara lainnya yaitu *superpower* dan *great power* di tingkat internasional dan regional *power* ditingkat *regional*. Sikap asertif dan unilateral dikaitkan dengan kepemilikan *power* suatu negara.

Perubahan distribusi *power* dalam tesis ini mengacu pada peningkatan *power* yang dimiliki China dan perbedaan *gap power* antara China dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filipina dan Brunei Darussalam.

Gambar 1.5 : Hubungan Antara Power dan Sikap Unilateral



1.8 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.8.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama pemicu tindakan-tindakan sepihak China di Laut China Selatan. Tindakan-tindakan China yang tidak menjalankan undang-undang internasional, dan tidak terbuka untuk negosiasi multilateral, memberlakukan peraturan yang dibuat sendiri tanpa persetujuan dari pihak lain akan diidentifikasi sebagai sikap sepihak yang terjadi melalui *power* yang dimiliki negara tersebut.

1.8.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua signifikansi:

1. Memaparkan dan menyajikan analisis kuantitatif terhadap *power* yang dimiliki China dan pengaruhnya terhadap klaim dan unilateralisme China di Laut China Selatan.
2. Menghasilkan suatu analisis yang dapat dijadikan sebagai teori dalam kajian keamanan dalam membedah isu klaim teritorial dalam kaitan sikap sepihak (unilateralisme) yang dibangun dari *power* suatu negara.

1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam tesis ini akan dibagi menjadi lima bagian.

Bab 1 adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teori, hipotesis, model analisis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 adalah Penjabaran tentang variabel dependen yaitu sikap-sikap China yang unilateralis di wilayah Laut China Selatan.

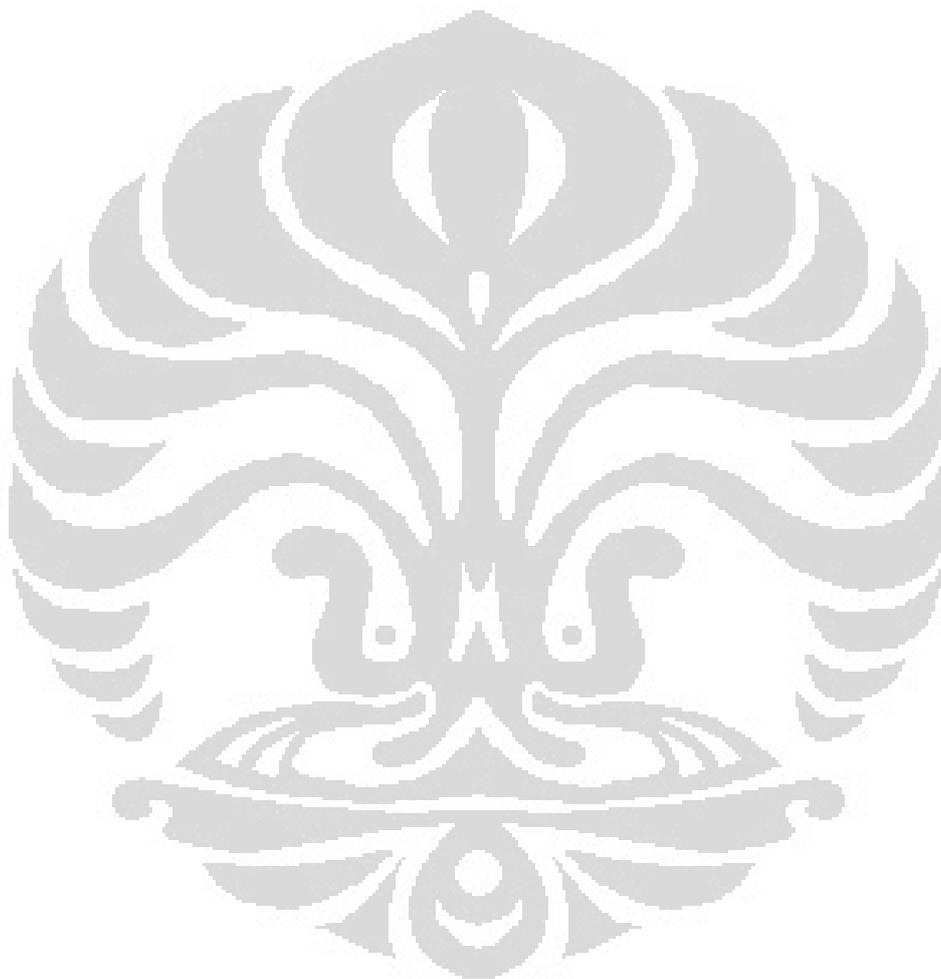
Bab 3 Berisi tentang kebangkitan China dan distribusi kekuasaan yang dimiliki China sebagai *great power* dalam kaitannya dengan unilateralisme China di Laut China Selatan.

Bab IV merupakan analisis dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang hubungan antara China sebagai *great power* dan tindakan-tindakannya yang unilateralis terutama kepada negara-negara yang lebih lemah serta analisis

Universitas Indonesia

keberadaan China sebagai great power yang paling dominan di Asia dalam distribusi *power* di Asia.

Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Bagian ini memberikan kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan yang telah diajukan dalam bagian awal penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan dan ringkasan yang diperoleh dari bagian pembahasan. Sedangkan saran merupakan masukan bagi pembuat kebijakan maupun penelitian selanjutnya.



BAB 2 SIKAP ASERTIF CHINA DI LAUT CHINA SELATAN

Dalam bab dua tesis ini, peneliti akan menganalisa tindakan-tindakan China yang asertif dan unilateral di Laut China Selatan. Aksi-aksi tersebut merupakan tindakan sepihak yang menyalahi kesepakatan maupun konvensi yang diberlakukan. Namun sebelumnya, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan sejarah sengketa, negara-negara yang terlibat dalam sengketa serta konvensi dan kesepakatan yang berlaku di wilayah konflik Laut China Selatan.

2.1 Sejarah Sengketa Laut China Selatan

Klaim kepemilikan yang kepulauan Spratly sudah terjadi lebih dari satu abad dimulai sejak awal tahun 1800-an saat kompetisi kolonialisme terjadi di kawasan Indochina. Sejak keruntuhan kerajaan Inggris dan Prancis, terjadi kekosongan kekuasaan hingga abad ke-20⁶² hal ini memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil alih kekuasaan di kawasan tersebut.

Kekosongan kekuasaan setelah keruntuhan Inggris dan Prancis menyebabkan ketiadaan hukum, aturan, norma, peraturan dan mekanisme yang mengatur penyelesaian konflik wilayah. Sehingga ketika terjadi persaingan antara Inggris, Prancis, Jepang dan China tentang pemilik kedaulatan di wilayah Laut China Selatan, tidak ada mekanisme yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut⁶³. Bahkan, beberapa negara ASEAN yang berbatasan dengan Pulau Spratly pada awalnya tidak terlibat dengan masalah sengketa Spratly. Sebab berdasarkan sejarah, beberapa aktor yang terlebih dahulu menguasai daerah tersebut adalah merupakan pemilik kedaulatan.

Berikut ini adalah empat kelompok kepulauan yang menjadi sengketa di Laut China Selatan⁶⁴:

⁶² Xavier Furtado, "International Law and The Dispute over Spratly Islands: Whiter UNCLOS" dalam *Contemporary South East Asia*, Vol 21 , No 3. 1999 hlm 386-404.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Richard Rousseau, "South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon" diakses dari <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/> pada 02 Juni 2012 pukul 22.15 WIB

1. Kepulauan Prata yang dalam Bahasa China dikenal dengan Dongsha, yang diklaim oleh Taiwan akan tetapi diklaim juga oleh China
2. Macclesfield Bank dalam Bahasa China dikenal dengan Zongsha) diklaim oleh China, Taiwan dan juga Filipina
3. Kepulauan Paracel dalam Bahasa China dikenal sebagai Xishi yang berada dibawah pemerintahan China, bagian dari Provinsi Hainan akan tetapi diklaim juga oleh Vietnam⁶⁵ dan Taiwan.
4. Kepulauan Spratly yang dalam Bahasa China dikenal Nansha, kepulauan yang terletak paling selatan dari Laut China Selatan ini sulit untuk dibedakan antara kepulauan, pulau-pulau kecil, bebatuan, dan perbatasan pulau-pulau nya sehingga sulit untuk mengidentifikasi jumlah persis pulau di kepulauan ini.

Diperkirakan jumlah keseluruhan pulau di Laut China selatan mencapai 90-650 dengan jumlah pulau yang tidak berpenghuni sekitar 50 pulau. Keseluruhan wilayah ini diklaim oleh 3 negara; China, Taiwan dan Vietnam sedangkan 3 negara lagi; Filipina, Malaysia dan Brunei mengklaim sebagian dari pulau-pulau tersebut. Selain Brunei, semua negara yang menyatakan klaim kedaulatan pernah menunjukkan kekuatan militernya.

Vietnam menghadirkan kekuatan militernya di 27 pulau sedangkan China menduduki 9 pulau, Malaysia menguasai 3 pulau dan mencoba menunjukkan kekuatan militer di dua pulau lainnya, sedangkan Taiwan, negara yang pertama kali menghadirkan kekuatan militernya di Laut China Selatan setelah berakhirnya Perang Dunia II, menguasai pulau terbesar, Itu Aba⁶⁶.

Klaim kepemilikan diajukan oleh beberapa negara atas kepulauan, teluk, dan seluruh wilayah Laut China Selatan. Ada tiga hal yang dipermasalahkan oleh

⁶⁵ Sebelum 1974, Vietnam menguasai beberapa pulau di wilayah tersebut akan tetapi kemudian diduduki oleh China setelah berkonflik dengan Vietnam

⁶⁶ Diakses dari <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/> diakses 23 Mei 2012 pukul 23. 45 WIB

pihak-pihak yang bersengketa di wilayah tersebut: klaim kepemilikan wilayah teritorial, peraturan yang diterapkan dan isu politik di kawasan⁶⁷.

Sengketa perbatasan pantai maupun kedalaman laut tidak terlepas dari penerapan hak-hak hukum yang mengatur penggunaan dan kepemilikan segala sumber daya yang ada di bawah laut maupun di kawasan lepas pantai. Konflik teritorial yang paling banyak terjadi dipicu oleh penetapan batas-batas perbatasan antara satu negara dengan negara lainnya. Batas pantai menentukan hak dan kewajiban suatu negara. Penggunaan laut baik untuk tujuan ekonomi maupun militer serta penggunaan bentuk lain, ditentukan oleh kepemilikan hingga wilayah perbatasan. Persaingan untuk mendapatkan perbatasan adalah hal yang mutlak. Hak perbatasan akan menjadi milik satu negara. Karena itu, persaingan untuk mendapatkan batas yang lebih jauh di kawasan perbatasan menjadi sangat penting bagi negara-negara yang bertetangga.

Pulau Spratly dan Paracel adalah dua pulau yang menjadi fokus persengketaan. Pulau lain yang diperebutkan adalah Maclesfield Bank (Sengketa antara China, Taiwan, dan Filipina), Scarborough Shoal atau Pulau Huangyan (sengketa antara China dan Taiwan). Pulau Spratly terletak di selatan China, di tenggara Vietnam, di barat Filipina, dan di utara Malaysia. Sejak diperebutkan tahun 1988, telah terjadi beberapa insiden di wilayah tersebut. China terlibat baku tembak dengan Vietnam dan Filipina di kawasan ini.

Sengketa Kepulauan Spratly kembali mencuat sejak 40 tahun lalu dengan enam aktor yang masing-masing mengajukan klaim kedaulatan atas wilayah itu: China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei. Sengketa Laut Sengketa wilayah teritorial di Laut China Selatan sulit untuk diselesaikan karena konflik di kawasan ini merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut fakta sejarah dan hukum yang diberlakukan. Masing-masing memiliki alasan yang kuat baik berdasarkan sejarah maupun undang-undang. Aktor-aktor yang bersengketa juga mengajukan klaim yang tidak dapat diprediksi.

⁶⁷Peter Dutton, "Three Disputes and Three Objectives, China and the South China Sea" diakses dari <http://www.usnwc.edu/getattachment/feb516bf-9d93-4d5c-80dc-d5073ad84d9b/Three-Disputes-and-Three-Objectives--China-and-the> pada 06 Juli 2012 pukul 01.44 WIB

Masing-masing negara yang mengajukan klaim atas wilayah di Laut China Selatan memiliki alasan yang berbeda. China dan Taiwan mengajukan klaim atas catatan sejarah, sedangkan Malaysia, Vietnam dan Filipina mengajukan klaim atas konvensi hukum laut yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan hak mereka.

Perubahan signifikan terjadi pada 1995 saat terjadinya insiden Mischief Reef dimana angkatan laut PLA membangun pangkalan di kawasan tersebut sehingga menimbulkan konfrontasi antara China dan Filipina. Pulau Spratly terletak di sebelah timur Vietnam dan di selatan Pulau Hainan yang merupakan salah satu provinsi China. Dibandingkan dengan Spratly, klaim terhadap Pulau Paracel terbilang menimbulkan lebih sedikit konflik meskipun Vietnam masih tetap tidak menerima pemerintahan China di wilayah tersebut hingga kini. Setelah kekalahan Vietnam tahun 1974 dalam pertempuran laut dengan China maka Pulau Spratly saat ini berada dibawah kepemimpinan China⁶⁸. Berikut ini adalah tabel menggambarkan konflik yang terjadi di Pulau Spratly dan Paracel⁶⁹:

Tabel 2.1 Sengketa Pulau Spratly dan Paracel

	Kepulauan Spratly	Kepulauan Paracel
Pihak bersengketa	RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei (sebagai zona perikanan)	RRC, Taiwan, Vietnam
Signifikansi Geopolitik	Minyak bumi, gas alam, perikanan, jalur perhubungan pelayaran, Selat Malaka	Minyak bumi, gas alam, jalur pelayaran, Selat Malaka
Klaim kepemilikan (dari abad ke-20)	1930-an: Okupasi Perancis PDII: Okupasi Jepang 1951: Jepang menarik klaim dalam San Francisco Treaty; kemudian di klaim Vietnam	1930-an: Okupasi Perancis PDII: Okupasi Perancis 1951: Jepang menarik klaim dalam San Francisco Treaty; kemudian di

⁶⁸ Diakses dari <http://www.china-briefing.com/news/2011/05/31/chinas-territorial-disputes-in-the-south-china-sea-and-east-china-sea.html> diakses 05 Juni 2012 Pukul 21.24 WIB

⁶⁹ *Ibid.*

		klaim Vietnam 1959: Perancis menarik diri, kepulauan dikuasai Vietnam Selatan 1959: Diklaim oleh RRC
Administrasi saat ini	RRC, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Vietnam dimana Vietnam menguasai sebagian besar dari pulau-pulau.	Propinsi Hainan di RRC
Konflik dan Perkembangan	1974: RRC dan Vietnam 1988: Konflik Johnson Reef antara RRC dan Vietnam 1992: RRC & Vietnam (Da Lac Reef) 1995: RRC & Filipina (Mischief Reef) 2002: ASEAN Declaration of Conduct (DoC)	1974: RRC Vietnam (Pertempuran Kepulauan Paracel) 2002: ASEAN Declaration of Conduct

Dari enam negara yang mengajukan klaim atas Pulau Spratly, klaim yang sangat kuat diajukan oleh lima negara: China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Namun klaim terkuat datang dari China yang menyatakan bahwa keseluruhan Pulau Spratly berada dibawah kedaulatan China. Klaim yang kuat dari lima aktor ini menjadi indikasi bahwa tidak akan ada penyelesaian yang menghasilkan *win-win solution* bagi setiap pihak. Kemenangan bagi satu pihak adalah kerugian bagi pihak lain.

2.1.1 Klaim China

China menyatakan Laut China Selatan sudah berada dibawah pemerintahan China sejak kekuasaan Dinasti Xia yang memerintah antara abad 21 hingga 16 sebelum masehi. Hal yang memperkuat klaim China adalah bahwa wilayah Laut China Selatan dan pulau-pulau di sekitarnya ditemukan oleh China. China juga menyatakan bahwa mereka adalah negara yang pertama kali menempatkan Laut China Selatan dan kepulauan di sekitarnya dalam hukum nasional yang kemudian menerima penyerahan dari Jepang pada akhir Perang Dunia II lalu mengambil alih

kedaulatan atas wilayah tersebut. Menurut China, pemberian nama Laut China Selatan juga dilakukan oleh oleh China. Demikian juga yang membuat peta, yang mempelajari, yang pertama kali melakukan aktifitas di wilayah tersebut dan menjaganya adalah China.

Menurut China jalur laut di Laut China Selatan untuk pertama kalinya dibuka oleh negara tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah, China menyatakan bahwa Laut China Selatan secara keseluruhan berada dibawah kedaulatan China. Akan tetapi China belum menyampaikan klaim tersebut dalam undang-undang internasional apapun sehingga ketika UNCLOS ditetapkan, sengketa wilayah di Laut China Selatan meningkat akibat bertambahnya aktor yang dapat mengajukan klaim berdasarkan pasal dalam konvensi tersebut. UNCLOS yang diadopsi tahun 1982 menetapkan bahwa setiap negara berhak untuk memasukkan wilayah hingga 12 mil laut sebagai bagian dari kedaulatannya dan 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif⁷⁰.

Klaim awal China untuk pertama kalinya juga berkaitan dengan penandatanganan the *Convention Respecting the Delimitation of the Frontier* antara China dan Tonkin pada 26 Juni 1887 yang juga menyertakan perang Sino-Prancis tahun 1884-1885. Dalam artikel 3 konvensi tersebut disertakan penghilangan batas batas teritorial antara Prancis dan China di Laut China Selatan. Ambiguitas ini diterjemahkan oleh China sebagai sebagai penyerahan kedaulatan atas wilayah Paracel dan Spratly kepada China⁷¹.

Selama abad-19 hingga awal tahun 1990-an, China melakukan beberapa usaha agar kontrol terhadap Laut China Selatan berada di bawah China berdasarkan konvensi tersebut, terutama terhadap Jepang dan Prancis yang sebelumnya mengajukan klaim atas usaha yang sama⁷².

Pada hari berakhirnya Perang Dunia II, Taiwan menduduki dan melakukan operasi di Pulau Itu Aba. Pada waktu yang sama Prancis menunjukkan eksistensi yang tetap dalam sengketa di kawasan tersebut dengan memberi dukungan kepada Vietnam atas klaimnya di kawasan itu. Kedaulatan atas Laut China Selatan

⁷⁰Xavier Furtado, "International Law and The Dispute over Spratly Islands: Whiter UNCLOS" dalam *Contemporary South East Asia*, Vol 21 , No 3. 1999 hlm. 386-401

⁷¹*Ibid* .

⁷² *Ibid* .

kemudian menjadi hal yang semakin membingungkan. Setelah Prancis meninggalkan Indochina, status Spratly menjadi tidak jelas sehingga memungkinkan Taiwan mengambil alih wilayah tersebut yang tentunya tidak dapat diterima oleh negara-negara di sekitarnya sehingga memicu pengajuan klaim yang sama⁷³.

Masa tiga dekade setelahnya, sengketa teritorial tersebut menjadi isu yang semakin penting dengan pengajuan klaim oleh 5 negara dari 6 negara yang bersengketa. Agustus 1951, Zhou En-Lai Menteri Luar Negeri China merespon draft perjanjian San Francisco dengan menggarisbawahi posisi Beijing di Laut China Selatan: bahwa Kepulauan Paracel dan Spratly adalah wilayah kekuasaan China yang pada masa perang sempat diduduki oleh Jepang kemudian diambil alih kembali oleh China setelah Jepang menyerah kalah. Dengan demikian pemerintah China mendeklarasikan bahwa Laut China Selatan diambil alih oleh pemerintah China saat Jepang menyerah kalah.

2.1.2 Klaim Taiwan

Taiwan menanggapi klaim China dengan mengajukan klaim yang sama. Seperti halnya China, Taiwan mengajukan klaim atas hak historis. Berdasarkan pendudukan Jepang di kepulauan Hainan tahun 1939, Spratly ditempatkan dibawah kekuasaan hukum Taiwan Setelah Jepang menarik diri dari wilayah tersebut pada saat Perang Dunia II berakhir, Taiwan menempatkan pasukannya di kepulauan Itu Aba. Karena itu, secara resmi Taiwan menyatakan bahwa yang pertama kali menduduki gugusan Spratly adalah Taiwan serta menjadi negara yang juga pertama kali melakukan pengawasan dan penjagaan di wilayah tersebut. Meskipun pasukan Taiwan kemudian ditarik pada 1948 untuk memerangi kekuatan komunis dari China daratan⁷⁴.

Pemerintah Taiwan menyatakan “Berdasarkan sejarah, geografi, hukum internasional dan fakta-fakta yang ada, Kepulauan Spratly adalah bagian dari

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

kesatuan negara Taiwan⁷⁵” Pernyataan tersebut menjadi deklarasi kedaulatan yang oleh Taiwan atas Spratly.

2.1.3 Klaim Vietnam

Vietnam juga mengajukan klaim berdasarkan hak sejarah, seperti halnya China dan Taiwan. Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa kaisar-kaisar Vietnam telah mengatur Kepulauan Spratly sejak tahun 1800-an. Vietnam juga berpendapat bahwa peta menunjukkan Spratly berada dalam kekuasaan Vietnam. Alasan lain yang juga digunakan negara tersebut adalah hak atas Spratly yang didapatkan kembali oleh Vietnam setelah kemerdekaannya dari Prancis dan diberi hak untuk mengambil alih wilayah-wilayah teritorial yang sebelumnya dikuasai oleh Prancis⁷⁶.

Pada rapat pleno PBB ke-7 dalam Sidang umum 1951, Perdana Menteri Vietnam, Tran Van Huu menyatakan bahwa Vietnam harus mendapat keuntungan dari segala kesempatan yang ditawarkan kepada mereka, maka Vietnam menerima kedaulatan atas wilayah Spratly dan Paracel yang adalah milik Vietnam. Dalam buku putih tahun 1975, Pemerintah Vietnam kembali menegaskan Prancis yang sebelumnya menduduki bagian Selatan Vietnam yang dikenal dengan Cochinchina, memiliki segala ketentuan yang diperlukan untuk menjadi dasar hukum kepemilikan atas Spratly. Tahun 1933, Kepulauan Spratly disatukan dengan Cochinchina, yang merupakan wilayah koloni Prancis dan sejak saat itu telah memiliki struktur administratif Spratly.

Memang benar bahwa hukum Prancis menjadi cacat setelah invasi Jepang tahun 1941. Namun demikian, setelah kekalahan Jepang tahun 1945, Prancis mengembalikan Cochinchina yang mencakup seluruh wilayah koloni Prancis kepada Vietnam. Sehingga segera setelah Prancis meninggalkan Indochina, Vietnam berdaulat atas Truong Sa (Spratly). Klaim Vietnam tersebut tentunya ditentang oleh China. Menurut China, tidak ada indikasi yang mengarahkan kedaulatan Spratly pada Vietnam hanya berdasarkan kemerdekaan yang diperoleh

⁷⁵ *Ibid.*

negara tersebut dari Prancis terlebih karena Prancis tidak pernah menyerahkan klaim atas seluruh gugusan kepulauan⁷⁷.

2.1.4 Klaim Malaysia

Klaim Malaysia diajukan pada 1979 ketika pemerintah Malaysia mengeluarkan peta resmi yang menunjukkan bahwa bagian paling selatan kepulauan Spratly menjadi bagian dari gugusan kepulauan Malaysia dan dari EEZ yang menjadi hak Malaysia. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa sebelum klaim tersebut dikeluarkan oleh Malaysia kepulauan Spratly merupakan pulau tidak berpenghuni (*res nullius*). Klaim Malaysia sejalan dengan ketentuan UNCLOS, akan tetapi China dan Taiwan menyatakan bahwa fakta sejarah melumpuhkan klaim Malaysia.

Menurut negara-negara yang mengajukan klaim yang sama, Malaysia telah salah meninterpretasikan ketentuan batas kepulauan dalam UNCLOS. Karena berdasarkan UNCLOS, sebuah negara dapat mengontrol sumber daya hidup maupun yang mati dalam batasan perairannya (*continental shelf*) namun tidak menyebutkan bahwa suatu negara berdaulat atas wilayah tersebut terlebih jika wilayah yang dimaksud berada dalam naungan hukum negara lain. Dalam beberapa hal, klaim Malaysia ini diduga dipicu karna klaim Filipina yang juga menggunakan ketentuan UNCLOS.

Dari dua dasar klaim yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, fakta sejarah dan warisan penjajahan serta ketentuan UNCLOS adalah dasar yang digunakan negara-negara yang menyatakan kepemilikan atas Spratly.

2.1.5 Klaim Filipina

Kehadiran Filipina dalam konflik Spratly menambah keruh sengketa wilayah tersebut. Filipina untuk pertama kalinya mengajukan klaimnya setelah seorang warga negara Filipina bernama Thomas Cloma menyatakan bahwa dirinya menemukan gugusan pulau di Laut China Selatan yang kemudian

⁷⁷ *Ibid.*

dinamakannya sebagai Pulau Kalayan⁷⁸. Satu dekade setelahnya, pada 1968 pasukan militer Filipina menduduki 8 pulau yang diklaim oleh Cloma. Filipina tidak hanya menempatkan pasukannya, Filipina juga membangun landasan udara di Pulau Thitu. Pada 1978 Pemerintah Filipina kemudian mengajukan klaim resmi dengan mengeluarkan Dekrit 1596. Klaim Filipina didasarkan atas dua hal: Pertama, bahwa pulau-pulau tersebut sebelum tahun 1596 adalah wilayah tidak bertuan yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada pihak yang berdaulat atas kepulauan tersebut (*terra nullius*). Karena itu, klaim Cloma dilakukan pada saat wilayah itu tidak berada dalam pengawasan atau kedaulatan pihak manapun. Alasan kedua adalah berdasarkan ketentuan UNCLOS, batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah 200 mil dari lepas pantai. Berdasarkan ketentuan tersebut, Filipina menyatakan bahwa gugusan Pulau Kalayan berada dalam ZEE negaranya.⁷⁹

Klaim Filipina menimbulkan kontroversi. Baik China, Vietnam maupun Taiwan berpendapat bahwa ketika klaim tersebut dilakukan, Pulau Kalayan bukanlah pulau tanpa pemilik. Kepulauan tersebut tidak dapat disebut *terra nullius*. Interpretasi Filipina terhadap ketentuan UNCLOS dipertanyakan oleh pihak lain yang juga mengajukan klaim karena ketentuan tersebut dinilai hanya berlaku untuk zona yang sebelumnya sudah dimiliki suatu negara, bukan zona yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Pada saat Filipina mengajukan klaim atas wilayah tersebut, kedaulatan daerah itu sudah ada dibawah China, Vietnam atau Taiwan. Peta wilayah Laut China Selatan menurut UNCLOS digambarkan sebagai berikut⁸⁰:

⁷⁸ Leszek Buszaynski dan Iskandar Sazlan, "Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea" dalam *Contemporary Southeast Asia: A journal of Internasional and Strategic Affairs*, Vol. 29, No. 1 (2007), hlm.147.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 390-392.

⁸⁰ Peta diambil dari Sumber: <http://www.southchinesea.org/> 24 April 2012 pukul 22.34 WIB



2.2 Kehadiran Pihak Lain Diluar Negara yang Bersengketa:

Amerika, Rusia dan Jepang

China melakukan upaya untuk dalam membangun kemitraan strategis dengan Rusia dalam menghadapi kebijakan strategis Amerika Serikat seperti perluasan NATO, *National Missile Defence*, dan isu Taiwan. Terlebih lagi, China juga telah memperluas pengaruh strategisnya di kawasan Asia Tengah dengan membentuk *Shanghai Cooperation*. China membuka diri untuk hubungan yang lebih luas dengan negara-negara lain terutama melalui pembangunan ekonomi dan hubungan dagang yang intensif⁸¹.

Keberhasilan China dalam sektor ekonomi menjadikan China sebagai negara eksportir terbesar di dunia. Menemukan produk China adalah hal yang paling mudah dilakukan di hampir seluruh penjuru bumi. China ingin menjadi kekuatan ekonomi yang paling kuat. Keinginan tersebut telah dibuktikan. Kapabilitas ekonomi China memungkinkan negara tersebut untuk memperlengkapi dirinya dengan sistem persenjataan yang mampu menyaingi negara-negara saingannya. Dengan kemampuan untuk melengkapi diri dengan persenjataan mutakhir dan konsentrasi untuk membangun kapabilitas militernya, China menjadi negara yang kuat.

⁸¹ *Ibid.*

Pengaruh Amerika di dunia termasuk di Asia juga mengalami perubahan. Menyusul invasi-invasi Amerika di Timur Tengah yang membentuk pencitraan baru yang kurang baik terhadap Amerika dan pasca serangan teroris 9/11 Amerika tidak lagi menjadi *superpower*. Ditengah penurunan *power* Amerika, China mengalami peningkatan *power* yang signifikan. Distribusi kekuasaan dalam sistem internasional mengalami perubahan. China dengan cepat melihat peluang tersebut dan ingin memperbesar porsi kekuasaannya. China melakukan upaya-upaya untuk dapat menunjukkan dominasi *powernya*. Kemajuan China yang telah terbukti menjadi sumber kekuatiran Amerika. Kekuatan yang dimiliki China saat ini menjadi proyeksi kekuatan China di masa yang akan datang. Amerika terancam akan tergeser oleh China dengan kapasitas ekonomi, kapabilitas militer dan ketertantungan dunia pada China.

Salah satu usaha Amerika dalam membatasi kekuatan China adalah membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara yang potensial untuk membangun kerjasama dengan China. Konflik Laut China Selatan membuka kesempatan bagi Amerika untuk membangun kedekatan dengan Filipina, demikian juga Vietnam bahkan Malaysia. Amerika juga dapat membangun multilateral *code of conduct* untuk laut China Selatan.

Dengan demikian, keberadaan Amerika di Laut China Selatan akan menjadi pelindung bagi negara-negara yang lebih lemah. Selain meningkatkan peranan Amerika di Asia, *multilateral code of conduct* juga akan mendorong peningkatan kerjasama dan keterikatan antar negara-negara ASEAN dan juga dengan Amerika.

Malaysia, Vietnam, dan Filipina diperkirakan tidak akan menarik klaimnya, terlebih lagi China. Pemerintah China melihat Laut China Selatan sebagai “*core interest*” yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan. Tindakan China yang agresif terlihat ketika awal tahun 2012 kapal-kapal China memotong kabel-kabel kapal Vietnam yang sedang beroperasi di Laut China Selatan. Dan dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi sedikitnya sepuluh peristiwa konfrontasi antara China dan Filipina.

Tindakan China menjadi petunjuk bagi negara lain terutama Vietnam, Malaysia dan Filipina bahwa konflik sengketa Laut China Selatan akan sulit

Universitas Indonesia

diakhiri dengan damai. Ketiganya juga kemudian memahami bahwa ASEAN, sebagai organisasi kawasan tempat ketiga negara tersebut bernaung tidak dapat berbuat banyak terlebih setelah kegagalan membuat kesepakatan yang dapat menyelesaikan klaim teritorial.

Mencari aliansi yakni negara yang lebih besar dan kuat serta dianggap mampu menjadi penjamin keselamatan adalah langkah yang kemudian ditempuh oleh negara-negara tersebut. Filipina semakin dekat dengan Amerika.

Ketika Sekertaris Negara Amerika Serikat, Hillary Clinton berpidato di Hanoi dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan beraliansi dengan Asia Tenggara dalam konflik Laut China Selatan, peta kedekatan Amerika dan Filipina menjadi semakin jelas. Ketika itu, Hillary Clinton juga menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung kolaborasi diplomasi oleh setiap pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan tanpa penggunaan kekerasan⁸².

Amerika secara tegas memberikan dukungan kepada Filipina sehingga negara tersebut dapat membeli persenjataan-persenjataan laut yang merupakan perlengkapan Filipia dalam menghadapi sikap asertif China. Filipina yang memiliki persenjataan laut modern atas bantuan Amerika semakin memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi China di Laut China Selatan. Tidak hanya bantuan perlengkapan senjata kelautan, Amerika dan Filipina juga telah menyepakati perjanjian pertahanan bersama yang akan mendatangkan pasukan Amerika untuk membantu Filipina untuk membantu konflik di Laut China Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut, *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) mencatat peningkatan perlombaan senjata di Asia Tenggara dengan peningkatan pembelian persenjataan negara-negara di kawasan tersebut hingga 50% dalam jangka waktu 5 tahun terakhir⁸³.

Kepentingan Amerika di Laut China Selatan tidak hanya sebatas pada kepentingan jalur perdagangan dengan Jepang dan Korea. Amerika juga

⁸²Vaudine England, "Why are South China Sea tensions rising?" diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11152948> pada 08 Juni 2012 Pukul 23.20 WIB

⁸³ *Ibid.*

menangkap sinyal yang ditunjukkan China untuk menjadi kekuatan yang dominan. Untuk itu, Amerika membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara di Asia. Amerika membangun hubungan kembali dengan Filipina dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam, membentuk aliansi *de facto* dengan Singapura dan bahkan mencoba mendekati Kamboja dan Myanmar, dua negara yang sebelumnya 'diasingkan' oleh Amerika. Jelas terlihat bahwa Amerika mengubah konsentrasinya dari Timur Tengah ke Asia melalui pembentukan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara di Asia.

Lalu, Amerika Serikat secara terbuka memberi peringatan kepada China atas klaim China terhadap lintasan dan resolusi yang memberikan klaim yang diterima semua pihak adalah merupakan kepentingan Amerika. Amerika memberi perhatian yang sangat serius kepada Laut China Selatan dan secara berkala mengirim kapalnya melintasi wilayah tersebut dan menganggap sengketa perairan sebagai hal yang sangat penting. Di sisi lain, sikap Amerika tersebut menimbulkan kemarahan China⁸⁴.

Tidak hanya Amerika, India juga ikut terlibat dalam sengketa tersebut. Ditengah kuatnya klaim yang diajukan oleh China di Laut China Selatan, keterlibatan India, sebagai rekan Amerika juga semakin kuat. Meskipun campur tangan Amerika di Laut China Selatan di tahun 2012 tidak seintensif tahun-tahun sebelumnya, namun dipastikan bahwa Amerika akan tetap mengambil peranan sebagai pendukung negara-negara anggota ASEAN yang membutuhkan bantuan dari luar kawasannya. Konflik Laut China Selatan menjadi salah satu faktor penentu hubungan Amerika dengan negara-negara aliansinya di Asia. Menurut laporan dalam *Asian Alliances in Twenty-First Century*, para ahli keamanan di Amerika berpendapat bahwa untuk menghadapi konflik Laut China Selatan, Amerika perlu meningkatkan aliansi militer yang lebih luas, lebih kuat dan lebih koheren di Asia.

ASEAN sebagai organisasi kawasan terbukti sejak bertahun-tahun tidak memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik yang melibatkan negara-

⁸⁴Joshua Kurlantzick "Growing US Role in South China Sea" diakses dari <http://www.cfr.org/china/growing-us-role-south-china-sea/p26145> pada 25 Mei 2012 pukul 20.33 WIB

negara anggotanya. Sebaliknya, meskipun dengan adanya sengketa Laut China Selatan, peran China di ASEAN semakin meningkat. Negara anggota lain yang tidak terlibat konflik juga membangun kedekatan yang semakin baik dengan China. Bahkan, Thailand yang sangat dekat dengan China ditakutkan Malaysia dan Vietnam akan mendukung China bila terjadi konflik yang lebih serius di Laut China Selatan. Dengan demikian ASEAN tidak lagi dapat dilihat sebagai organisasi yang dapat mempersatukan dan melindungi sesama anggotanya.

Vietnam dan Filipina tidak hanya beraliansi dengan Amerika, tetapi juga dengan India. Vietnam membangun kerjasama dengan India yang memicu kemarahan China. India dan Vietnam telah menyepakati eksplorasi energi bersama di Laut China Selatan yang oleh media China ditanggapi dengan menyiapkan kekuatan militernya. Menurut Financial Times, kapal perang China menghadang kapal India yang akan keluar dari pelabuhan Vietnam Juli 2012. Kejadian tersebut merupakan pertentangan pertama kali antara China dan India yang terjadi di Laut China Selatan, akan tetapi hal tersebut mengisyaratkan tanda bahwa konflik di kawasan tersebut akan cenderung memanas.

Keberadaan Amerika di Laut China Selatan membangun peta politik baru. Adalah pilihan yang cukup sulit bagi negara-negara di Asia untuk menentukan pilihan antara Amerika sebagai negara yang memiliki kekuatan dominan, dan China yang akan menjadi pusat integrasi ekonomi Asia. Vietnam, Singapura dan negara-negara lain masih menunjukkan ketidaksiapan dalam memilih Amerika atau China. Namun jika tidak menginginkan pola aliansi dan kekuasaan pada saat Perang Dingin, maka Amerika perlu melakukan tindakan yang tegas untuk dapat mendorong negara-negara di Asia menentukan posisinya.

Dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang diselenggarakan musim panas di Bali 2011 lalu, China dan ASEAN membuat kerangka kesepakatan antara China dan ASEAN sebagai jalan penyelesaian damai atas sengketa Laut China Selatan yang didasarkan pada kesepakatan sebelumnya. Namun kesepakatan tersebut hampir menyelesaikan isu utama dan keterlibatan Amerika Serikat

sebagai penjamin hak-hak negara-negara Asia Tenggara cenderung semakin meningkat⁸⁵.

Kesepakatan antara ASEAN dan China tidak berhasil menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Kesepakatan tersebut hanya berfungsi lebih pada komitmen untuk menjalankan petunjuk bagi negara-negara yang mengajukan klaim karena sudah pasti negara-negara yang mengajukan klaim akan sulit sekali untuk menarik klaimnya. Kesepakatan yang dihasilkan tidak dapat diharapkan sebagai solusi perdamaian yang menyelesaikan masalah sebab terdapat ketidakpastian dalam kalimat-kalimat di dalam kesepakatan tersebut dan lebih banyak berfokus pada isu pemeliharaan lingkungan daripada klaim teritorial yang tumpang tindih⁸⁶.

Tidak ada pihak yang akan mengalah. Masing-masing menyiapkan eksplorasi energi dengan caranya. Meskipun ada peringatan dari China, India dan Vietnam berencana untuk meneruskan rencana eksplorasi bersama mereka di bagian barat Pulau Spratly sedangkan ExxonMobil berencana untuk melakukan pengeboran di pesisir Vietnam tahun 2013. Demikian juga dengan China National Offshore Oil Cop juga melangkah lebih jauh untuk melakukan eksplorasi.

2.3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dan Sikap Unilateralis China Terhadap Mekanisme Tersebut

Sejak terjadinya sengketa di Laut China Selatan, beberapa mekanisme penyelesaian telah disepakati namun hingga kini mekanisme-mekanisme tersebut masih belum dapat menyelesaikan sengketa yang ada. Mekanisme penyelesaian ditempuh dengan kesepakatan bilateral, regional maupun multilateral di tingkat internasional yang melibatkan PBB.

2.3.1 UNCLOS

Keenam negara yang berkonflik atas Spratly : Brunei, Malaysia, China, Filipina, Taiwan serta Vietnam (Spartly six) melakukan upaya-upaya konfrontasi diplomasi dan aksi-aksi militer⁸⁷. Sengketa China dan Filipina atas perebutan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Pulau Spratly adalah babak terakhir konflik yang menjadi wabah besar di kawasan Asia-Pasifik selama beberapa dekade terakhir⁸⁸.

Setiap aksi militer dari satu pihak memicu reaksi pihak lain sehingga aktifitas militer satu pihak akan menimbulkan ketegangan. Pesawat udara Filipina yang terbang di atas Mischief mengundang China untuk melakukan ‘renovasi’ struktur di kepulauan itu. China mengeluarkan pengumuman resmi dan mengirimkan para diplomatnya⁸⁹.

Konflik militer di kawasan tersebut menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian konflik untuk menjadi penyelesaian damai. Menurut para ahli, salah satu perangkat resmi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan ketegangan tersebut adalah mengatur sikap dan tindakan setiap pihak agar tidak melakukan aksi-aksi yang mengundang reaksi agresif dari pihak lain sehingga timbul ketegangan. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dapat digunakan dalam proses justifikasi tindakan setiap pihak yang bersengketa⁹⁰.

UNCLOS menetapkan batas-batas pantai yang menjadi hak suatu negara. Namun dalam sengketa Laut China Selatan, hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan justru menambah jumlah aktor yang mengajukan klaim akibat penetapan tersebut membuat Malaysia dan Filipina berhak atas Spratly. Artikel 3 pasal 3 dari Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) yang diadakan tahun 1982 menyatakan “Setiap Negara memiliki hak untuk menetapkan luasnya laut teritorial sampai dengan batas tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.” Pasal menetapkan kedaulatan Spratly. Namun tidak menyelesaikan sengketa sebab jika mengikuti hukum UNCLOS maka 12 mil laut Spratly adalah Malaysia.

UNCLOS merupakan hasil kesepakatan multilateral yang sudah ada hampir tiga dekade. UNCLOS merepresentasikan upaya paling komprehensif dalam menciptakan suatu kerangka atau standar norma yang dapat diterima secara bersama. Setelah melalui proses ratifikasi dari keenam pihak yang bersengketa di

⁸⁸ Furtado, Xavier “International Law and The Dispute over Spratly Islands: Whiter UNCLOS” *Contemporary South East Asia*, Vol 21 , No 3. 1999 hlm 390-401.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 387.

⁹⁰ *Ibid*.

Laut China Selatan, UNCLOS diharapkan dapat memberi norma yang berlaku bagi setiap pihak, prinsip-prinsip maupun aturan yang mengatur ketentuan-ketentuan wilayah perbatasan laut, penentuan pemberian nama secara hukum terhadap makhluk hidup maupun benda mati yang merupakan sumber daya laut dan menjadi acuan dalam penyelesaian konflik teritorial di masa yang akan datang.

UNCLOS menetapkan batas kedaulatan suatu negara adalah hingga 12 mil dari garis pantai sedang zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah hingga 200 mil dari garis pantai. Penentuan perbatasan tersebut juga meliputi sumber daya yang ada di sekitar batas tersebut maupun sumber daya di dasar laut⁹¹. Hal ini signifikan karena negara yang memiliki kedaulatan terhadap kepulauan juga memiliki kedaulatan atas segala sumber daya yang ada di sekitar wilayah tersebut. Sumber daya minyak dan gas di sekitar kepulauan Laut China Selatan menjadikan daerah tersebut menjadi sangat penting dalam geopolitik⁹².

Sengketa di Laut China Selatan perlu untuk dibedakan menjadi dua hal, perebutan kedaulatan atas wilayah teritorial dan perebutan kedaulatan maritim. Kedaulatan teritorial berfokus pada klaim atas hak kepemilikan atas tanah yang biasanya mengacu pada fakta sejarah yang menjadi acuan penentu pihak berhak atas wilayah tersebut. Sedangkan klaim kedaulatan atas wilayah laut mengacu pada pembatasan perbatasan laut yang ditetapkan pada tahun 1982 lewat UNCLOS III⁹³.

Sebagai konvensi yang telah diratifikasi dan disepakati oleh setiap pihak yang bersengketa (*Spartly Six*), UNCLOS merepresentasikan kerangka dan aturan-aturan yang secara bersama telah disepakati untuk perbatasan laut. Karena itu, UNCLOS memberi petunjuk dasar untuk melakukan negosiasi dan untuk mengajukan pilihan pada pihak-pihak yang mengajukan klaim untuk melakukan negosiasi. Namun demikian UNCLOS tidak terlepas dari kekurangan. Meskipun UNCLOS adalah merupakan bagian dari hukum internasional yang sangat penting, akan tetapi UNCLOS tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam konflik

⁹¹ Diambil dari konvensi UNCLOS III, 1982

⁹² Shelly Zhao, "China's Territorial Disputes in the South China Sea and East China Sea" diakses dari <http://www.china-briefing.com/news/2011/05/31/chinas-territorial-disputes-in-the-south-china-sea-and-east-china-sea.html> pada 05 Juni 2012 pukul 22.47

⁹³ *Ibid.*

Spratly. Meskipun dalam banyak hal konflik Spratly adalah merupakan konflik teritorial, namun terdapat konflik sejarah dan geopolitik yang juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Hal tersebut menjadi tantangan konvensi dan UNCLOS dalam menyediakan satu kerangka atau perangkat hukum yang dapat diterapkan kepada semua pihak secara konsekuen⁹⁴.

Salah satu kesulitan terbesar dalam menetapkan suatu konvensi atau legitimasi terhadap konflik di Laut China Selatan adalah perbedaan norma-norma yang dianut negara-negara yang mengajukan klaim dan juga kriteria dan landasan pengajuan klaim yang diberikan setiap negara. Vietnam, China, dan Taiwan mengajukan klaim atas kepulauan Spratly secara keseluruhan mengacu pada aspek historis sedangkan Brunei, Malaysia dan Filipina mengajukan klaim berdasarkan ketentuan UNCLOS.⁹⁵ Menemukan titik tengah atas klaim yang berdasarkan hak historis dan klaim hak atas hukum internasional adalah hal yang sangat sulit. Jika ditinjau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UNCLOS, maka klaim yang diajukan Vietnam, China dan Taiwan merupakan hal yang tidak masuk akal.

Seperti negara-negara lain yang juga mengajukan klaim, China telah meratifikasi UNCLOS. Akan tetapi, klaim atas hak yang berdasarkan historis yaitu China sebagai yang pertama kali menemukan Spratly dan gugus kepulauan di Laut China Selatan, yang pertama kali mempelajari dan membuat peta dan memberi nama wilayah tersebut dan beberapa landasan historis lainnya. Bahkan sejak 25 February 1992, *Standing Committee of the National People's Congress* mengadopsi hukum teritorial air dan perbatasannya (*The Law on the Territorial Waters and their Contiguous Areas*)⁹⁶. China juga tidak pernah mempublikasikan dasar-dasar penetapan perbatasan lautnya, dari jarak perairan berapa batas teritorial di Laut China Selatan diukur.

Beijing membuat beberapa publikasi yang menyatakan bahwa sumber daya-sumber daya yang ada di Spratly dapat diatur secara bersama, namun Beijing tidak pernah berhenti menyatakan dan mengingatkan tetangga-

⁹⁴ Xavier Furtado, *loc cit*, hlm. 387.

⁹⁵ *Ibid.*

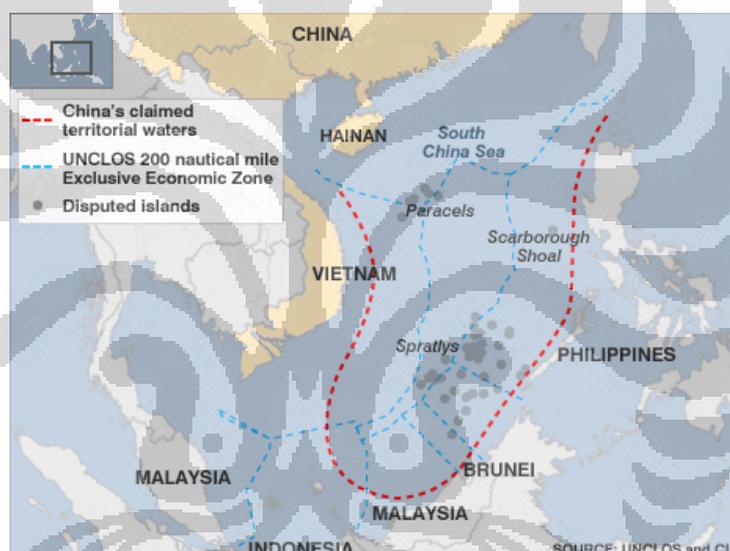
⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.* hlm 402.

tetangganya di Asia Tenggara bahwa kedaulatan dan otoritas atas Spratly adalah milik China⁹⁷.

Penerapan UNCLOS menjadi sangat terbatas karena adanya faktor-faktor sejarah yang berbeda dan pemilahan interpretasi yang berbeda-beda dalam UNCLOS demikian juga dengan bias dari penggunaan kata-kata dalam konvensi yang menyebabkan UNCLOS tidak dapat digunakan sebagai aturan yang dapat dipercaya dan diaplikasikan pada setiap pihak dalam mengatur sikap dan tindakan negara-negara yang mengajukan klaim.

Gambar 2.1 Peta Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS⁹⁸



2.3.2. Mekanisme Penyelesaian di Tingkat Regional : ASEAN

Dari lima negara yang mengajukan klaim kedaulatan yang kuat di Laut China Selatan, tiga negara diantaranya: Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei adalah anggota ASEAN. Secara politis, hal ini menempatkan China menjadi pihak oposisi ASEAN yang dipersatukan oleh kepentingan tiga anggotanya. Hal tersebut mendorong ASEAN untuk mendesak China menerima deklarasi ASEAN 2002

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Peta diambil dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17809959>

tentang *Conduct of Parties* di Laut China Selatan guna mengurangi ketegangan antara China dan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.⁹⁹

Deklarasi 2002 tersebut mencakup kesepakatan setiap pihak untuk menetapkan wilayah teritorial masing-masing dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum damai, tanpa penggunaan kekerasan¹⁰⁰. Deklarasi itu kemudian dijadikan acuan bagi setiap negara yang bersengketa dalam bertindak. Hingga satu dekade sejak deklarasi tersebut disepakati, kondisi Laut China Selatan setelah 1995 relatif aman. China melakukan perubahan pada kebijakan untuk meningkatkan integrasi regional dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dengan tujuan peningkatan ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan program-program kebudayaan.¹⁰¹

Norma dan kesepakatan menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan serta penting untuk mencegah konflik yang lebih dalam. ASEAN dan China menandatangani deklarasi kesepakatan yang mengatur setiap sikap pihak di Laut China Selatan pada November 2002. Yang merupakan momen pertama kali China menerima kesepakatan multilateral tentang isu Laut China Selatan. ASEAN berusaha mendapatkan pengakuan China atas norma-norma internasional yang diberlakukan terhadap Laut China Selatan sejak 1992, sedangkan China memperlakukan Laut China Selatan sebagai "*lost territories*" yang harus dipersatukan kembali dengan China daratan sehingga China tidak merespon permintaan ASEAN¹⁰².

Sikap China terhadap Laut China Selatan berbeda setelah krisis Taiwan tahun 1995-1996 lepas dari China. Terlebih lagi setelah terlibat dengan Amerika Serikat melalui *Visiting Forces Agreement of 1998*, China menyadari nilai dari norma dan perilaku (*value of norms of behaviour*) dalam mendesak kekuatan eksternal (*external powers*). Dalam situasi *power* yang dominan terlihat jelas dapat mengambil keuntungan dari pihak yang lemah, maka diperlukan sebuah kekuatan penyeimbang untuk melakukan negosiasi penetapan norma dan

⁹⁹ Peter Dutton "Three Disputes and Three Objectives: China and South China Sea" dalam *Naval War College Review*, Vol 64, No 4 (Autum 2011) hlm.1 4-26.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Leszek Buszynsky dan Iskandar Sazlan, "ASEAN The Declaration and Conduct, and The South China Sea". Dalam *Contemporary Southeast Asia* Vol 2 No.3 (Dec 2003) hlm. 143-150.

peraturan. Tanpa kekuatan penyeimbang tidak akan ada insentif yang dapat diambil oleh dominan *power* untuk menerima desakan atas norma dan peraturan¹⁰³.

Dalam hal norma dan kesepakatan, ASEAN dan China pernah menandatangani *code of conduct* yang merupakan landasan bagi kedua belah pihak dalam bertindak. Namun hingga kini, landasan tersebut belum ditransfer kedalam bentuk sikap yang menjaga hubungan baik antar pihak-pihak yang berkonflik.

Meskipun belum dilaksanakan, kesediaan China dalam menandatangani deklarasi tersebut merupakan salah satu cara China untuk tetap menjaga nama baiknya di ASEAN sehingga terbuka kerjasama sama-kerja sama yang lain seperti perdagangan bebas *China ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*. China sebelumnya bersikeras dengan kesepakatan bilateral dengan sesama negara juga mengajukan klaim terhadap Laut China Selatan dan menghindari kesepakatan mutualisme. Deklarasi tersebut mengindikasikan perubahan dalam pola pendekatan China terhadap konflik mengalami perubahan.

Pada 4 November 2002, ASEAN menandatangani deklarasi kesepakatan sebagai acuan untuk Laut China Selatan dengan China yang bagi ASEAN dianggap sebagai satu batu loncatan, titik awal kesepakatan. China sebelumnya bersikeras untuk berfokus pada kesepakatan bilateral dan menghindari kesepakatan multilateral. China lebih memilih kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang juga mengajukan klaim atas wilayah Laut China Selatan ketika China dinilai berupaya untuk melakukan pemulihan atas kehilangan wilayah teritorial dan kedaulatan atas wilayah tersebut. Hingga saat ini, China dinilai terang-terangan menunjukkan kepentingan yang lebih besar dalam konflik Laut China Selatan dan bersikap lebih menerima negosiasi bilateral dibandingkan multilateral yaitu norma-norma ketentuan dengan ASEAN¹⁰⁴.

Deklarasi panduan yang mengatur sikap setiap pihak yang ditandatangani oleh ASEAN dan China sempat membekukan sengketa teritorial di wilayah tersebut. Akan tetapi klaim kedaulatan kembali muncul terutama oleh China. Untuk menghindari perpecahan pihak-pihak bersengketa mulai mengadakan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

negosiasi untuk membuat *code of conduct* yang baru di tahun 2010. Partisipasi China dalam penandatanganan *code of conduct* tersebut merupakan perubahan besar pada China yang sebelumnya menolak negosiasi multilateral¹⁰⁵.

Meskipun negosiasi tersebut sudah disepakati, namun ketegangan di Laut China selatan diprediksi akan terus meningkat karena tiga hal. Alasan pertama adalah karena dipicu peningkatan kapabilitas persenjataan China dan kecenderungan yang tinggi untuk mempertahankan klaim negara. Alasan kedua adalah peningkatan nasionalisme China dan rasa percaya diri negara yang sedang berkembang sangat pesat ini, dan preses penyeimbangan kebijakan Amerika terhadap Asia.

Sejak 1992, sudah terlihat potensi terjadinya ketegangan di Laut China Selatan. Akan tetapi hingga saat ini, negosiasi multilateral masih tidak memberi hasil yang efektif¹⁰⁶. Belum ada mekanisme multilateral yang benar-benar dijalankan oleh setiap pihak yang bersengketa.

Sangat jelas bahwa China menghindari negosiasi multilateral dan lebih menyukai jika isu Laut China Selatan dipisahkan dari organisasi ASEAN. China berusaha untuk mengeluarkan isu Laut China Selatan dari *agenda ASEAN Regional Forum (ARF)* dan juga militerisasi di Pulau Spratly. Dari sisi China, kedaultan di kepulauan tersebut dapat dinegosiasikan bila dilakukan dengan negosiasi bilateral, bukan multilateral¹⁰⁷. Karena isu Laut China Selatan dipandang sebagai isu yang sangat penting oleh China, maka ketegangan dapat memuncak sewaktu-waktu di kawasan ini.

2.3.3 Mekanisme Penyelesaian Bilateral

2.3.3.1 China dan Vietnam

China dan Vietnam menempuh cara untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Sekertaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (CPV),

¹⁰⁵ Vikram Nehru, "Rising tensions in the South China Sea" diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2012/03/03/rising-tensions-in-the-south-china-sea/> pada 22 April 2010 pukul 14.33 WIB

¹⁰⁶ Richard Rousseau, "South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon" diakses dari <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/> pada 05 Juni 2012 pukul 22.32 WIB

¹⁰⁷ *Ibid.*

Nguyen Phu Trong mengunjungi China pada tanggal 11-15 Oktober 2011 atas undangan Presiden China, Hu Jintao. Kunjungan tersebut merupakan upaya peningkatan kerjasama kedua negara terutama untuk dapat ditingkatkan kepada penyelesaian konflik berdasarkan negosiasi. Hubungan tersebut dibangun berdasarkan persahabatan dimasa lalu yang diharapkan dapat meningkat pada hubungan strategis yang komprehensif dimasa-masa berikutnya¹⁰⁸.

Ketika Ma Xiaotian, wakil kepala PLA bertemu dengan Quang Khue, wakil kepala Vietnamese People's Army pada 24 September 2009 bertukar pikiran tentang keamanan regional terutama dalam kaitan kepentingan bersama antara kedua negara. Kedua wakil negara ini mencoba membicarakan kembali hubungan persahabatan antara kedua negara yang pernah terjalin dimasa lalu dan kemudian melihat peluang untuk meningkatkan kepercayaan dalam bidang militer dan memperluas kerjasama antar angkatan militer kedua negara agar dapat mengatasi isu-isu sensitif yang terjadi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Pembicaraan kedua wakil kepala angkatan bersenjata kedua negara dapat meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan. Mekanisme bersama yang dapat ditempuh adalah meningkatkan hubungan kerjasama melalui konsultasi-konsultasi yang kemudian meningkat pada kesepakatan kerjasama.

2.3.3.2 China dan Filipina

Dalam kunjungan Presiden Filipina Benigno Aquino ke China, Agustus 2011, bersama dengan Menteri Wen Jiabao dibahas hubungan bilateral kedua negara. Kedua pemimpin menyepakati kawasan Laut China Selatan untuk menjadi wilayah persahabatan diantara negara-negara yang mengajukan klaim dan menjadi flashpoint dalam jalur shipping dengan menggunakan *code of conduct* yang sudah ada.¹⁰⁹

Dalam pertemuan dengan Presiden China Hu Jintao, pemimpin negara tersebut bahwa China akan secara aktif mendukung Laut China Selatan untuk

¹⁰⁸ "China, Vietnam Seeks Way to Improve Bilateral Relations" diakses dari <http://english.cri.cn/6909/2011/10/05/2021s661381.htm> pada 07 Juni 2012 pukul 02.26 WIB

¹⁰⁹ Barbara Mae Dacanay, "China and Philippines agree to peace over South China Sea" diakses dari <http://philippinenews.com/-us-news/3737-china-and-philippines-agree-to-peace-over-south-china-sea.html> pada 17 Juni 2012 pukul 02.30 WIB

menjadi laut persahabatan yang damai dan diwarnai kerjasama. Meskipun tidak membahas mekanisme yang spesifik untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan persahabatan, namun pertemuan kedua negara menghasilkan respon yang positif bagi kedua negara. Dalam pertemuan tersebut Presiden Aquino mengingatkan Presiden Hu bahwa masalah Laut China Selatan adalah permasalahan regional yang memerlukan solusi regional.

Pada 20 Juli, dalam pertemuan antara menteri luar negeri di Bali, Indonesia, China dan ASEAN menyepakati panduan kerjasama di Laut China Selatan setelah ASEAN bersedia menarik kalimat yang menyatakan bahwa ASEAN harus menjadi satu kesatuan dalam pengambilan keputusan terkait Laut China Selatan. Hal ini dinilai lebih tepat oleh China karena tidak semua negara-negara anggota ASEAN terlibat dalam sengketa Laut China Selatan¹¹⁰.

Skema kesepakatan tersebut mencakup landasan pelaksanaan aktifitas-aktifitas bersama dan ukuran terhadap klaim yang ada di wilayah sengketa. Proyek akan meliputi aktivitas ekonomi dan aksi penyelamatan (*joint rescue operation*) tersebut¹¹¹.

2.3.3.3 China dan Taiwan

Sejak 1999, China membuat larangan memancing tahunan untuk dua atau tiga bulan pada musim panas di wilayah bagian north-western Laut China Selatan. Pada 2011 larangan tersebut diberlakukan 16 Mei- 1 Agustus di daerah antara 12° lintang utara hingga 113° bujur timur ke bujur barat. Kapal penangkap ikan yang berada di area tersebut selama masa larangan diberlakukan akan dikenai denda, demikian juga dengan hasil tangkapan serta peralatannya akan disita. Menurut media dan para ahli di China, aturan tersebut diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut dan mencegah aktifitas penangkapan ikan yang berlebihan¹¹².

¹¹⁰ *Ibid.*

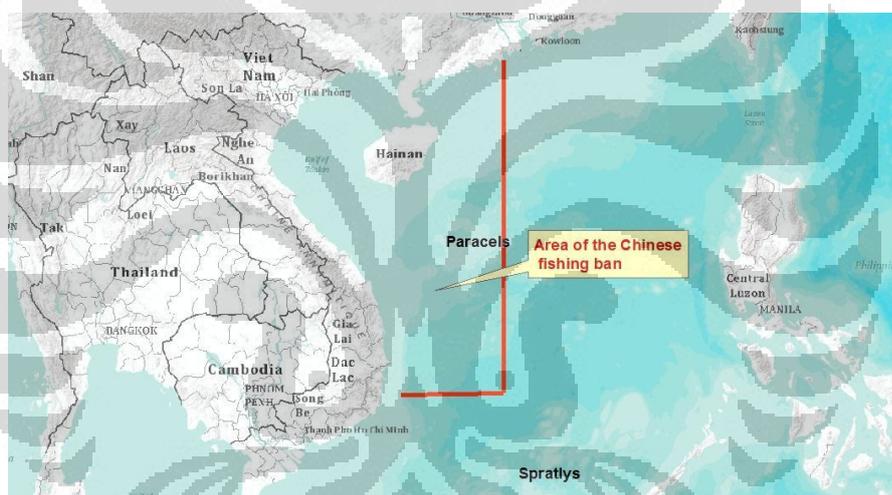
¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Nguyen Dang Thang, "Fishing Ban in the South China Sea: In quest for an alternative solution" diakses dari <http://southchinastudies.org/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/668-a-bilateral-network-of-marine-protected-areas-between->

Dengan memberlakukan larangan ini China memposisikan dirinya sebagai pemilik kedaulatan di wilayah tersebut. Padahal, wilayah yang diberlakukan larangan itu adalah wilayah yang juga diklaim oleh Vietnam.

Atas kejadian tersebut, pemerintah Vietnam merespon dengan beberapa langkah. Menteri luar negeri dan Perkumpulan Nelayan Vietnam mengajukan protes atas larangan tersebut. Tindakan China tersebut dinilai sebagai sikap unilateralis yang tidak menghormati kedaulatan Vietnam atas Hoang Sa (Kepulauan Paracel), hak-hak atas kedaulatan dan hukum yang mengatur batas wilayah zona ekonomi eksklusif Vietnam.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Larangan Memancing yang Diberlakukan oleh China, 2011¹¹³



Sikap unilateralis China tersebut termasuk pelanggaran menurut United Nation Convention artikel 74(3) dan 83(3) yang meminta negara-negara di wilayah sengketa untuk dapat membuat kesepakatan tentang penangkapan ikan dan menghindari penetapan batas-batas zona ekonomi eksklusif. Meskipun sangat sulit untuk menyepakati aturan-aturan dalam penangkapan ikan yang mencakup

[vietnam-and-china-an-alternative-to-the-chinese-unilateral-fishing-ban-in-the-south-china-sea-by-hai-dang-vu](#) pada 28 Mei 2012 pukul 12.55 WIB

¹¹³Sumber peta diakses :<http://southchinaseastudies.org/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/668-a-bilateral-network-of-marine-protected-areas-between-vietnam-and-china-an-alternative-to-the-chinese-unilateral-fishing-ban-in-the-south-china-sea-by-hai-dang-vu> pada 28 Mei 2012 pukul 17.16 WIB

semua area yang diperebutkan. Terlebih karena China sudah menyatakan bahwa tidak ada hal yang dapat dinegosiasikan di Laut China Selatan dan Vietnam yang menyatakan bahwa perairan tersebut masih dalam batasan zona ekonomi eksklusifnya.

Department of Foreign Affairs (DFA), membantah laporan yang dipublikasikan di website kedutaan besar China di Manila yang menyatakan bahwa China dan Filipina telah menyetujui bahwa ketentuan UNCLOS tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan kedaulatan teritorial¹¹⁴. Publikasi tersebut merupakan aksi sepihak dari China sebab Filipina tidak pernah menyetujui bahwa UNCLOS tidak dapat dijadikan landasan hukum. Sebaliknya, berdasarkan UNCLOS, Filipina mengajukan klaim kedaulatannya terhadap zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinennya¹¹⁵.

Atas kejadian tersebut, pemerintah Filipina foreign office untuk sementara waktu menghentikan pertemuan diplomatik dengan kedutaan China sebagai sanksi atas pemberitahuan akan informasi yang salah kepada pemerintah China. Selain itu, DFA juga mendakwa Duta Besar Ma Keqing atas penyampaian informasi yang salah tentang kesepakatan yang tidak pernah terjadi yakni penarikan semua kapal di area Panatag Shoal.

Juli 2011, pemimpin ekonomi China maupun Filipina mengadakan pertemuan guna memicu peningkatan kerjasama perdagangan antar kedua negara. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan di Shanghai pada saat kunjungan Presiden Filipina, Benigno S. Aquino III.¹¹⁶

Agenda utama pertemuan ini adalah untuk membangun kerjasama yang lebih luas hingga arus masuk dan keluarnya barang maupun investasi dari kedua negara menjadi lebih mudah. Akan tetapi isu penting yang juga turut dibahas adalah masalah di sebelah barat laut Filipina dan sengketa kedaulatan di Laut China Selatan. Kerjasama ini diharapkan akan menjadi landasan bagi kerjasama-

¹¹⁴ Diakses dari <http://globalnation.inquirer.net/38203/dfa-slams-chinese-report-on-agreement-on-unclos> pada 30 Mei 2012 pukul 19.45 WIB

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Darwin Wally T. Wee, "Philippines, China upgrade bilateral trading agreement" diakses dari <http://www.mindanews.com/top-stories/2011/08/16/philippines-china-upgrade-bilateral-trading-agreement/> pada 27 Mei 2012 pukul 23.45 WIB

kerjasama lainnya serta menjadi salah satu jalan penyelesaian konflik di Laut China Selatan.

Pada Agustus 2011, President China Hu Jintao menandatangani perjanjian bilateral antara China dan Filipina tentang industri energi, pertambangan, dan mineral dan pembangunan-pembangunan yang berjalan¹¹⁷.

2.4. Unilateralisme China

Pulau Paracel dan Spratly serta gugusan pulau-pulau di sekitarnya dinyatakan sebagai satu titik rawan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Sejak 1990-an negara-negara di sekitarnya telah melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik yang melibatkan 5 negara. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan negosiasi dan kerjasama yang lebih intensif. Beberapa upaya tersebut dapat dinyatakan berhasil seperti keberhasilan dalam membuat ASEAN Declaration on Conduct Parties (DOC) di Laut China Selatan. Semua pihak yang menandatangani perjanjian tersebut sepakat untuk menciptakan solusi yang damai atas konflik Laut China Selatan dan membangun maritime cooperation untuk meningkatkan stabilitas Laut China Selatan. Akan tetapi setelah penandatanganan DOC tidak ada aksi atau langkah-langkah yang ditempuh negara-negara tersebut sebagai tahapan penyelesaian yang damai. Kemudian pihak-pihak yang bersengketa kembali mengajukan protes satu dengan yang lain¹¹⁸.

Kesepakatan yang tidak efektif ini menjadi salah satu kontributor positif bagi China dalam menciptakan citra China yang bersedia untuk bekerjasama dan bernegosiasi. Kesediaan China untuk menandatangani DOC menunjukkan implikasi yang sejalan dari diplomasi China yang damai. Sikap tersebut sekaligus membangun kepercayaan dari negara-negara ASEAN untuk membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi dengan China.

Ketegangan di Laut China Selatan terutama dipicu sikap China yang agresif. Aksi satu pihak akan diikuti dengan reaksi pihak lain yang biasanya lebih berusaha mengimbangi aksi sebelumnya yang dianggap sebagai ancaman.

¹¹⁷Diakses dari <http://www.gov.ph/2011/08/31/signing-of-bilateral-agreements-between-the-philippines-and-china-august-31-2011/> pada 01 Juni 2012 pukul 21.33 WIB

¹¹⁸“Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation Tran Truong Thuy1”, CSIS Publication

Ketegangan terjadi akibat reaksi satu pihak atas aksi pihak lain yang dianggap sebagai ancaman atau peningkatan klaim atas wilayah yang diperebutkan.

Kebangkitan China dilakukan dengan damai lewat bidang ekonomi. China memang menetapkan strategi pertumbuhan negaranya untuk dilakukan dengan damai. Namun, dalam soal teritorial China dikenal agresif. Dalam urusan perbatasan wilayah, China sangat sensitif, siap mengambil risiko dan bersedia menggunakan kekerasan¹¹⁹.

Tahun 2012 ketegangan di Laut China Selatan meningkat. Isu tentang tindakan China yang sepihak dibahas dalam East Asian Summit 19 November 2011 di Bali. Akan tetapi dalam kesempatan tersebut tidak ada tanggapan yang berasal dari chairman sehingga isu tersebut menjadi isu yang didiamkan. Beberapa hari kemudian setelah East Asian Summit tersebut, Filipina mengajukan protes terhadap China karena 3 unit kapal China mengganggu perairannya di dekat Sabina, dalam kawasan Laut China Selatan. Menanggapi aksi China tersebut, Filipina mengirimkan Gregorio Del Pilar, coast-guard cutter berusia 46 tahun yang dibelinya dari Amerika Serikat untuk melindungi kepentingannya di kawasan tersebut¹²⁰.

Tindakan sepihak China juga terjadi di kawasan yang menjadi area pertambangan hidrokarbon di wilayah yang diklaim oleh Vietnam. Penambangan tersebut merupakan kerjasama antara Vietnam dan Videsh, perusahaan minyak dan gas India. Diwaktu yang sama, *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) juga menyatakan telah mengirim kapalnya untuk melakukan pencarian minyak dan gas di Laut China Selatan¹²¹.

Serangan China terhadap militer Vietnam di Pulau Paracel pada 1947, serangan China terhadap militer Vietnam disekitar (Fiery Cross Reef tahun 1988 dan pengusiran yang dilakukan China terhadap militer Filipina dari Mischief

¹¹⁹ Subrata Saha, "China's Grand Strategy: From Confucious to Contemporary" Strategy Research Report, 2010.

¹²⁰ Vikram Nehru, "Rising tensions in the South China Sea" diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2012/03/03/rising-tensions-in-the-south-china-sea/> pada 28 Mei 2012 pukul 20.32 WIB

¹²¹ *Ibid.*

Reef pada 1995.¹²² Ketiga aksi tersebut merupakan rangkaian insiden yang memicu peningkatan ketegangan di Laut China Selatan.

China menunjukkan kesiapan untuk melancarkan aksi militer terhadap Vietnam dan Filipina akan tetapi China sendiri diwaktu yang sama melakukan eksplorasi minyak dan gas bahkan menyatakan aksi tersebut secara terbuka. Hal ini mengindikasikan klaim China yang semakin kuat terhadap keseluruhan wilayah Laut China Selatan. Tidak ada pihak lain yang diperkenankan untuk beraktifitas di wilayah itu meskipun secara hukum internasional Vietnam dan Filipina berhak atas wilayah dimana mereka melakukan aktifitas pengeboran. China menunjukkan dengan tegas bahwa kekuatan militernya siap untuk melindungi daerah yang diklaimnya sebagai wilayah kedaulatannya.

Meskipun China memegang prinsip damai dan kerjasama, China menyadari kapabilitas yang dimilikinya dapat menjadi modal untuk melakukan aksi-aksi sepihak. Disamping itu, strategi damai dan kerjasama China tidak dapat diterapkan dalam setiap situasi. China yang sangat sensitif dengan wilayah perbatasannya bersedia menggunakan keunggulan dan kemauan menggunakan kekuatan untuk melidunginya dan akan menggunakan opsi kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatannya.¹²³ Modernisasi persenjataan china semakin besar tahun 2008, semakin PD semakin unilateralis.

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan dunia yang paling penting. Daerah pesisir kepulauan tersebut memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk kemajuan suatu negara. Karena itu, negara-negara yang berada di luar kawasan tersebut juga menginginkan kebebasan untuk melakukan perdagangan di kawasan tersebut¹²⁴. Tingginya keinginan negara-negara di sekitarnya untuk mendapatkan akses di Laut China Selatan memicu peningkatan

¹²²Peter Dutton, "Three Disputes and Three Objectives: China and South China Sea" dalam *Naval War College Review*, Autum 2011, Vol 64. No 4 hlm 42.

¹²³ Subrata Saha, "China's Grand Strategy: From Confucious to Contemporary" Strategy Research Report, 2010.

¹²⁴Diakses dari <http://southchinaseastudies.org/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/650-growing-tension-in-south-china-sea-causes-and-cures-by-s-d-pradhan> pada 04 Juni 2012 pukul 14.33 WIB

ketegangan. Beberapa aksi di bawah ini merupakan mendorong ketegangan di Laut China Selatan¹²⁵:

- Konfrontasi antara dua kapal China dengan satu kapal eksplorasi minyak Filipina yang dimiliki oleh *Forum Energy*. Menurut Jim Webb, Ketua Senat Hubungan Luar Negeri Amerika untuk Asia Timur, kapal China berupaya menyerang kapal Filipina tersebut. Akan tetapi China menolak tuduhan itu.
- May 2011, Pesawat China dilaporkan berada diatas kepulauan Islet, Atolls dan Reef yang merupakan wilayah yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Aksi tersebut dinilai oleh negara lain sebagai aksi yang dilakukan China untuk meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
- Pada 26 May 2011, dan diulangi kembali pada 9 Juni 2011, Kapal patroli China memotong kabel-kabel kapal eksplorasi Vietnam yang sedang digunakan untuk penelitian gempa bumi di lokasi 120 mil lepas pantai dari kepulauan Vietnam. Aksi ini secara jelas dilihat sebagai pelanggaran terhadap Declaration of the Conduct of Parties (COD) antara China dan ASEAN.
- Minggu ketiga bulan Juli, 2011 kapal India, INS Airavat yang melakukan kunjungan persahabatan ke pelabuhan Nha Trang, Vietnam diminta oleh China untuk keluar “dari perairan China” ketika kapal tersebut bergerak ke pantai Haiphong. Hal ini dinyatakan sebagai tindakan China yang melanggar kedaulatan Vietnam.
- September 2011, China menolak eksplorasi minyak dan gas Vietnam yang dilakukan bersama dengan perusahaan India, ONGC Videsh Ltd (OVL). China menyatakan bahwa eksplorasi dapat dilakukan hanya jika dengan persetujuan China. Tanpa persetujuan China maka eksplorasi tersebut dinyatakan ilegal. India menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa penolakan China tidak memiliki dasar hukum karena block 127 dan 128 tempat eksplorasi itu dilakukan adalah milik Vietnam.

¹²⁵*Ibid.*

Sehingga aksi China ketika itu dinilai sebagai cara untuk memulai ketegangan dengan melanggar kedaulatan Vietnam sekaligus menjadi sinyal kepada engara-negara lain yang menyatakan bahwa China tidak akan membiarkan mereka beraktifitas di wilayah sengketa.

Tabel 3 : Tindakan China yang tidak sesuai dengan Konvensi¹²⁶:

WAKTU	PERISTIWA
1947	Serangan China terhadap militer Vietnam di Pulau Paracel pada
1988	Sengketa teritorial menjadi sumber ketegangan antara negara-negara yang bertetangga seperti pembunuhan pelaut Vietnam oleh China di Spratly ¹²⁷ .
1995	Pengusiran yang dilakukan China terhadap militer Filipina dari Mischief Reef 1995. ¹²⁸
1999	Sejak 1999, china membuat larangan memancing tahunan untuk dua atau tiga bulan pada musim panas di wilayah bagian nothe-western Laut China Selatan. Pada 2011 larangan tersebut diberlakukan 16 Mei-1 Agustus didaerah antara 12° lintang utara hingga 113° bujur timur ke bujur barat.
2009	Terjadi insiden berturut-turut pelanggaran menangkap ikan dan penangkapan ratusan nelayan
2009-2010	Vietnam menuntut keputusan China untuk mendirikan pemerintah lokal di Kepulauan Paracel
Maret 2010	China dengan tegas menyatakan bahwa Laut China Selatan merupakan “ <i>core interest-nya</i> ”
Juli 2010	Menteri Luar Negeri Yang Jiechi mengatakan tidak akan ada mekanisme multilateral yang dapat menyelesaikan konflik Luat China Selatan

¹²⁶ Tabel disusun oleh peneliti dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik berita, dokumen negara dan artikel ilmiah.

¹²⁷ <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/>

¹²⁸ Dutton, Peter “Three Disputes and Three Objectives: China and South China Sea” *Naval War College Review*, Autum 2011, Vol 64. No 4 p. 42

30 Juli 2010	Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa Kedaulatan China di Laut China Selatan adalah merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.
07 September 2010	Kapal penangkap ikan China, <i>Minjinyu 5179</i> menabrak dua kapal milik Jepang di Senkaku/Diaoyu
11 September 2010	Kapal China menawan nelayan Vietnam di perairan sekitar Pulau Paracel
27 Oktober 2010	China mengirimkan kapal patroli baru di wilayah Laut China Selatan
02 Maret 2011	Filipina mengajukan protes terhadap dua kapal patroli China yang menyerang kapal milik Filipina di pesisir Pulau Spratly. Aksi China tersebut diduga sebagai respon atas latihan bersama yang diadakan oleh Filipina bersama dengan Amerika Serikat
29 Mei 2011	Vietnam mengajukan protes terhadap kapal China yang berada di wilayah ZEE nya.
Agustus 2011	Kapal induk China ditempatkan di wilayah Laut China Selatan ¹²⁹ .

¹²⁹“China's 1st aircraft carrier to be deployed in August” diakses dari <http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-china-s-first-aircraft-carrier-to-be-deployed-in-august/20120309.htm> pada 05 Juni 2012 pukul 11. 23 WIB

BAB 3 CHINA SEBAGAI *GREAT POWER*

Dalam bab tiga tesis ini, peneliti akan menggunakan konsep teori *power* untuk mengidentifikasi, mengukur serta membandingkan *power* yang dimiliki China dengan negara-negara pengklaim yang lain. *Power* yang dimiliki oleh China kemudian akan dikaitkan dengan sikap asertif yang cenderung unilateralis dari China dalam konflik Laut China Selatan.

3.1 *Power* dan Distribusinya

Konsep *power* adalah terminologi yang paling banyak menimbulkan masalah dalam sistem internasional, dan dalam ilmu politik secara umum. *Power* dalam buku *War and Change in World Order* mengarah pada kekuatan militer, ekonomi dan kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. *Power* dalam hubungan internasional memiliki signikansi dengan martabat¹³⁰.

Sistem internasional ada sebagai bentukan aktor-aktor yang memasuki hubungan sosial dan membangun struktur sosial untuk membangun kerangka politik, ekonomi, atau jenis kepentingan yang lebih tertata baik sebab kepentingan satu pihak bisa saja berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Kepentingan tertentu yang paling banyak muncul dalam sistem sosial tersebut cenderung merefleksikan *power* relatif dari aktor-aktor di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kepentingan aktor-aktor individual akan berubah demikian juga dengan *balance of power* diantara aktor-aktor dalam sistem internasional turut berubah sebagai dampak dari perubahan ekonomi, teknologi, dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia¹³¹.

Konsekuensi yang kemudian terjadi atas perubahan-perubahan ini adalah adanya aktor-aktor yang beroleh keuntungan. Sebaliknya ada juga yang mengalami kerugian dari perubahan yang terjadi. Perubahan menyebabkan distribusi kekuatan yang baru antar aktor. Gambaran distribusi kekuasaan yang baru didasarkan atas ide bahwa sebuah sistem sosial, termasuk sistem

¹³⁰ Robert Gilpin, "*War and Change in World Politics*" (Cambridge University Press:2009) hlm. 156-186.

¹³¹ *Ibid.*

internasional didefinisikan dalam terminologi manfaat atau keuntungan¹³². Konsep tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Perubahan Sistem Internasional

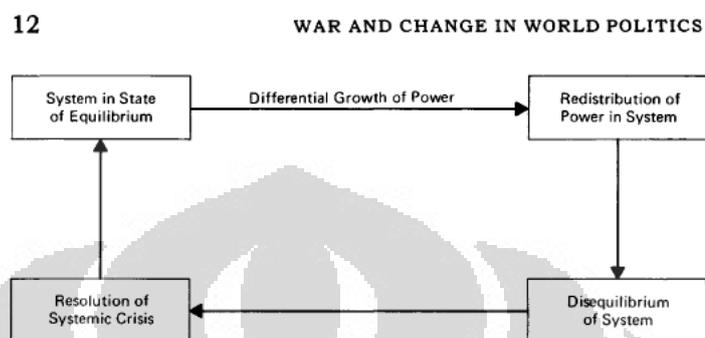


Figure 1. Diagram of international political change.

Sifat dasar dari sistem internasional menentukan kepentingan siapa yang dipenuhi oleh fungsi sistem. Perubahan dalam sistem mengimplikasikan perubahan dalam distribusi keuntungan yang ada demikian juga dengan distribusi kerugian yang ditanggung individu dengan keberadaan sistem tersebut. Karena itu politik internasional harus fokus pada sistem internasional terutama pada upaya-upaya politik aktor-aktor yang terlibat dalam sistem internasional sebagai upaya untuk meningkatkan kepentingan masing-masing¹³³. Pencapaian kepentingan tiap negara dalam sistem internasional ditentukan oleh sifat hubungan internasional seperti penguasaan sistem, peraturan-peraturan dalam sistem, pengenalan hak, dll).

Barry Buzan dan Ole Waever menyatakan bahwa distribusi *power* di dunia membentuk polaritas kekuatan. Polaritas kekuatan adalah unipolar, bipolar, dan multipolar. Distribusi kekuatan menyangkut struktur politik global dan *balance of power*. Akhir Perang Dingin merupakan awal terbentuknya struktur internasional yang baru dengan berakhirnya sistem bipolar¹³⁴. Runtuhnya struktur bipolar menimbulkan ancaman baru sebagai konsekuensinya. Yang pertama disebabkan

¹³² *Ibid.*, hlm 9.

¹³³ *Ibid.*, hlm 10.

¹³⁴ Barry Buzan dan Ole Weaver "*Regions and Power: The Structure of International Security*" (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) hlm. 30-41 .

superioritas militer barat yang berlebihan, terutama Amerika. Tidak ada lagi kekuatan penyeimbang sehingga Amerika menjadi kekuatan yang jauh lebih kuat daripada seluruh negara di dunia¹³⁵, bahkan jika kekuatannya tidak dapat dikalahkan meskipun beberapa negara beralinasi.

Runtuhnya struktur politik bipolar membangkitkan negara-negara dunia ketiga oleh persaingan *superpower* selama Perang Dingin, digantikan oleh monolitis yang didominasi oleh barat karena tidak ada lagi pesaing yang memiliki ideologi yang berbeda. Kekuatan barat memasuki semua ranah: sosial, keuangan, maupun politik. Barat juga memiliki akses penuh terhadap perdagangan, bantuan, pengakuan dan menjadi pengatur dalam perkumpulan negara-negara seperti NATO, EU dan WTO¹³⁶.

Setelah Perang Dingin berakhir, Amerika menjadi satu-satunya negara adikuasa menyusul runtuhnya kekuatan Uni Soviet sehingga tidak ada lagi pengimbang kekuatan yang dapat mencegah Amerika dalam bertindak. Selain itu, Amerika memiliki kekuatan ekonomi yang dominan, melebihi Uni Eropa dan Jepang. Globalisasi ekonomi meningkatkan ketergantungan bangsa-bangsa di dunia terhadap Amerika, terutama negara-negara maju. Sebaliknya, ketergantungan Amerika kepada negara lain relatif rendah karena 90% produksi Amerika digunakan untuk konsumsi dalam negeri.¹³⁷

Buzan dan Weaver menggambarkan pola pemetaan *power* pasca Perang Dingin sebagai berikut: Terdapat satu *superpower* dan empat *great power* dalam sistem internasional, 1+4 adalah komposisi *power* yang mereka gambarkan. Amerika sebagai *superpower* dan Rusia, Jepang, China, dan EU sebagai *superpower*.

Runtuhnya dua kekuatan besar setelah Perang Dingin menjadikan posisi regional dalam struktur internasional menjadi lebih jelas¹³⁸. Kedudukan regional menjadi lebih diperhitungkan dan regional memiliki otoritas yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan baik untuk melakukan kerjasama maupun untuk

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Sri Winingsih, "Kebijakan Luar Negeri Amerika" Tesis Universitas Indonesia, 2009. hlm 9-15.

¹³⁸ Barry Buzan dan Ole Weaver, *op.cit.*

mengambil sikap dalam konflik. Secara sederhana, melalui pendekatan tersebut dapat dinyatakan bahwa era pasca Perang Dingin fokus terhadap 2 asumsi:

1. Runtuhnya persaingan dua global *power* mengurangi tekanan, pengaruh dan kepentingan global *power* terhadap negara-negara lain¹³⁹
2. Asumsi berikutnya adalah, bahwa *superpowers* dalam era pasca Perang Dingin menjadi '*lite-power*' yang artinya dalam dinamika internasional menarik diri dari kerjasama militer dan kompetisi strategis dalam isu-isu yang sedang bermasalah. Meninggalkan serta menjalankan pemerintahan lokal dengan konsentrasi lokal yang menjadi pemilik *power* untuk mengatur wilayahnya¹⁴⁰.

Dengan berakhirnya dua kekuatan dua *superpower* pasca selesainya Perang Dingin, tidak ada lagi persaingan antara dua kekuatan besar yang mau tidak mau menekan negara-negara di dunia sehingga kekuatan-kekuatan local memiliki kesempatan untuk melakukan manuver¹⁴¹. China membuktikan hal tersebut. Keinginan China untuk mengurangi kontrol *superpower* di wilayah Asia ditunjukkan dengan penolakan China terhadap campur tangan Amerika dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam tatanan keamanan internasional, akan tetapi lebih dari satu abad setelah transisi tersebut karakter Perang Dingin yang diwarnai dengan perlombaan kekuasaan masih berlangsung hangat¹⁴². Satu dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, *superpower* dan empat *great power* lainnya (China, EU, Jepang dan Rusia) menjadi kurang aktif dan cenderung tidak mencampuri urusan-urusan keamanan di luar negaranya. Serangan teroris kepada Amerika Serikat tahun 2001 menjadi pemicu keterlibatan *great power-great power* akan tetapi intervensi yang diberikan para *great power* juga tidak banyak dan masing-masing memiliki tujuan-tujuan tertentu.

China fokus menjalankan proses *peaceful rise* nya sehingga alam waktu kurang dari 30 tahun China mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan

¹³⁹Barry Buzan dan Ole Weaver, *ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm 13.

¹⁴²*Ibid.*

bahkan menjadi yang nomor satu di dunia. China dengan penduduk terbanyak, anggaran belanja militer terbesar dan pertumbuhan ekonomi tertinggi semakin memantapkan kekuatannya.

3.2. Definisi *Power*, *Superpower*, *Great Power* dan Elemen yang Membangunnya

Konsep *power* dalam hubungan internasional merupakan unsur yang sangat penting¹⁴³. Perdebatan lebih lanjut mengenai konsep *power* adalah tentang aktor pemilik *power* yang dapat mengontrol pihak lain untuk melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan. Lewat sistem internasional, suatu negara mempengaruhi aktor-aktor lain di dalam sistem tersebut untuk berperilaku atau mengambil keputusan yang mendukung pencapaian tujuannya.

Pengertian *power* dalam politik internasional dirumuskan oleh beberapa pemikir. Suatu negara yang memiliki *power*, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik internasional, demikian sebaliknya kondisi politik internasional dapat mengubah distribusi *power* dan menjadikan suatu negara memiliki *power* yang lebih besar dibandingkan negara lain.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *power* adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebelum melanjutkan lebih jauh, dalam tesis ini peneliti akan menjelaskan beberapa definisi yang mendasar. Yang pertama adalah negara. Menurut North dan Thomas, 1973, negara adalah organisasi yang menyediakan perlindungan dan kemakmuran. Negara merupakan mekanisme terpenting untuk masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka¹⁴⁴.

Warga negara mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara. Negara bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan dan segala konflik yang terjadi baik dengan negara lain maupun konflik internal. Dalam hal ini, negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan dilihat sebagai objek yang mempertahankan wilayahnya untuk tujuan-tujuan tertentu seperti melindungi hak

¹⁴³ Barnett, Michael & Duvall, Raymond "Power in International Politics" hal, 39

¹⁴⁴ Gilpin, Robert "War and Change in World Politics" (Cambridge: Princeton University, 2009) hal.16

teritorial untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang ada di wilayah tersebut, melindungi hak warga negaranya yang berada di wilayah tersebut seperti para penangkap ikan di wilayah sengketa yang kerap ditangkap oleh negara pengklaim yang lain, dan mempertahankan tersebut untuk mencapai kemakmuran negara yang lebih baik.

Masyarakat sebagai individu maupun kumpulan masyarakat menjadi bagian dari negara yang kemudian memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan. Dalam berhubungan dengan negara lain, suatu negara tentunya memiliki tujuan dan kepentingan. Negara menjadi aktor yang memiliki otoritas untuk memenuhi kepentingan warga negara dan negaranya dalam sistem internasional. Dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain, suatu negara menyusun politik luar negeri yang akan menjadi panduan dalam membangun kerjasama atau kesepakatan dengan negara lain untuk mendapatkan tujuannya.

Terdapat tiga tujuan utama negara. Berdasarkan sejarah, salah satu tujuan negara adalah menaklukkan wilayah teritorial untuk tujuan kemajuan ekonomi, keamanan dan tujuan-tujuan lain baik melalui penjajahan dengan mengalahkan suatu bangsa maupun dengan cara merampas suatu wilayah. Bukti sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di dunia berusaha untuk memperluas kontrol mereka dalam sistem internasional¹⁴⁵.

Pasca revolusi industri imperialisme mewarnai politik internasional yang dilakukan oleh beberapa negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya sehingga dapat memperluas akses terhadap sumber daya-sumber daya yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Imperialisme dan kolonialisme berawal di era ini. Pendudukan suatu negara terhadap negara lain untuk tujuan sumberdaya terjadi di hampir seluruh dunia. Negara dari Eropa menguasai negara-negara di Asia, Afrika maupun di benua Eropa sendiri.

Pendudukan terhadap negara lain dilakukan dengan *power*. Semakin besar *power* suatu negara maka semakin besar kemampuannya untuk mengalahkan pihak lain. Sebaliknya, *Power* juga akan meningkat bila suatu negara berhasil mengalahkan pihak lain. Dalam peperangan misalnya, pihak yang menang akan menjadi pemilik *power* terbesar.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Power dihasilkan melalui hubungan sosial antar pihak yang dibentuk berdasarkan kapasitas setiap aktor di dalamnya. *Power* yang dimiliki aktor dalam suatu interaksi dapat menggambarkan kondisi interaksi dan hubungan sosial yang terjadi dalam suatu institusi serta jenis institusi tersebut.¹⁴⁶

Joseph Nye membagi *power* menjadi *soft power* dan *hard power*. *Soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk mengarahkan pihak lain menginginkan hal yang sama dengan tujuan negara tersebut tanpa tekanan. Bila satu negara sudah berhasil membuat pihak lain menginginkan hal yang sama dengan tujuannya, maka akan lebih sedikit pengorbanan yang harus diberikan negara tersebut dalam mencapai tujuannya. *Soft power* didapatkan satu negara sebagai hasil dari budaya yang kuat dan atraktif, kondisi politik yang ideal, serta kebijakan-kebijakan yang dianggap sah dan ideal. Sedangkan *hard power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu. *Power* ini didapatkan oleh negara paling utama dari kapabilitas militernya namun ada juga yang mendapatkannya karena kapabilitas ekonomi¹⁴⁷.

Cara yang paling efektif dalam meningkatkan kemakmuran dan *power* adalah dengan cara meningkatkan dan memperluas kekuasaan teritorial dan menaklukkan bangsa lain. Tujuan berikutnya ada meningkatkan pengaruh negara dalam mengarahkan sikap negara lain dengan menggunakan ancaman, kekerasan, membentuk aliansi, membentuk suatu hal yang eksklusif dan menjadi kekuatan dalam mempengaruhi pihak lain. Untuk mendapatkan tujuan politik, ekonomi dan idealisme, negara akan berusaha membangun sistem internasional yang kondusif dan yang hukum-hukum serta peraturannya mendukung negara untuk mencapai tujuan dan mendapatkan kepentingannya¹⁴⁸.

Tujuan negara yang ketiga adalah meningkatkan peranan pentingnya dalam dunia internasional yang modern sehingga dapat mengontrol perekonomian dunia. Tujuan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan sebelumnya. Suatu negara

¹⁴⁶ Michael dan Raymond Duwall, "*Power in International Politics*" diakses dari <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=278382> pada 12 Juni 2012 pukul 23.12 WIB

¹⁴⁷ Nye, S. Junior "*Soft Power and American Foreign Policy*" dalam *Political Science Quarterly* Volume 119 Number 2 (2004) hlm. 255-70 .

¹⁴⁸ Robert Gilpin, "*War and Change in World Politics*" (Cambridge: Princeton University, 2009) hlm 24.

akan dapat menguasai perekonomian dunia jika negara tersebut telah terlebih dahulu menguasai wilayah teritorial serta mengarahkan sikap negara lain untuk mendukung tujuannya¹⁴⁹.

Power dapat meningkatkan kemakmuran, sebaliknya kemakmuran akan meningkatkan *power* suatu negara. Pentingnya penguasaan wilayah teritorial menjadi salah satu alasan China bertahan di Laut China Selatan. Jika China mampu mempertahankan wilayah Laut China Selatan hal tersebut akan menjadi kebanggaan bagi China serta menjadi salah satu faktor yang memperkuat negara tersebut. Dengan menjadi pemilik kedaulatan di Laut China Selatan maka China menjadi pemilik hak atas segala sumber daya yang ada di wilayah tersebut. China juga akan menjadi negara yang lebih disegani di dunia internasional karena berhasil mengalahkan negara-negara pengklaim lainnya sehingga hal tersebut membentuk citra China sebagai negara yang lebih kuat. Kemenangan China tersebut akan digunakan negara-negara lain yang juga terlibat sengketa wilayah dengan China sebagai precedent sikap China atas suatu sengketa wilayah.

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan dunia yang paling penting. Daerah pesisir kepulauan tersebut memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk kemajuan suatu negara. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan negara-negara di sekitarnya memperjuangkan kedaulatan disamping alasan keamanan negara di daerah perbatasan. Jika China berhasil menjadikan dirinya sebagai satu-satunya yang berdaulat di Laut China Selatan maka China berhasil mengalahkan UNCLOS yang merupakan konvensi internasional. Kekuatan China akan semakin terbukti. China akan mendapat pengakuan atas kekuatannya terlebih akan menahan negara-negara lain dalam berhubungan dengan China. Dengan kata lain, kemenangan China di Laut China Selatan akan menjadi dasar kemenangan lain di masa yang akan datang.

3.2.1 Superpower

Konsep *superpower* diperlukan dalam mendefinisikan sistem polarisasi *power*. Akan tetapi klasifikasi *superpower* sendiri bukanlah hal mudah untuk

¹⁴⁹ *Ibid.*

ditentukan. *Superpower* memerlukan kombinasi antara kapabilitas material¹⁵⁰ (Waltz 1979: 131), dan pengakuan resmi dari negara-negara lain (Bull 1977: 200–2). Pergerakan *power* ditingkat global. Dalam tingkat global mencerminkan *balance of power* tidak hanya diantara *superpower-superpower* yang ada tetapi juga harus memperhitungkan posisi *great power-great power* yang ada karena adanya kemungkinan koalisi yang terjadi antara *great power*¹⁵¹.

Definisi *superpower* diberikan oleh Kegley and Raymond's (1994: 54, 88, 232) yang menyatakan bahwa idenfitifikasi *superpower* ditekankan pada persamaan kapabilitas yang sulit untuk disamakan dan digunakan untuk setiap situasi dalam satu abad terakhir dan juga di masa yang akan datang. Jumlah dan lokasi negara-negara yang berada dalam sistem yang akibat terjadinya dekolonisasi membutuhkan elaborasi yang lebih tentang perbedaan *major power*. Sistem dunia yang mengglobal membedakan antara *superpower* yang menjadi aktor utama dalam regional dari *superpower* yang memiliki peran utama dalam mengoperasikan seluruh sistem, yaitu sistem internasional atau setidaknya sebagian besar dari sistem internasional (*superpower*)¹⁵².

Sebelum 1945, Inggris dan Amerika Serikat dapat dengan jelas dinyatakan sebagai dua *superpower* sedangkan Jepang, Italia, dan Austria-Hungaria (sebelum 1918) diklasifikasikan sebagai '*ordinary*' *superpower* yang masih memiliki banyak kekurangan untuk diperhitungkan di level global. Kerancuan atas kapabilitas *superpower* kemudian diperjelas oleh Lake's (1997: 64) dengan menyatakan bahwa *superpower* memiliki kapabilitas militer yang dapat menjangkau dunia. Kemampuan militernya dapat membangun militer dunia karena itu *superpower* menjadi mampu untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang menyebar ke wilayah lain dan dapat menyesuaikannya dengan kepentingan negaranya.

Mendefinisikan *superpower* dari segi kapabilitas untuk mengambil peran utama dalam politik internasional dengan tetap memegang prinsip menghargai isu-isu keamanan akan menghasilkan daftar berikut ini : Amerika Serikat, Jerman,

¹⁵⁰ Kapabilitas material yang dapat diukur seperti kapabilitas ekonomi dan militer

¹⁵¹ Barry Buzan dan Ole Weaver, "*Regions and Power: The Structure of International Security*" (New York: Cambridge University Press, 2003) hlm. 16-20.

¹⁵² *Ibid.*

Inggris, Prancis, China dan Jepang¹⁵³. Akan tetapi terdapat beberapa teori yang berbeda bahkan pendapat yang bertentangan tentang penentuan kriteria *superpower* serta negara mana saja yang dikategorikan sebagai *superpower*.

Permasalahan dalam penentuan *superpower* diselesaikan dengan membuat daftar *superpower* dunia dari tahun 1914 : Austria-Hungary, Britain, France, Germany, Italy, Japan, Ottoman Empire, Russia, USA: tidak ada perbedaan dan peran maupun kapabilitas antara sepuluh kekuatan besar tersebut.

Keberadaan EU dapat dinilai dari bagaimana pihak lain menilainya. Jika negara-negara lain memperlakukan EU sebagai *superpower* maka EU akan menentukan kualifikasinya sendiri tanpa lagi perlu mempertimbangkan ambiguitas di atas¹⁵⁴. Bahwa *superpower* dalam polarisasi hanya dapat berupa negara. Pendapat Waltz ini bertujuan untuk menghilangkan kebingungan yang timbul akibat kerancuan dalam hal mengidentifikasi polarisasi sistem yang menyertakan aliansi sebagai *superpower*. Karena itu, tahun 1941 dinyatakan sebagai multipolar dalam hal *power*, akan tetapi bipolar dalam hal koalisi. Namun pendapat Waltz menjadi sulit diterapkan melihat kesatuan EU saat ini yang juga menyamakan standar militer, ekonomi, dangat kuat dan sangat solid. Sulit untuk tidak memperhitungkan mereka sebagai satu kesatuan *superpower* yang bisa menjadi pesaing terdekat *superpower*.

Definisi *superpower*, *great power* dan *regional power* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah definisi yang disampaikan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver yang merupakan rangkuman dan kesimpulan dari beberapa teori *power* sebelumnya. *Power* dapat dibagi kedalam tiga level yaitu: *superpower* dan *great power* dalam sistem internasional serta *regional power* di tingkat regional. Kriteria *superpower* adalah memiliki kapabilitas yang luas yang dapat menjangkau seluruh sistem internasional. *Superpower* harus memiliki kapabilitas militer dan politik kelas satu yang diukur pada waktu berjalan serta memiliki kapabilitas ekonomi yang dapat mendukung militer dan ekonominya. *Superpower* juga harus mampu menjangkau militer dan politik global dan diterima oleh pihak-pihak lain dari sikap sebagai *superpower*.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

Great power diperhitungkan sebagai bagian dari *major power* yang lain jika *superpower* tersebut memiliki sistem ekonomi, militer dan potensial yang potensial untuk menyaingi *superpower* dalam jangka waktu dekat atau menengah. Faktor ini dapat diobservasi dari hubungan luar negeri dan diskursus yang dibangun oleh *power* lain. artinya bahwa kepemilikan material dan atribut sebagai legitimasi lebih sedikit diperlukan oleh *superpower* dibandingkan dengan *superpower*. *Superpower* biasanya memiliki kapabilitas tertentu, meskipun China menunjukkan kemampuannya yang sangat berkesan selama satu abad. China akan menganggap dirinya lebih dari *regional power* dan bahkan akan menjadi calon *superpower*. Jepang merupakan contoh negara yang dianggap negar alain sebagai *potential superpower* akan tetapi Jepang memiliki kapabilitas yang tidak seimbang dan tidak berpikir bahwa dirinya sebagai *potential superpower*. Bahkan pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an, Jepang dianggap sebagai kekuatan yang besar yang menjadi pesaing utama Amerika Serikat, terutama dinilai oleh Amerika Serikat sendiri sebagai pesaingnya terutama dengan kemajuan perekonomian Jepang (Huntington 1991: 8; 1993; Layne 1993: 42–3, 51; Waltz 1993a: 55–70; Spruyt 1998).

Superpower biasanya memiliki pengaruh di lebih dari satu wilayah dan memiliki kapabilitas membatasi operasi militer global. Selama akhir abad-19, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang memiliki kemampuan tersebut. Setelah Perang Dunia I masih dipegang oleh Jerman dan Jepang dan Prancis menjadi *superpower* yang mengalami kemunduran selama Perang Dingin *superpower* dimiliki oleh China, Jerman dan Jepang dengan Inggris dan Prancis yang berada pada posisi dipertanyakan akan level *powernya*. Hal yang kemudian menjadi sulit adalah menempatkan Uni Eropa yang pada waktu tersebut merupakan kumpulan aktor-aktor berkualitas dalam sistem internasional dan pada tahun 1970-an dipertimbangkan sebagai *superpower* yang muncul¹⁵⁵.

Sebagai aliansi negara-negara *superpower* kekuatan kawasan ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Setelah Perang Dingin dipegang oleh Inggris-Prancis-Jerman-EU, Jepang, China dan Rusia sedangkan India dipertimbangkan

¹⁵⁵Robert Gilpin, “*War and Change in World Politics*” (Cambridge: Princeton University, 2009) hlm 29-49.

sebagai aktor baru yang dengan upaya sangat keras berusaha memasuki sistem akan tetapi dari kapabilitas dan pengakuan serta kalkulasi terhadap kualifikasi yang dimilikinya, masih belum sebanding dengan *superpower* yang lainnya.

Justifikasi yang digunakan untuk menetapkan keempat *great power* Perang Dingin tersebut sebagai empat *superpower* dalam sistem internasional adalah sebagai berikut¹⁵⁶:

Rusia memiliki kualifikasi sebagai *declining superpower* sedangkan China, EU, dan Jepang memiliki kualifikasi untuk menjadi pesaing Mesaing Amerika atau menjadi *potential superpower* (Calleo 1999; Kapstein 1999; Mastanduno and Kapstein 1999; Wilkinson 1999; Waltz 2000b). China kini merupakan *potential superpower* (Roy 1994; Ross 1999: 83–4, 92–4, 97; Wilkinson 1999: 160–3), dan menjadi satu-sastunya pesaing terdekat Amerika (Zhang 1998). Penilaian terhadap status EU sering kali menimbulkan permasalahan ketiadaan negara dalam subjek tersebut (Galtung 1973; Buchan 1993; Walton 1997; Hodge 1998–9; Wohlforth 1999: 31; Waltz 1993a: 54; 2000b: 30–2; Wilkinson 1999: 157–60; Walker 2000). EU dipastikan memiliki kapabilitas untuk dihitung sebagai pesaing *superpower* dan bisa mendapatkan pengakuan dengan mudah sebagai *superpower* akan tetapi secara politik keberadaan EU yang bukan merupakan negara menjadi kelemahan.

3.2.2 Great Power

Superpower dan *great power* sama-sama menentukan polarisasi di tingkat global dan hubungan antara pihak-pihak yang ada dalam polar yang berbeda, sedangkan *regional power* mempengaruhi keamanan di tingkat regional. Wilkinson (1999: 141–5) menghilangkan perbedaan antara *superpower* dan *regional power* dengan mengidentifikasikan Prancis, Inggris, Rusia dan China sebagai *superpower* di tingkat regional. Wilkinson tidak melakukan penelitian untuk mendefinisikan kriteria yang diikutsertakan dan tidak diikutsertakan dalam kategori yang dinyatakannya.

Perbedaan yang konvensional antara *great power* dan *middle power* tidak akan dapat diterapkan dalam sistem internasional dimana hanya terdapat sedikit

¹⁵⁶ *Ibid.*

sekali yang dapat diperhitungkan di tingkat internasional namun banyak negara-negara yang mempunyai pengaruh terhadap negara-negara di sekitarnya. Dengan kata lain, *great power* didefinisikan lebih tinggi dari *regional power* yang hanya memiliki kapabilitas menjangkau regional akan tetapi *great power* tidak memiliki semua kapabilitas seperti *superpower*.

Superpower harus menjadi pemain aktif yang inisiatif dalam proses sekuritisasi maupun desekuritisasi di semua atau di hampir semua regional di dunia baik sebagai *threat*, *guarantor*, aliansi maupun sebagai *intervener*. *Superpower* juga menjadi sumber dari *value-value* yang berlaku universal untuk mendukung terbentuknya masyarakat internasional. Legitimasi suatu negara sebagai *superpower* tergantung keberhasilan negara tersebut dalam menciptakan *value* yang demikian.

Negara yang pernah berada di posisi *superpower* selama sejak abad-19 adalah Inggris, Prancis, dan Rusia. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, legitimasi sebagai *superpower* dimiliki oleh Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet dan setelah Perang Dingin dimiliki hanya oleh Amerika Serikat. Berbeda dengan *superpower*, *great power* memiliki kriteria dibawah *superpower*. Sebagai *superpower* suatu negara tidak harus memiliki kapabilitas yang besar di semua bidang dan tidak harus menjadi pelaku utama sekuritisasi maupun desekuritisasi seperti yang harus dilakukan oleh *superpower*.

Pada umumnya, legitimasi menjadi *superpower* bergantung pada satu hal, perbedaan yang dimiliki *superpower* dibanding pemilik *power* yang dominan di tingkat regional, yaitu mengendalikan akumulasi *power* masa kini dan *power* dimasa yang akan datang berdasarkan tanggung jawab untuk melakukan kalkulasi *power* masa kini dan masa yang akan datang didalam sistem dalam sistem yang dimiliki dan *power* yang dimiliki dimasa yang akan datang.

3.3 Kekuatan dan Dominasi China di Laut China Selatan

Pasca Perang Dingin, geopolitik masih menjadi penyebab utama konflik antar bangsa. Ewan W. Anderson menyatakan bahwa perbatasan wilayah mengindikasikan intergritas teritorial yang memperluas kontrol pemerintah. Dalam kebanyakan kasus wilayah perbatasan, yang terjadi adalah perjuangan akan

keabsahan secara hukum oleh suatu negara maupun oleh komunitas internasional. Hanya sedikit yang merupakan dampak dari perubahan geopolitik global. Paling tidak ada ¼ bagian wilayah perbatasan di dunia yang diklasifikasikan sebagai wilayah yang tidak stabil. Dua pertiga merupakan perbatasan maritim yang masih harus diperjelas dan disepakati. Perubahan geopolitik global ini disebut sebagai dampak pembubaran Uni Soviet telah memberikan *regional power* kebebasan untuk memperoleh klaim historis maupun teritorial¹⁵⁷.

Dari waktu ke waktu, kepentingan aktor-aktor dalam sistem internasional berubah. Demikian juga dengan distribusi kekuatan antara aktor-aktor sebagai dampak dari perubahan ekonomi, teknologi dan perubahan di sektor lainnya. Konsekuensi yang kemudian terjadi dari sebuah perubahan adalah adanya satu pihak yang lebih diuntungkan sedangkan pihak lain lebih dirugikan. Pihak yang memperoleh keuntungan dari perubahan yang terjadi akan berusaha mengarahkan sistem internasional untuk memenuhi kepentingannya. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya perubahan distribusi kekuasaan¹⁵⁸.

Dari sisi kepentingan yang diperoleh suatu aktor lewat sistem internasional, maka sistem internasional dapat dikatakan sebagai sistem yang digunakan oleh aktor-aktor didalamnya sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Akan tetapi tidak setiap aktor bisa mendapatkan kepentingan atau tujuannya sebesar yang diinginkannya. Dengan demikian akan terbentuk aktor-aktor yang dominan dalam sistem internasional. Dominasi tersebut didapatkan dengan kemampuan tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan tertentu pula.

Kapabilitas ekonomi menjadikan China sebagai salah satu faktor yang dominan. Perubahan dalam sistem ekonomi mengantarkan China pada perubahan distribusi kekuasaan yang baru dalam sistem internasional. Kebangkitan ekonomi China sebagai aktor ekonomi yang kuat bahkan menjadi debitur terbesar dunia membuka kesempatan bagi China untuk mendapatkan porsi *power* yang lebih dalam sistem internasional. Kekuatan dominan yang sebelumnya menjadi milik

¹⁵⁷ Rowan P. Joshua, "The U.S-Japan Security Alliance, And The South China Sea Dispute" dalam *Asian Survey*, Vol. 45, No 3 (May/June 2005) hlm 441-436.

¹⁵⁸ Robert Gilpin, *op cit*, hlm 210-215.

Amerika kemudian harus dibagi kepada China yang menjadi kekuatan ekonomi dunia yang terbesar.

Pasca Perang Dunia II, perang yang terjadi memang bukan lagi perang fisik yang terjadi antar negara. Saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain cenderung mengarahkan negara-negara di dunia kepada persaingan yang lebih terselubung. Sektor yang menjadi sektor utama yang menjadi wadah persaingan negara-negara adalah sektor ekonomi. Selain menjadi sektor yang sangat penting bagi dunia, sektor ini membangun saling ketergantungan antar aktor di dalamnya. Meskipun terjadi dengan damai, persaingan dalam sektor ekonomi sangat mempengaruhi distribusi kekuatan. Penyebabnya adalah karena sektor ekonomi menjadi dasar bagi suatu negara untuk menjalankan roda-roda sektor lain. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kondisi ekonominya dan yang pasti, sektor keamanan suatu negara tidak akan dapat dipisahkan dari sektor ekonomi. Persenjataan dan sistem keamanan suatu negara juga ditentukan kondisi ekonomi negaranya.

Amerika adalah negara yang dikenal sangat unilateralis. Tentu, sikap tersebut dipicu oleh kemampuan Amerika yang memang mutlak dibandingkan dengan negara lain. Keyakinan bahwa tidak ada pihak lain yang lebih berkuasa untuk menghalangi dan mengalahkan diambilnya tindakan tersebut merupakan pendorong suatu negara menjadi unilateralis. Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar yang mendapat serangan terorisme pada 11 September 2001 melakukan serangan balik terhadap Afghanistan dan Irak yang oleh Amerika dinyatakan sebagai tindakan *preemptive*. Meskipun serangan Amerika terhadap Irak mendapat kontra dari sebagian warga Amerika dan juga beberapa negara di dunia, Amerika tetap menjalankan serangan. Setelah kedua serangan tersebut, muncul kekuatiran masyarakat dunia bahwa sifat Amerika telah berubah menjadi hegemon yang “keras” (*coercive hegemon*) dari yang semula sebagai hegemon yang “ramah” (*benign hegemon*).

Tatanan dunia internasional (*world order*) kerap mengalami perubahan setelah terjadi suatu momen yang dramatis. Setelah Perang Dunia II berakhir, Perang Dingin dimulai. Ketika Tembok Berlin runtuh pada 1989, Perang Dingin dinilai telah berakhir oleh masyarakat dunia dan menjadi lahirnya era Pasca

Universitas Indonesia

Perang Dingin. Lalu kemudian runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di New York tanggal 11 September akibat serangan teroris dilihat sebagai momen yang menjadi akhir era pasca Perang Dingin¹⁵⁹ dan menjadi awal Perang Terhadap Terorisme yang memberikan implikasi fundamental terhadap situasi dan percaturan politik internasional.

Masa tersebut menjadi awal terjadinya perubahan dalam sistem politik dunia menyusul tekanan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain untuk menentukan sikap apakah akan mendukung tindakan Amerika atau mendukung terorisme lewat pernyataan Presiden Bush “*Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us , or you are with the terrorist*”. Amerika menunjukkan sikap unilateral yang sangat tegas dengan menempatkan ancaman terorisme sebagai agenda bersama dan kepentingan bersama masyarakat internasional dalam bentuk sistem internasional¹⁶⁰.

Meskipun mendapat pertentangan dari para asisten kepresidenan yang meyakini bahwa peperangan terhadap terorisme memerlukan kerjasama multilateral aksi-aksi serangan yang diklaim sebagai aksi *preemptive* oleh Amerika Serikat tetap dilancarkan.

Isu-isu baru yang merupakan agenda internasional seperti demokrasi, lingkungan hidup, kejahatan transnasional dan masalah terorisme internasional dapat memicu negara-negara besar menjadi lebih unilateral dalam hubungannya dengan negara-negara yang lebih kecil. Contoh diatas telah menunjukkan bahwa isu terorisme internasional menjadikan Amerika Serikat menjadi lebih unilateral. Demikian juga isu lingkungan yang menempatkan *major powers* sebagai negara penghasil emisi tidak bersedia menurunkan kadar emisinya. Sebaliknya, negara-negara berkembang yang harus melakukan penghijauan sebagai kompensasi penggunaan emisi mereka.

Francis Fukuyama dalam bukunya berjudul *The End of History and the Last Man* bahkan berpendapat bahwa umat manusia mengikuiti pola kehidupan dan sistem politik Amerika. Sikap unilateral Amerika menghendaki dunia menerima kebijakan-kebijakan dan wacana-wacana yang diciptakan negara

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Robert Gilpin, *op cit.*

superpower tersebut¹⁶¹. Akan tetapi tidak demikian kenyatannya. Kebangkitan China sebagai kekuatan utama di Asia Pasifik merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Jika China mengalami pertumbuhan yang konstan baik dalam kapabilitas ekonomi dan ditransfer menjadi kekuatan militer, maka *power gap* antara Amerika dan China akan semakin mengecil sehingga ada kemungkinan bahwa China akan menyaingi Amerika. Saat ini, China sudah mulai menunjukkan dominasinya sebagai transfer dari kepemilikan *power* yang besar.

Sebagai pemilik *power* yang semakin besar, China pun menunjukkan sikap sepihaknya. China menyatakan dengan tegas bahwa sengketa di Laut China Selatan tidak dapat dicampuri oleh negara lain yang tidak terlibat secara langsung dengan konflik. China mengajukan klaim bahwa seluruh wilayah Laut China Selatan berada dalam kedaulatan China, padahal UNCLOS sudah menetapkan batas wilayah tersebut dan dengan demikian menyatakan Malaysia dan Filipina sebagai berdaulat atas wilayah sejauh yang ditentukan dalam ketentuan yaitu sejauh 200mil sebagai daerah ZEE nya.

Klaim china merupakan bukti bahwa China menganggap dirinya sebagai *potential superpower* sehingga ketika Amerika sebagai *superpower* mencoba menjadi aliansi Filipina, China menanggapi dengan memosisikan dirinya sebagai lawan yang sebanding. Pada umumnya, *superpower* akan muncul dalam hirarki internasional *power* dan ini menjadi cara China untuk hadir dalam hirarki internasional *power*.

Dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan China, terlihat bahwa negara ini tidak bersedia untuk bernegosiasi dalam sengketa Laut China Selatan. China menyatakan bahwa China hanya terbuka untuk negosiasi bilateral. Namun, negosiasi bilateral yang sudah pernah disepakati pun tidak menunjukkan bahwa China benar-benar terbuka untuk negosiasi. Berikut beberapa pernyataan sikap China dalam hal sengketa Laut China Selatan.

3.3.1 Kapabilitas Militer China

Salah satu pilar pembangun hegemoni Amerika adalah kekuatan militernya. Perdebatan yang banyak terjadi adalah membahas belanja militer

¹⁶¹ *Ibid.*

Amerika pasca Perang Dingin yang hampir melebihi belanja militer seluruh negara di dunia¹⁶². Kemampuan militer Amerika menjadi alasan negara tersebut menjadi pemegang komando terhadap dunia global. *Command of the common*, yang adalah komando pada keseluruhan dunia dianalogikan dengan komando laut, yang oleh Paul Kennedy dinyatakan sebagai “*naval master*”¹⁶³. Konsep *command of the commons* inilah yang membuat kekuatan militer Amerika mampu menempati posisi sebagai pemilik kekuatan dunia tertinggi. China pun meyakini bahwa kekuatan militer berkontribusi sangat besar untuk membangun *power*. *Power* yang dimiliki China menjadi semakin kuat sebab China memiliki kemampuan untuk mentransfer kapabilitas ekonominya menjadi kapabilitas militer. Namun demikian, China masih memiliki kendala-kendala untuk menjadi *superpower*, yaitu masalah internalnya.

Mengikuti peningkatan ekonominya, China juga membenahi aspek militernya. Peningkatan anggaran belanja pertahanan yang sangat pesat dalam 15 tahun terakhir memungkinkan China untuk melakukan modernisasi militer yang signifikan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki kekuatan yang sebanding, belanja pertahanan China akan membawa negara tersebut menjadi negara yang jauh lebih kuat. Kapabilitas dibidang militer dan pertahanan inilah salah satu alasan yang mendorong China untuk bersikap unilateralis. Dari tahun 2001 hingga 2011 China mencatat peningkatan belanja militer.

Kebijakan Pertahanan China merupakan kebijakan yang pada dasarnya defensif. China menempatkan kedaulatan negara, keamanan, kesatuan wilayah teritorial, perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya serta kepentingan warga negaranya diatas semua isu¹⁶⁴. Menganalisis kebijakan pertahanan tersebut, konflik Laut China Selatan yang merupakan isu terkait dengan kesatuan wilayah teritorial maka China akan memberlakukan prioritas yang tinggi terhadap kawasan ini, termasuk upaya-upaya militer. China berusaha membangun dasar pertahanan

¹⁶² Dresdner Arbeitspapiere International Bezeihungen (DAP): “The Military Foundation of U.S Hegemony” document: section 5

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Diakses dari <http://eng.mod.gov.cn/Database/DefensePolicy/index.htm> pada 29 Mei 2012 pukul 11.32 WIB

yang kuat lewat modernisasi militer yang sesuai untuk tujuan nasionalnya¹⁶⁵:
“...China endeavors to build a fortified national defense and strong military forces compatible with national security and development interests, and enrich the country and strengthen the military while building a moderately prosperous society in all aspects...”

Bila modernisasi militer China dilakukan untuk sesuai dengan tujuan nasional negara tersebut, maka China sedang berusaha untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang besar karena anggaran pertahanan China selama satu dekade terakhir naik drastis.

Tabel 2.4: Belanja Militer China 2001-2011¹⁶⁶

Tahun	Belanja Militer (USD)
2001	41176
2002	47829
2003	51955
2004	57542
2005	64726
2006	76065
2007	87730
2008	96663
2009	116666
2010	121064
2011	129272

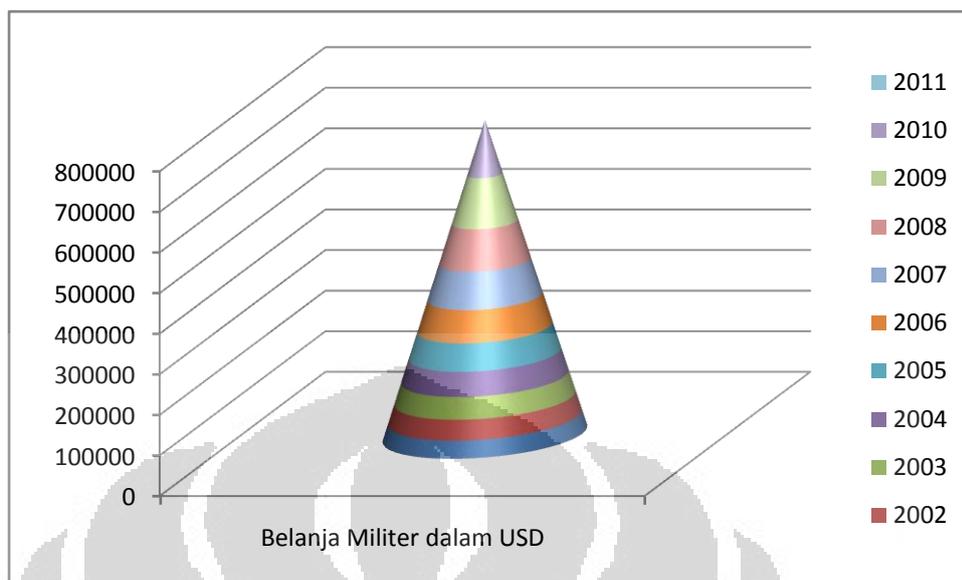
Jika digambarkan, tabel diatas akan seperti gambar berikut¹⁶⁷:

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ SIPRI, Military expenditure by country, in constant (2010) US\$ m., 2001-2011

¹⁶⁷ Diperoleh dari data SIPRI

Gambar: 3.2 Peningkatan Belanja Militer China dalam 10 tahun terakhir

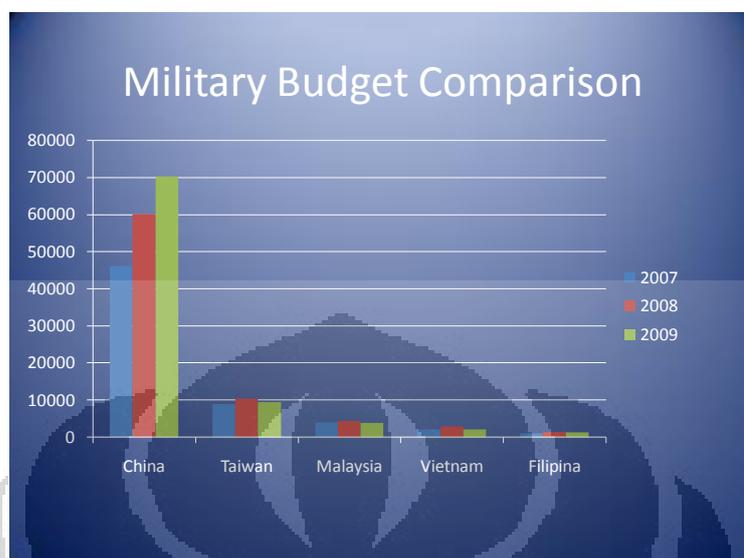


Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), belanja militer China meningkat rata-rata hingga 12,5% periode 2001-2010 yang mencapai angka milyar dolar Amerika. Peningkatan belanja militer China yang terjadi satu dekade terakhir menjadi perhatian seluruh dunia. China meningkatkan pertahanan dan pengambilan-pengambilan keputusannya adalah berkaitan dengan isu Laut China Selatan¹⁶⁸.

Dibandingkan dengan negara-negara yang juga mengajukan klaim di Laut China Selatan, belanja militer China mutlak lebih besar, bahkan jika anggaran belanja keempat negara lain dijumlahkan, total keseluruhan biaya tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan belanja militer China. Peneliti menggambarkan anggaran belanja militer kelima negara dalam kurun waktu 2007-2009 berdasarkan data yang diolah peneliti dengan menggunakan data SIPRI.

¹⁶⁸ Richard Rousseau, "South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon"
Diakses dari <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/> pada 12 Juni 2012 pukul 17. 45 WIB

Gambar 3.3 Perbandingan belanja militer negara-negara yang bersengketa diolah dari data SIPRI



3.3.2 Kapabilitas Ekonomi China

Sumber kekuatan Amerika yang berikutnya yang menjadikan negara ini menjadi global hegemon adalah sumber daya ekonominya. Menurut Central Intelligences Agency, Amerika menghasilkan 23% dari gross world product (GWP). Jumlah ini mencapai hampir 2 kali jumlah GWP yang dihasilkan dua negara lain yang juga dinyatakan besar dari aspek ekonomi yaitu Jepang yang GWP nya mencapai 7% dan China yang GWP nya mencapai 10%¹⁶⁹.

Kondisi perekonomian tidak terpisahkan dari kapabilitas militer. Modernisasi mliter dapat dijalankan dengan pembiayaan yang besar. Tanpa kapabilitas ekonomi yang baik, China akan sulit melakukan modernisasi persenjataan seperti yang dilakukannya saat ini. Ekonomi yang kuat tidak hanya berkorelasi dengan modernisasi persenjataan akan tetapi juga berpengaruh pada diplomasi politik dan ekonomi. China yang menjadi pemegang surat hutang terbesar di dunia memiliki kekuatan negosiasi dengan negara-negara yang mengeluarkan surat hutang. Amerika menjadi lebih berhati-hati terhadap China setelah Amerika menyerahkan surat hutangnya kepada Amerika.

¹⁶⁹Dresdner Arbeitspapiere International Beziehungen (DAP): "The Military Foundation of U.S Hegemony" document: section 5

Kekuatan ekonomi disadari China menjadi komponen dasar untuk menjadi negara yang kuat. Karena itu, China berfokus pada pengembangan ekonomi yang salah satu penunjangnya adalah sumber daya manusia. Sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia China melakukan industrialisasi yang sangat pesat dan menjadi importir terbesar di dunia. Perekonomian China berkembang sangat pesat terutama sejak tahun 1978, ketika China menerapkan *'open door policy'* yang membuka diri pada perdagangan dan investasi asing. Perusahaan-perusahaan bergerak baik keluar maupun masuk. Dengan berjalannya mekanisme pasar, pertumbuhan ekonomi China mencapai rata-rata 9-10% setelah penerapan kebijakan tersebut¹⁷⁰.

Perubahan orientasi China yang semula sangat tertutup kemudian menjadi negara yang terbuka dan menerapkan mekanisme pasar mengantarkan China menjadi negara exportir terbesar tahun 2010. Reformasi ekonomi China diawali dengan mengintegrasikan sektor pertanian lalu meningkat dengan menerapkan liberalisasi harga, desentralisasi fiskal, mengembangkan otonomi perusahaan-perusahaan swasta, menciptakan sistem perbankan yang bervariasi, mengembangkan pasar saham, pertumbuhan yang cepat pada sektor-sektor swasta, dan pembukaan diri kepada perdagangan dan investasi luar negeri¹⁷¹.

Reformasi ekonomi China membawa perubahan yang sangat besar dalam kurun waktu 30 tahun. China yang sebelumnya sangat tertutup dengan dunia luar mengubah strategi ekonominya ditengah perkembangan ekonomi global yang berjalan sangat liberal. Reformasi ekonomi tersebut juga merupakan bagian dari proses demokrasi di China. Sektor swasta diberikan ruang dan kesempatan untuk menjalankan bisnis mereka tanpa harus berada sepenuhnya dibawah pengawasan negara.

Dengan pertimbangan pada kondisi ketahanan ekonomi, China melakukan reformasi pada perusahaan-perusahaan pemerintah untuk dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan menciptakan daya saing global yang tinggi¹⁷².

¹⁷⁰ Haiyyu Moenir Darman, "Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi ASEAN: Studi Kasus 200-2008) Tesis Universitas Indonesia, 2010

¹⁷¹ Diakses dari CIA Factbook: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> Pada 06 Juni 2012 pukul 15.33 WIB

¹⁷² *Ibid.*

Salah satu yang menjadi daya saing China dalam hal ekspor adalah upah tenaga kerja yang murah. China sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia menerapkan upah yang rendah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya memang tidak terbatas. Pasar tenaga kerja di China memungkinkan para produsen untuk mempekerjakan buruh murah. Dengan demikian biaya produksi barang China jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang diproduksi di negara lain.

Daya saing lainnya adalah nilai mata uangnya yang rendah. Alasan ini tentu menjadi dasar yang sangat kuat bagi negara importir dalam membeli suatu barang. Selama bertahun-tahun, China menjaga mata uangnya agar tetap berdekatan dengan mata uang Amerika, akan tetapi pada Juli 2005, China merevaluasi mata uangnya hingga 2.1% terhadap Dolar Amerika. Sejam pertengahan tahun 2005, hingga akhir 2008 apresiasi kumulatif mata uang Renmimbi terhadap Dolar Amerika mencapai lebih dari 20%. Akan tetapi nilai tukar Renmimbi tetap terpatok pada nilai tukar Dolar Amerika saat terjadi krisis ekonomi hingga Juni 2010, ketika China akhirnya memberlakukan apresiasi¹⁷³.

Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari proses strategi pengembangan ekonomi China. Restrukturisasi ekonomi dan efisiensi yang dilakukan China berhasil meningkatkan GDP negara tersebut sejak 1978. Berdasarkan pengukuran dari *purchasing power parity* (PPP), pada tahun 2010 China merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika. Dengan demikian, China melampaui kondisi ekonomi Jepang di tahun 2001. Nilai pertanian dan industri China bahkan melampaui Amerika yang unggul dalam bidang jasa. Namun demikian, tingkat per kapita China masih berada dibawah rata-rata dunia akibat tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah dunia¹⁷⁴.

Meskipun demikian, Pemerintah China menghadapi beberapa tantangan ekonomi terutama yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan jumlah pengangguran yang tinggi, kerusakan lingkungan, masalah korupsi dan hal-hal lain yang menjadi tantangan bagi kemajuan ekonomi China. Namun, jika dilihat dari cadangan devisa negara termasuk surat hutang yang dijual kepada negara

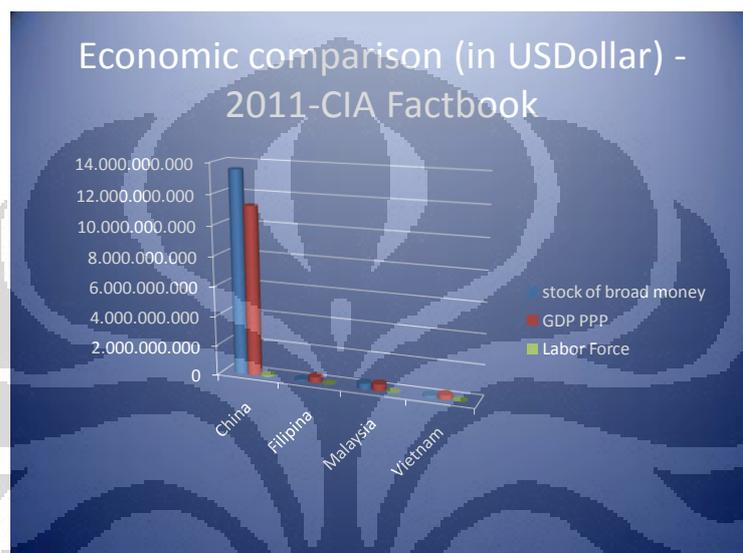
¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

lain, China masih menduduki peringkat pertama di dunia. Surat hutang yang dipegang China menjadi salah satu kekuatan negara tersebut, terlebih lagi surat hutang tersebut adalah surat hutang negara besar dan berpengaruh, Amerika.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang mengajukan klaim, pendapatan perkapita China jauh lebih tinggi. Berikut perbandingan GDP tahun 2011:

Gambar 5 : Perbandingan GDP tahun 2011



3.5 Kebijakan Luar Negeri dan Grand Strategy China

Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya dan melakukan peningkatan dalam bidang ekonomi dan sosial, China melakukan tiga strategi pengembangan untuk melakukan modernisasi pertahanan negaranya dan melakukan modernisasi persenjataan secara bertahap dalam perencanaan yang sangat baik. Strategi tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. **Memberikan informasi tentang tentang Pertahanan dan Persenjataan China.** Menjadikan informasi sebagai bagian dari modernisasi pertahanan dan persenjataan China. Secara aktif China melakukan RMA dengan karakteristik yang dibangunnya dengan perencanaan sientifik dalam perencanaan yang strategis¹⁷⁵

¹⁷⁵ Sumber informasi diperoleh dari website Departemen Pertahanan China , diakses dari <http://eng.mod.gov.cn/> pada 09 Juni 2012 pukul 14.57 WIB

2. Membuat perencanaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pertahanan nasional. China mengaitkan pertumbuhan ekonomi secara erat dengan peningkatan ketahanan nasional. Karena itu, China membuat perencanaan menyeluruh untuk menggunakan sumber daya nasionalnya dan menemukan titik keseimbangan antara peningkatan kemakmuran negara dengan peningkatan ketahanan nasional. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa strategi pertahanan China sejalan dengan peningkatan kapabilitas persenjataannya, maka China menetapkan bahwa ketahanan nasionalnya sebagai bagian dari perkembangan sosial dan ekonominya. China juga membuat perencanaan bahwa tujuan warga negara sesuai dengan pengembangan militer sehingga keduanya dapat menopang satu dengan yang lain.

3. Melakukan reformasi pertahanan nasional dan persenjataan. China berusaha melakukan penyesuaian dan reformasi dalam struktur, kebijakan dan persenjataan untuk dapat mencapai modernisasi struktur persenjataan pada tahun 2020. Untuk itu China membentuk organisasi, uinstitusi dan sistem operasi yang ilmiah sehingga sesuai dengan undang-undang peraturan pembangunan modernisasi persenjataan. China berupaya mereformasi sistem pertahanannya yang terkait dengan industri dan teknologi persenjataan sehingga dapat melakukan inovasi yang lebih baik dan menghasilkan persenjataan yang lebih baik dari segi kuatliasi dan lebih efisien dari segi biaya. Singkatnya, China berusaha melakukan mobilisasi persenjataan yang menyatu dan tersentralisasi, dibangun dengan struktur yang baik, cepat dan tanggap dalam merespon, memiliki kewenangan sendiri, mandiri dan efisien.

Sejak reformasi China tahun 1979-an, para pemimpin China telah menetapkan bahwa yang menjadi tujuan utama China, dan yang menjadi dasar strategi negaranya adalah mendapatkan kekuatan nasional yang komprehensif dengan fokus terhadap pembangunan. Yang merupakan salah satu faktor keberhasilan

dalam proses pembangunan ini adalah penerapan sistem satu partai dalam politik domestik China¹⁷⁶.

Kebangkitan China paling terlihat sejak tahun 1990-an yang dari perspektif realis dilihat sebagai peluang kemunculan China sebagai anti hegemoni ketika itu, Amerika. China membangun ekonomi negaranya dan meningkatkan kapabilitas militernya untuk dapat menjadi pesaing yang sebanding bagi Amerika¹⁷⁷. Kebangkitan China dapat dilihat sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap cara kepemimpinan Amerika sebagai kekuatan paling dominan di dunia. Karena itu, China berusaha menjadi penyeimbang agar kebijakan-kebijakan amerika dapat diseimbangkan. Kehadiran *bandwagoning* terhadap hegemoni dapat mencegah unilateralisme berlebihan dari pemilik kekuatan tunggal¹⁷⁸.

Keinginan China untuk menjadi kekuatan pesaing Amerika Serikat didukung adanya kesempatan akibat terjadinya kemunduran pada kekuatan Amerika. Dibalik keinginan China untuk menjadi kekuatan nomor satu di dunia, terdapat dua hal baik positif maupun negatif. Kesediaan China untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya meningkatkan kontrol terhadap pihak lain. Akan tetapi di sisi lain, China memahami konsep hegemoni seperti negara yang sedang berperang pada periode 480- 221) dan menerima akan menjadi pemilik *power*¹⁷⁹.

Salah satu faktor ketidaksenangan China terhadap Amerika adalah perananan Amerika yang dinilai China besar dalam pemisahan Taiwan dari China. yang juga menimbulkan ancaman terbentuknya aliansi-aliansi militer dengan negara-negara tetangga China, menghalangi terciptanya hubungan diplomatik China dengan beberapa negara, menimbulkan embargo perdagangan dan membentuk koalisi penolakan terhadap China kedudukan China dalam PBB tahun 1971¹⁸⁰.

Sebelum terbentuknya hubungan China dan Amerika, Sino-American 1972, China berusaha membangun baik *soft power* maupun *hard power*-nya secara intensif. Pada tahun 1950-an China membentuk aliansi dengan Moskow dan

¹⁷⁶ Rosemary Foot, "Chinese Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accomodating and Hedging" dalam *Foreign Affair*" 82. I (2006) hlm. 83.

¹⁷⁷ David B. H. Denoon dan Wendy Frieman, " China's Security Strategy: The View from Beijing, ASEAN, and Washington" dalam *Asian Survey*, Vol. 36, No. 4 (Apr., 1996) hlm 422-439.

¹⁷⁸ Rosemary Foot, *loc cit*.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

menggunakan hubungan tersebut untuk membangun perekonomian maupun militer yang diyakini China sebagai hal yang dapat menjadikan negara tersebut menjadi negara yang diperhitungkan¹⁸¹.

Seperti doktrin Mao, bahwa negara-negara barat akan memperhitungkan China jika negara tersebut mampu meningkatkan perekonomiannya melalui industrialisasi dan melakukan revolusi dalam persenjataannya, termasuk kepemilikan senjata nuklir. China menyadari bahwa *power* yang dimiliki Amerika Serikat adalah *power* yang besar, sedangkan China adalah negara yang tidak diperhitungkan. Sebuah laporan yang dipublikasikan di salah satu koran milik PRC, Ta Kung Pao Hongkong pada 2002 menyatakan bahwa seluruh dunia akan berada dibawah kontrol Amerika Serikat hingga pertengahan abad 21 karena Amerika memiliki '*comprehensive national Strength*' dan Amerika dan juga karena '*psycological state*' negara tersebut telah mencapai titik yang membuat Amerika dapat melakukan apapun yang ingin dilakukannya termasuk memilih negara yang akan menjadi lawannya untuk membuktikan kekuatannya¹⁸².

Saat terjadi reformasi besar-besaran tahun 1979 di China, para pemimpin China menyusun dan menetapkan tujuan negara mereka dan strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang menjadi kekuatan negara yang komprehensif. Salah satu faktor pendorong keberhasilan strategi ini adalah legitimasi terhadap satu partai. Para pemimpin China menyatakan bahwa tujuan-tujuan negara akan dapat tercapai jika kondisi regional maupun global aman dan damai¹⁸³. Deng Xiaoping pada 1989 menggarisbawahi prinsi-prinsip kunci yang akan mengatasi kebijakan luar negeri: "mengamati perkembangan dengan sabar, mengatur posisi, menerima tantangan dengan tenang, menyembunyikan kapasitas, tidak dikuasai oleh ambisi dan tidak pernah melakukan klaim terhadap kepemimpinan. Lalu pada tahun 1993, dielaborasi oleh Presiden Jiang Zemin yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menstabilkan hubungan dengan Amerika Serikat, doktrin tersebut kemudian berubah menjadi "menginkatkan

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

kepercayaan diri, mengurangi permasalahan, memperluas kerjasama, dan menghindari konfrontasi.¹⁸⁴

Meskipun dalam doktrinnya China menyebutkan menghindari konfrontasi, Laut China Selatan mengubah China yang semula pasif menjadi agresif. China tidak lagi sepasif yang terdapat dalam kebijakannya. Arah kebijakan China sangat jelas dapat dilihat melalui cara pemimpin China merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut dalam mencapai kemajuan China serta ketegasan China lewat kebijakan-kebijakan regionalnya dari awal hingga pertengahan tahun 1990-an.

China memperingatkan Taiwan dan negara-negara tetangganya tentang Laut China Selatan dengan memasukkan Laut China Selatan sebagai bahaya dalam kebijakan regionalnya. Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara tetangga China dan melihat kebangkitan China sebagai ancaman yang lebih besar sebab kemajuan China akan meningkatkan posisi negara tersebut baik dalam strategi Asia maupun Amerika¹⁸⁵.

China mendasarkan pertumbuhannya atas dasar “*soft power*”. Pertumbuhan China yang berprinsip atas dasar harmonisasi dilandasi 4 prinsip: yang pertama adalah perubahan peta politik dunia, pengalaman baik atas keberhasilan *peaceful development* China atas apa yang diraih negara tersebut, teladan yang diberikan China terhadap tatanan politik dunia dan kepentingan China untuk penyusunan *grand strategy* yang dibangun dengan tanggung jawab China pada dunia internasional¹⁸⁶.

Pada saat terjadi krisis ekonomi Asia 1997-1998, China melakukan gerakan cepat untuk menawarkan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan dan menyatakan bahwa China tidak akan melakukan devaluasi terhadap mata uangnya dalam menanggapi terjadinya krisis keuangan saat itu. China kemudian membangun hubungan kerjasama yang lebih kuat dan kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi maupun pertahanan, misalnya dengan organisasi ASEAN, Asia Regional Forum dan juga APEC. China juga turut serta

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Shi Yinhong, “China’s Peaceful Development, Harmonious World and International Responsibility: Achievement and Challenges” dalam *International Review* hlm. 19-28.

dalam kelompok ekonomi negara Asia, dan tergabung dalam *ASEAN Plus Three* (APT) yang juga melibatkan Korea Selatan dan Jepang.

Sebagai *great power*, para pemimpin China menunjukkan usaha yang lebih besar dengan lebih banyak berpartisipasi dalam forum global. Presiden Jian Zemin dan perdana menteri Zhu Rongji pada 1999 memutuskan oposisi domestik untuk keluar dalam negosiasi terakhir dengan Amerika Serikat tentang keanggotaan China dalam WTO.

China juga menarik dukungannya terhadap pasukan perdamaian PBB (*peace keeping and peacebuilding operations*) secara perlahan dengan mengurangi jumlah unit pasukan maupun mengurangi wilayah yang dibantu. Pada 2004, China bergabung dengan Nuclear Suppliers Group dan juga menjadi anggota *Missile Technology Control Regime*. Ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa China bukan hanya sebagai negara yang kekuatannya berkembang dengan damai, tetapi juga sebagai kekuatan baru yang memiliki tanggung jawab sebagai *superpower* dalam politik dunia. Dari era Deng Xiaping, Jiang Zemin maupun penerusnya Hu Jintao sangat terlihat fokus China dalam globalisasi ekonomi, isu keamanan yang multidimensional, dan menunjukkan tanggung jawab sebagai *superpower* dalam mengatur penatalaksanaan tatanan dunia¹⁸⁷.

China juga meningkatkan kerjasama bilateral seperti membangun kerjasama strategis atau menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara-negara tetangganya termasuk Rusia, India, Indonesia, Kazakhstan, Thailand dan Malaysia. Selain itu dibangun juga kerjasama dengan Brazil, Prancis, Jerman, Iran, Sudan dan Venezuela. Salah satu kontribusi dari kerjasama-kerjasama tersebut adalah akses terhadap sumberdaya ekonomi yang terbuka lebih luas. China dalam waktu 30-50 tahun mendatang akan mengembangkan dua pendekatan, yang pertama adalah *bandwagoning* yang diterjemahkan sebagai kerja sama dengan *superpower*, pemilik *power* terbesar yang menjadi aktor utama dalam rezim internasional sehingga dengan cara demikian China mendapatkan dukungan dan perlindungan terhadap manfaat-manfaat lain meskipun harga dari kebebasan satu pihak akan berkurang.

¹⁸⁷ *Ibid.*

Yang kedua adalah dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu yang panjang akan melebihi akomodasinya dalam keamanan internasional dengan meningkatkan kontribusi terhadap transformasi perdamaian dari dominasi dan kontrol kekuatan barat sehingga negara barat maupun Amerika akan menerima keberadaan aktor non-barat dengan kedudukan yang sama. Shi menjelaskan peningkatan “*transcending*” sebagai penegakan supremasi *force*, kekuatan untuk menghindari terjadinya aksi-aksi unilateral¹⁸⁸.

Tatanan internasional yang demokratis, yang terbesar dari sikap unilateralis hanya dapat dibangun dengan landasan hukum internasional, negosiasi multilateral, dan kerjasama. Demokratisasi dalam dunia internasional yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai demokratisasi terhadap hegemoni Amerika dan menentang tindakan-tindakan Amerika. Salah satu bagian dari strategi China adalah menekan tindakan-tindakan Amerika yang diyakini China perlu diubah.

Dari perspektif China, Amerika adalah aktor yang *hegemonic*, unilateralis, dismisif terhadap hukum internasional maupun peraturan PBB dan sangat menganut prinsip *zero-sum* dalam konsep keamanan yang mengindahkan konsep keamanan non-tradisional dan tidak memperdulikan dampak-dampak negatif dari security dilemma. Dalam hal ekonomi Amerika juga sangat *protectionist*. Tugas lain dari China adalah untuk meningkatkan globalisasi dan multipolaritas sebagai kunci dan konsep yang menghubungkan demokratisasi dunia. yang sebelumnya dilihat dari tekanan-tekanan transnasional seperti krisis ekonomi, *drug trafficking*, *epidemics*, terorisme, maupun isu-isu lainnya yang seringkali membutuhkan kerjasama multilateral dalam pendekatan keamanan untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Untuk menunjukkan serta memperkuat kekuatannya, China menerapkan diplomasi militer yang cukup aktif yang memiliki empat karakter utama. Pada 2009, China mencapai perkembangan yang luar biasa dalam membangun hubungan militer dengan negara lain dalam segala aspek dan secara terus menerus memperdalam kerjasama.¹⁸⁹ Karakter pertama militer China adalah turut aktif

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Disampaikan oleh Huang Xueping, jurubicara Kementerian Pertahanan China di Beijing pada 19 November 2009

dalam hubungan kerjasama dan konsultasi di bidang pertahanan yang merupakan bagian dari diplomasi militer. Hal ini diimplementasikan dengan kunjungan para pemimpin *Central Military Commission* (CMC) melakukan kunjungan ke lebih dari 20 negara termasuk kunjungan ke Rusia dan Australia dan mengadakan 10 konsultasi pertahanan dengan Amerika Serikat, Jerman, dan Vietnam, untuk meningkatkan ikatan militer China dengan negara-negara tersebut¹⁹⁰.

Karakter berikutnya adalah melakukan usaha intensif untuk mengadakan latihan militer bersama. Tujuh kerjasama Sino-X (X adalah negara-negara yang bekerjasama dengan China) dilakukan dalam bentuk penjagaan keamanan, pasukan keamanan, bantuan kesehatan dan pengawalan kapal untuk pertama kalinya dalam sejarah China diadakan. Karakter ketiga adalah merefleksikan diplomasi militer pada ulang tahun angkatan militer China yang ke-60 dengan membentuk identitas sebagai militer yang cinta perdamaian, terbuka, dan siap bekerja sama. Refleksi hal tersebut diawali dengan mengundang para komandan dan deputy angkatan laut dan udara dari berbagai negara pada saat perayaan ulang tahun ke-60 Angkatan Laut dan udara *People's Liberation Army* (PLA) yang merupakan metode awal untuk menciptakan kerjasama lebih lanjut. Karakteristik keempat dapat dilihat dari perluasan kerjasama militer China dalam ranah keamanan non-tradisional. Sejak pemerintah China mengirim angkatan lautnya untuk menjaga wilayah Laut Somalia, China terlibat dalam kerjasama dan aktivitas lain seperti pertemuan para pemimpin, latihan bersama, latihan pengawasan dengan beberapa negara dan organisasi internasional.

Dalam strateginya, China juga sangat fokus pada geostrategi menggambarkan peta geografis dimana suatu negara meletakkan kekuatan militernya dan menjalankan upaya-upaya diplomatiknya¹⁹¹. Fokus pada geostrategi China saat ini adalah warisan dari peraturan Dinasti Ming yang menyatakan :

¹⁹⁰ Diakses dari http://eng.mod.gov.cn/Press/2009-11/20/content_4105615.htm, pada 11 Juni 2012 pukul 17.09 WIB

¹⁹¹ Jakub J. Grygiel "*Great Powers And Geopolitical Change*" (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) hlm. 21-24.

“...the revival of confucian tradition, which translated into dominance of civil bureaucracy over military and above all in the reunification of foreign trade and expansion...”

Upaya China mempertahankan wilayah geografinya sangat menitikberatkan pada laut karena laut memiliki fungsi dan peranan yang besar baik dalam keamanan, pertahanan maupun ekonomi negara. Karena itu China juga fokus pada peningkatan kekuatan lautnya. Hingga abad ke-XI kota Quanzhou dan Guandong yang terletak di tenggara China berkembang menjadi kota internasional dan menjadi pusat perdagangan yang didatangi pedagang-pedangan dari luar China. Kombinasi antara perdagangan antar lautan dan perdagangan darat menjadikan China negara yang perdagangan paling kaya di dunia sejak zaman Dinasti Ming¹⁹².

Hal ini menjadikan banyak pihak terutama para pedagang dari segala penjuru dunia yang tertarik untuk datang ke China. Barang-barang antik yang dimiliki oleh China, perluasan area perdagangan China dan kemampuan maritim China yang semakin membaik menjadi alasan lain perdagangan negara tersebut maju pesat. Artefak maritim yang berasal dari 8000 tahun yang lalu ditemukan.¹⁹³

Dalam menghadapi kebijakan Amerika yang keras hingga periode tahun 1972, China memperlengkapi diri baik dengan *hard power* maupun dengan *soft power*. Pada tahun 1950-an China membangun hubungan kerjasama dengan Moskow dan menggunakan hubungan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi maupun militer China. Akan tetapi hubungan tersebut menurun pasca berakhirnya Perang Dingin¹⁹⁴. Runtuhnya dua kekuasaan komunis menjadi sinyal kemunculan Amerika sebagai pemegang kekuasaan dominan dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan China untuk tidak menjadi oposisi Amerika dan tidak lagi menjadi aliansi Rusia.

¹⁹² Munro Ross H., ‘Eavesdropping on the Chinese military: where it expects war – where it doesn’t’, dalam *Orbis*, (Summer) 1994 hlm. 24.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Rosemary Foot, “Chinese Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accomodating and Hedging” dalam *Foreign Affair*” 82. I (2006) hlm. 83.

Demikian juga ketika Amerika mendapat serangan terorisme pada tahun 2001, China melihat hal tersebut sebagai kemunduran kekuatan Amerika sehingga China melihat peluang untuk menjadi pemiliki kekuatan dominan. Dalam jangka waktu pendek, China menargetkan diri untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia. Kebangkitan ekonomi China diikuti dengan modernisasi persenjataan dan dilengkapi dengan perluasan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan Asia. China yang meyakini bahwa politik internasional memerlukan sosok pemimpin. Menteri Luar Negeri China, Qian Qichen pada tahun 1991 menyatakan¹⁹⁵: *"Although the world is in transitional period and new pattern has not yet taken shape, there is a rough structure i international relations, in which one superpower and several powers depend on and struggle against each other"*.

Pernyataan tersebut menjadi isyarat kesiapan China untuk bersaing dengan negara pemilik *power* lainnya untuk menjadi yang terkuat untuk menjadi *superpower*. Karena itu, setelah 9/11/2001 China dengan cepat melihat kekosongan kepemimpinan dunia setelah kemunduran kekuasaan Amerika pasca serangan teoris, krisis ekonomi dan apresiasi dunia terhadap Amerika dengan tindakan-tindakan sepihaknya di Timur Tengah. Amerika tidak lagi disegani dan dilihat sebagai pemimpin oleh bangsa-bangsa di dunia. Namun, China masih memiliki permasalahan-permasalahan internal yang harus diselesaikan untuk dapat menjadi bangsa yang lebih besar dan menjadi pemimpin dunia. Karena itu, China memfokuskan diri untuk dapat menjadi pemegang kekuatan dominan di wilayah Asia dengan tetap membenahi diri untuk dapat menjadi *superpower* dimasa yang akan datang. Selain itu, kemampuan China juga masih terbatas untuk menjadi *superpower*. Hal lain yang menjadi pertimbangan China adalah peta kekuasaan dalam politik internasional yang masih memiliki empat aktor kuat lainnya : Amerika, Jerman, Jepang dan Rusia¹⁹⁶.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

BAB 4 CHINA SEBAGAI *DOMINANT POWER* DI ASIA

Dalam bab ini peneliti akan menganalisa sikap asertif China terhadap Jepang sebagai negara pemilik *power* yang relatif berimbang dengan China dalam sengketa Laut China Timur. Pada bagian berikutnya peneliti akan menganalisa relatifitas *power* China terhadap Jepang, India dan Korea Selatan yang juga merupakan *major power* di Asia. *Power* ketiga negara adalah merupakan proporsi yang terbesar di Asia, setelah China. Dengan kata lain, porsi distribusi *power* di Asia yang terbesar berada pada China, Jepang, India dan Korea Selatan. Karena itu dalam bab ini peneliti akan menganalisa komposisi distribusi *power* di Asia diantara keempat negara.

4 .1 Distribusi *Power* di Asia : China Sebagai *Great Power* diantara *Major Power*

Liberalisasi perdagangan dan ekspansi dibidang ekonomi serta tidak adanya struktur yang dibangun pada masa Perang Dingin (Keohane, 1982) memberi tekanan pada pemerintah regional. Asia merupakan wilayah yang mengalami perubahan struktur paling besar dalam beberapa dekade awal abad-2. India, Pakistan, dan China menjadi bagian dari sistem regional yang paling tidak tergantung dengan negara lain. Masing-masing negara tersebut mengembangkan kebijakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. *Power* ketiga negara tersebut diukur dari delapan indikator yaitu: populasi, konsumsi energi, konsumsi energi per kapita, GNP, GNP per kapita, jumlah perdagangan, belanja militer dan belanja militer sebagai persentasi dari GNP¹⁹⁷. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur adanya perubahan dalam struktur *power* di Asia, adanya perubahan dari *power* yang dimiliki China, India dan Pakistan.

Dalam tesis ini, peneliti juga akan mencoba melihat struktur *power* di Asia setelah kemunculan China sebagai *great power* yang memiliki kapabilitas kekuatan jauh diatas negara-negara Asia lainnya. Indikator yang akan digunakan

¹⁹⁷Sushill, "Power Cycle Analysis of India, China, and Pakistan in Regional and Global". Dalam *International Political Science Review* Vol.24, No. 1, 2009 hlm. 113-22.

peneliti dalam tesis adalah GDP dan belanja militer. Proporsi *power* yang akan diukur melibatkan empat negara yaitu: China, Jepang, India dan Korea Selatan.

Sepanjang era modern 1500-1945, sejarah sistem internasional diwarnai sangat kuat dengan pergerakan dan kemajuan serta perubahan di tingkat global. Sistem internasional diperluas hingga akhirnya menjadi sistem yang mengglobal. Negara-negara Eropa mencapai kemajuan ekonomi, politik dan militer yang secara formal dan informal membentuk kerajaan di seluruh dunia¹⁹⁸. Di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia *power* Eropa juga menjadi sangat dominan dan menguasai sistem sosial dan sistem internasional yang pada umumnya melumpuhkan dinamika kemandirian regional yang berasal dari wilayah itu¹⁹⁹. Eropa menjadi penentu dalam politik regional negara-negara jajahannya. Afrika misalnya, kawasan yang cukup banyak dijajah Prancis, kondisi keamanan dan politiknya menjadi sangat tergantung pada Eropa. Pada akhir tahun 1960-an, seluruh dunia dikemas secara politik dalam keamanan “Eropa”. *Territorial state* menempati posisi yang mereka bentuk dengan legitimasi yang sudah mereka tentukan dan hak untuk menetapkan *self determination* serta ideologi nasionalisme.

Akan tetapi sejak terjadinya dekolonisasi, keamanan di tingkat regional menjadi hal yang lebih penting. Keamanan regional menjadi otoritas kawasan masing-masing. Dekolonisasi dalam banyak hal dikaitkan erat dengan Perang Dingin²⁰⁰ yang merupakan awal desentralisasi otoritas dari tingkat internasional ke tingkat global. Perang Dingin membantu pembentukan *Regional Security Complexes* (RSCs) di Timur Tengah, Afrika dan Asia. Hal tersebut merupakan bagian dari perubahan multipolaritas menjadi bipolaritas dari tahun 1945.

Politik negara-negara di tingkat regional menjadi sangat penting bagi dua kekuatan besar pada saat Perang Dingin untuk dalam membentuk blok kekuatan. Kedua blok memerlukan lebih banyak negara dipihaknya. Dengan demikian politik masing-masing negara di dunia menjadi lebih independen. Suatu negara bebas memilih atau untuk tidak memilih menjadi bagian dari salah satu kekuatan

¹⁹⁸Barry Buzan dan Ole Weaver, “Regions and Powers: *Regions and Powers The Structure of International Security* Cambridge: Cambridge University Press, 2003) hlm. 14-19.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

ketika itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peristiwa diatas membawa perubahan dalam perbedaan sistem regional dan sistem internasional. Keduanya menjadi sistem yang lebih mandiri. Sistem regional tidak lagi ditentukan oleh *global power* atau *superpower*. Lalu berkembanglah konsep keamanan wilayah, *Regional Security Complex Theory* (RSCT) karena salah satu dampak dari pembedaan sistem internasional dengan sistem regional adalah pergerakan ancaman akan bergerak di dan meluas lebih dahulu di tingkat regional.

Sejarah dari *regional security complexes* (RSCs) berawal dari tiga fase: 1500-1945: Perang Dingin, Dekoloniasiasi dari 1945-1989 dan Era Pasca Perang Dingin sejak tahun 1990²⁰¹. Dekolonialisasi dan Perang Dingin membentuk kerangka esensial dalam pembentukan RSCs yaitu : negara adalah pemain utama dan yang terpenting dalam permainan *security* ketika sistem internasional mencapai skala global. Dengan demikian, ruang bagi sistem regional menjadi lebih luas.

Kondisi regional yang aman dan kondusif akan menentukan sebesar apa *global power* mempengaruhi kawasan tersebut. *Security complex* bisa dipengaruhi oleh *global power* secara ekstensif oleh *global power* namun dapat juga sebaliknya, tidak terlalu dipengaruhi oleh *global power*. Dengan demikian *power* pihak *global power* dalam regional menjadi lebih berkurang dan suatu kawasan akan memiliki otoritas yang lebih besar terhadap wilayahnya.

Keamanan global dibangun dari unit-unit keamanan regional, sedangkan keamanan regional dibangun dari keamanan negara-negara di dalam satu wilayah. Ancaman keamanan di suatu wilayah serta segala bentuk dinamika politik dan militer akan bergerak lebih mudah dan lebih cepat di dalam satu wilayah. Ancaman dari satu negara akan bergerak terlebih dahulu ke negara terdekatnya²⁰².

Sebuah negara dalam liga *power* memegang peranan penting dalam permainan global yang dapat mengancam negara lain sebagai kelas yang istimewa dan memproyeksi kekuatan mereka sebagai kekuatan yang terpisah dari wilayah. Akan tetapi bagi mayoritas negara-negara besar, permainan utama isi keamanan

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*, hlm. xvi

ditentukan oleh negara-negara tetangga mereka²⁰³. Dengan demikian, dinamika keamanan di tingkat regional menjadi hal yang sangat penting, sama pentingnya dengan dinamika keamanan internasional. Akan tetapi, meskipun politik regional menjadi hal yang terpisahkan dengan politik global, keduanya mempengaruhi satu sama lain, karena apa yang terjadi di regional menentukan kondisi sistem internasional.

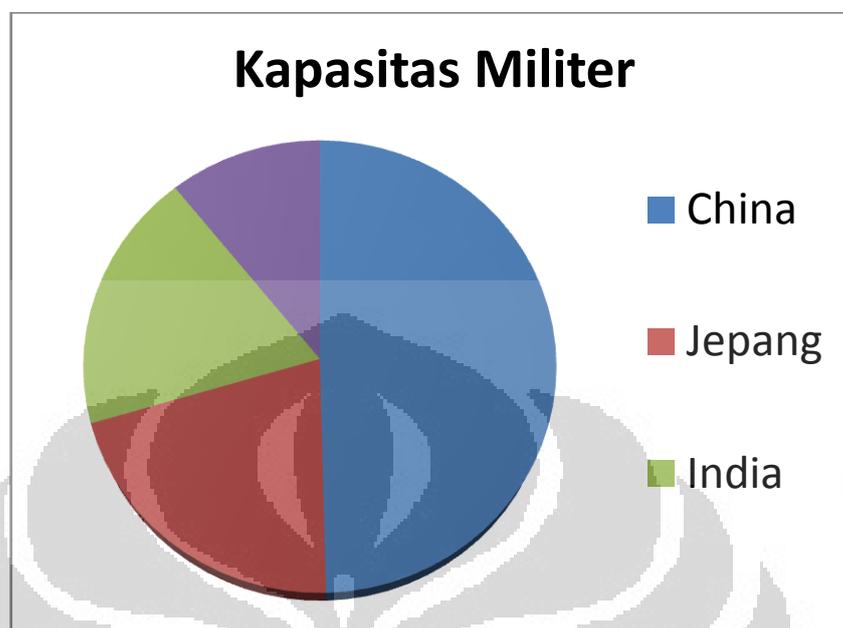
Dalam distribusi *power* di Asia, China bersaing *head to head* dengan Jepang, sebagai sesama *great power* dalam sistem internasional. Lalu kemudian disusul oleh India yang mengalami pertumbuhan pesat dan Korea Selatan, meskipun besar negaranya terutama jumlah penduduknya masih tidak bisa dibandingkan dengan China dan India. Dinilai dari kemampuan ekonomi, persenjataan dan kapabilitas militer, China hampir menyamai kedua negara saingannya ini.

Dari segi kekuatan, China tidak memiliki lawan yang jauh lebih tangguh yang menjadi pertimbangan besar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Demikian juga dengan aliansi. China tidak merasa bahwa ada aliansi yang dianggap sebagai pihak yang ditakuti sehingga membuat China untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aksi. Menjadi semakin jelas bahwa kemampuan China yang masih unggul dari semua *major power* di Asia mendorong China untuk bersikap unilateralis.

Distribusi *power* di ASIA berdasarkan GDP dan belanja militer empat *major power* di Asia akan digambarkan seperti berikut:

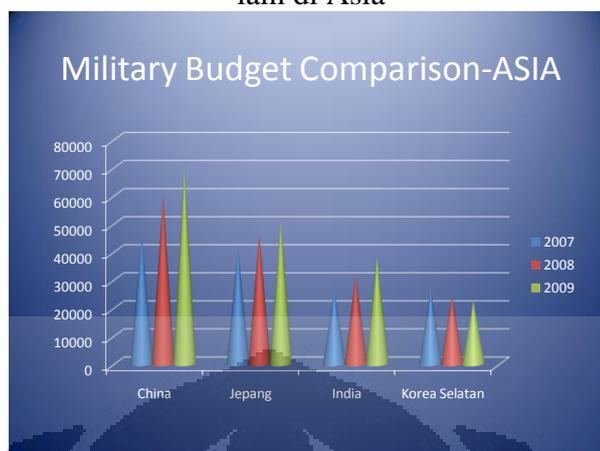
²⁰³*Ibid.*

Gambar 4.1 Distribusi *Power* di Asia Berdasarkan GDP dan Belanja Militer 2011



Sebagai sistem yang dipengaruhi aktor-aktor didalamnya, Keamanan di Asia sangat tergantung pada China, Jepang dan India. Dalam tesis ini peneliti menemukan bahwa di Asia terdapat satu *dominant power* yaitu China, dua *potential power* yaitu Jepang dan India dan satu *challenger*, yaitu Korea Selatan. *Dominant power* adalah negara yang memiliki *power* paling besar terutama dinilai dari kapabilitas militer dan ekonominya sedangkan *potential power* adalah negara yang berpotensi untuk menyusul kekuatan *dominant power* akan tetapi kekuatannya masih jauh dibandingkan dengan *dominant power* dan *challenger* sebagai kekuatan yang potensial menyaingi *potential power*.

Gambar 4.2 Perbandingan Kapabilitas Militer China dengan *major power* lain di Asia



Pertumbuhan dan perkembangan suatu negara maupun kebangkitan suatu kekuatan baru dapat menjadi pemicu terbentuknya aliansi di Asia²⁰⁴. Akan tetapi negara-negara di Asia, seperti negara-negara anggota ASEAN cenderung untuk fokus pada kepentingan negaranya sendiri dan membangun kerjasama yang lebih luas, dibanding membangun aliansi. Bahkan, negara-negara anggota ASEAN pun tidak memiliki cukup perhatian atas konflik yang melibatkan anggota-anggotanya seperti sengketa Laut China Selatan yang melibatkan Brunei, Malaysia dan Filipina.

4.2 China dan Jepang, Dua *Great power* Dalam Satu Kawasan

Keamanan regional sangat ditentukan kemandirian negara-negara yang ada di kawasan tersebut sebagai pembangun keamanan regional. Isu keamanan di satu negara akan bergerak lebih dulu ke negara-negara tetangganya daripada ke negara yang berada di wilayah yang berbeda. Ancaman serta dinamika politik dan militer akan bergerak lebih mudah dan lebih cepat di dalam satu wilayah. Peningkatan *power* China terjadi sejak 1970-an dan semakin signifikan setelah runtuhnya Uni Soviet 1991. China berusaha membentuk sistem internasional yang bersifat multipolar untuk menghadapi pengaruh militer dan ekonomi Amerika Serikat

²⁰⁴ *Ibid.*

sebagai satu-satunya negara adidaya²⁰⁵. Kebangkitan China menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan bagi kawasan Asia. Dengan munculnya China sebagai negara yang memiliki *power* yang dapat menyaingi Amerika Serikat sebagai *superpower* menjadi satu kesempatan untuk menjadi wilayah yang lebih memiliki posisi lebih baik di dunia internasional. Akan tetapi peningkatan tersebut juga diikuti dengan peningkatan sikap sepihak seperti yang terjadi dalam konflik Laut China Selatan. Karena pada dasarnya, semakin besar *power* suatu negara, semakin negara tersebut tidak punya ketakutan untuk menjalankan aksinya.

Salah satu bidang untuk dapat mengimplementasikan strategi pertahanan China adalah laut. Legitimasi yang didapatkan atas suatu wilayah menjadi legitimasi untuk melakukan upaya-upaya pengembangan ekonomi seperti eksplorasi sumber daya alam²⁰⁶. Laut yang memiliki sebagai fungsi transportasi dan kekuasaan menjadikannya sebagai hal yang sangat penting bagi banyak negara. Seperti yang dinyatakan oleh Sir Walter Raleigh ‘*Whosoever commands the sea, commands the trade. Whosoever commands the trade of the world commands the riches of the World, and consequently the world itself*’²⁰⁷.

Lebih dari 95% perdagangan dunia dilakukan lewat laut. Volume perdagangan yang dilakukan lewat laut terus meningkat dalam 30 tahun terakhir dari 2,6 milyar ton barang dari tahun 1970 menjadi 7,12 milyar ton di tahun 2005. Demikianlah angka statistik yang mengejutkan dalam peningkatan perdagangan internasional yang dilakukan melalui laut²⁰⁸. Globalisasi memicu hal tersebut terjadi, terutama wacana perdagangan bebas yang sudah diterapkan oleh beberapa di beberapa kawasan di dunia.

Sebagai negara yang sangat mengandalkan perdagangan, tentunya laut adalah hal yang sangat penting bagi China. Laut menjadi sarana transportasi yang menjembatani kerjasama dan perdagangan antar negara-negara di samudera yang berbeda. Namun laut dapat memicu tingginya persaingan antar negara juga

²⁰⁵ Geoffrey Till, “*Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. (New York: Routledge, 2009) hlm.26.

²⁰⁶ Diakses dari <http://southchinaseastudies.org/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/673-recent-developments-in-the-philippine-baselines-law-by-raul-c-pangalangan> pada 12 Juni 2012 pukul 22.44 WIB

²⁰⁷ Geoffrey Till, *loc.cit* hlm.28.

²⁰⁸ *Ibid.*

menjadi hal yang dapat mengancam keamanan dan mendorong pada peperangan. Mengacu pada teori Mahan, sistem perdangan laut global sangat sensitif dan dapat dengan mudah menjadi ancaman²⁰⁹.

China meningkatkan kedaulatan di Laut China Selatan karena wilayah tersebut memiliki pengaruh politik, ekonomi dan keamanan yang besar. Laut China Selatan menjadi salah satu sumber dari sumber daya minyak dan gas. Fungsi lain yang juga sangat penting adalah menjadi jalur transportasi perdagangan. Namun alasan utama China adalah menjaga kesatuan wilayahnya dan memperoleh legitimasi atas *power* yang dimilikinya.

Sengketa wilayah laut tidak hanya terjadi antara China dengan lima negara tetangganya di Laut China Selatan, tetapi juga dengan Jepang di Laut China Timur atas pulau yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China. Akan tetapi klaim China atas Pulau Diaoyu tidak sekuat klaim China atas keseluruhan wilayah Laut China Selatan. Dalam melakukan aksi-aksi militer pun China lebih agresif kepada Vietnam dan Filipina yang memiliki kekuatan jauh lebih kecil dari China. Berikut adalah gambar peta sengketa wilayah antara Jepang dan China²¹⁰:

Gambar 4.3 Peta Sengketa Laut Timur China



²⁰⁹ Conway *et al.*, “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower” (Henceforth, 2007).

²¹⁰ Diakses dari <http://www.pmel.noaa.gov/np/pages/seas/ecs.html> pada 06 Juni 2012 pukul 22.33 WIB

Klaim China atas Diaoyu menjadi salah satu bukti bahwa China sangat fokus terhadap kesatuan wilayah teritorial. Fokus China terhadap kesatuan wilayah teritorial. Sebuah perjanjian penting antara China dan Jepang telah disepakati pada tahun 2008 . Konsensus tersebut diberi nama “*a sea of peace, cooperation and friendship*”²¹¹.”

Sesuai namanya, konsensus ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan persahabatan kedua negara sehingga ketegangan di Laut China Timur dapat dicegah. Akan tetapi pada kenyataannya, sama seperti yang terjadi dengan konsensus yang disepakati China terhadap konflik di Laut China Timur,, “*a sea of peace, cooperation and friendship*” juga mengalami kegagalan sebab ketegangan antara China dan Jepang hingga tahun 2012 masih berlangsung. Memang jika dibandingkan dengan aksi-aksi ketegangan di Laut China Selatan, ketegangan di Laut China Timur masih relatif lebih rendah.

Seorang analis dari Jepang bahkan mengubah nama konsensi tersebut menjadi “*dead in the water*” sebab klaim kedua negara masih tetap sama. Awal 2012 klaim dari kedua belah pihak meningkat. Pemicunya adalah pengumuman dari Jepang atas pemberian nama pada 39 pulau tak berpenghuni di lingkungan Laut China Timur yang beberapa diantaranya juga diklaim oleh China. China kemudian mengajukan protes atas tindakan Jepang ini, dan sebaliknya protes dari China dianggap Jepang sebagai tindakan asertif dari China. Respon China dilancarkan dengan menerbangkan pesawat-pesawat pemantaunya di udara Laut China Timur. Lalu Jepang menanggapi aksi ini dengan meningkatkan penjagaan di pesisir pantai wilayah tersebut.

Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang terjadi karena kedua belah pihak mengajukan klaim yang sama atas Pulau Senkaku atau Diaoyu yang secara administratif berada dibawah Pemerintah Jepang namun diklaim juga oleh China. Ketegangan diplomatik antara kedua negara terjadi ketika pada 2010 lalu

²¹¹ Wyatt Olson, “East China Sea pact does little to defuse tensions between Japan and China” diakses dari <http://www.stripes.com/east-china-sea-pact-does-little-to-defuse-tensions-between-japan-and-china-1.171397> pada 09 Juni 20120 pukul 11.43 WIB

akibat penahanan terhadap seorang kapten kapal penangkap ikan milik China oleh Jepang, atas tuduhan pemancangan dua kapal Jepang di Pulau Diaoyu²¹².

Tindakan Jepang yang tegas atas pelanggaran China di wilayah administratifnya merupakan salah satu contoh adanya aksi yang seimbang antara China dan Jepang. Berbeda ketika aksi serupa dilakukan kepada Filipina atau Vietnam. Meskipun China kerap melakukan tindakan sepihak di wilayah yang menurut konvensi internasional UNCLOS berada dibawah kedaulatan mereka, namun kedua negara cenderung bersikap lebih lunak. Aksi balasan yang diberikan Filipina pada saat China membangun pangkalan militernya di Laut China Selatan adalah demonstrasi di sekitar Kedutaan Besar China di Filipina.

Untuk membahas peristiwa ini, Perdana Menteri China, Wen Jiabao menolak bertemu dengan pihak Jepang, Naoto Kan dan bahkan mengancam Jepang bahwa China akan melancarkan aksi berikutnya jika kapten tersebut tidak segera dibebaskan tanpa syarat. Bahkan, Pemerintah China juga menghentikan ekspor mineral langka yang merupakan produk primer bagi industri Jepang²¹³.

Tabel 4.1 Aksi berbalasan yang sebanding antara Jepang dan China di Laut China Timur²¹⁴

Waktu	Jepang	China
September 2010	Menangkap kapten kapal penangkap ikan milik China di Pulau Daiyou	China mengancam akan melakukan aksi lanjutan perihal kejadian tersebut bahkan mengancam untuk menghentikan ekspor produk yang sangat penting bagi Jepang
Awal 2012	Setelah China mengirimkan pesawat udaranya untuk menjaga kawasan sengketa, Jepang meningkatkan patroli di pesisir pantai	China mengirimkan pesawat terbangnya untuk mengawasi di wilayah Laut China Timur

²¹² "China's Territorial Disputes" diakses dari <http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/china/territorial-disputes/index.html> pada 08 Juni 2011 pukul 12.23 WIB

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Tabel disusun peneliti dari berbagai sumber

Aksi berbalasan yang relatif seimbang dari China dan Jepang disebabkan kedua negara memiliki kapabilitas militer yang tidak jauh berbeda. Aksi sebanding seperti yang dilakukan Jepang terhadap China tidak dilakukan oleh Vietnam maupun Filipina. Dalam tabel berikut ini dapat dilihat perbandingan kapabilitas militer Jepang dan China pada 2011²¹⁵.

Tabel 4.2 Perbandingan Anggaran Belanja Militer China dengan Jepang 2007-2009 (dalam USD juta)

	CHINA	JEPANG
2007	46,174	41,039
2009	60,187	51,085
2010	70,382	46,044

4.3 Pengaruh Dominasi China Terhadap Stabilitas Kawasan

Kehadiran China sebagai pemilik *power* terbesar, akan menjaga kestabilan kawasan Asia terlebih karena di wilayah Asia terdapat *duagreat power superpower* dunia yaitu China dan Jepang, dan kemunculan India. Kestabilan sistem politik dan kondisi keamanan akan lebih baik jika terdapat satu kekuatan dominan. Akan tetapi, China harus mampu membuktikan kemampuan dan tanggung jawabnya sebagai kekuatan terbesar di Asia. Jika tidak, maka China akan gagal sebagai kekuatan terbesar dan akan terjadi perubahan dalam distribusi *power* seperti yang sudah terjadi dalam sejarah. Inggris gagal mencegah resesi ekonomi terbesar di dunia, demikian juga dengan krisis ekonomi yang terjadi tahun 2001 dianggap sebagai kegagalan Amerika yang belum mampu menggaransi stabilitas sistem ekonomi internasional²¹⁶.

²¹⁵Data yang diolah diperoleh dari Military Balance 2011

²¹⁶*Ibid.*

Tatanan politik internasional maupun regional akan lebih stabil jika ada satu pihak yang menjadi pemimpin. China belum menjadi *power* nomor satu di dunia, akan tetapi negara tersebut adalah pemilik *power* terbesar di Asia. Di Asia, China adalah negara terkuat yang akan memiliki peranan penting dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan. Dalam pembuatan keputusan dan kebijakan, sosok tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain.

Salah satu yang menjadi elemen kuat untuk menjadi *superpower* adalah kemampuan dalam membentuk wacana dan norma yang diikuti dan dijadikan acuan oleh negara-negara lain di dunia. Kemampuan seperti itulah yang membawa Amerika menjadi hegemoni. China juga berusaha untuk membentuk citra sebagai negara yang mampu melakukannya. Para pemikir China memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep *power*.

Bahwa *power* tidak akan efektif jika dibangun dengan menggunakan kekerasan melainkan lebih menggunakan negosiasi dan tawar-menawar. Kekuatan tidak lagi didapatkan dengan menduduki suatu wilayah atau melakukan paksaan-paksaan. *Power* justru lebih sering dibangun dengan menggunakan ideologi seperti demokrasi, hak azasi dan konsep-konsep nilai yang lain sebagai senjata²¹⁷. Bahkan ideologi jugalah yang digunakan untuk memicu terjadinya perang, ideologi juga yang akan digunakan untuk menyatukan dan memecah suatu negara.

Dalam pembuatan keputusan dalam perjalanan politik di Asia, China sebagai yang paling dominan akan memiliki peranan dan proporsi yang paling dominan diantara negara-negara lain. Meskipun China menjadi sangat dominan di Asia, keberadaan Amerika Serikat sebagai *superpower* masih cukup kuat dan menimbulkan dilema bagi para negara-negara di Asia untuk berada di pihak China karena dengan demikian harus berada di posisi kontra Amerika, atau sebaliknya berada dipihak Amerika Serikat dengan konsekuensi kehilangan kesempatan untuk kerjasama-kerjasama yang menguntungkan dengan China.

²¹⁷ Samantha Blum 'Chinese views of US Hegemony', dalam *Journal of Contemporary China* 12: 35, hlm 244-6.

Tabel 4.3 Perbandingan Belanja Militer China dengan Jepang dan Korea Selatan dalam satuan USD

Negara	China	Jepang	Korea Selatan	India
Tahun				
2001	41176	55376	18998	123
2002	47829	55938	19521	123
2003	51955	56053	20185	183
2004	57542	55541	21072	218
2005	64726	55330	22791	241
2006	76065	54637	23622	226
2007	87730	53885	24689	210
2008	96663	53159	26297	219
2009	116666	54339	27708	244
2010	121064	54641	27572	244
2011	129272	54529	28280	241

Sumber : SIPRI, Military expenditure by country, in constant (2010) US\$ m., 1988-2011

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberi saran kepada penelitian-penelitian selanjutnya tentang hal-hal yang dapat diteliti lebih jauh.

5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa China bersikap asertif dan cenderung unilateral dalam sengketa Laut China Selatan karena *power* yang dimilikinya unggul secara mutlak dibandingkan dengan negara-negara pengklaim lainnya. Kapabilitas ekonomi dan militer China dibandingkan dengan Brunei, Malaysia, Taiwan, Filipina dan Vietnam jauh lebih unggul. Bahkan, bila *power* dari kelima negara tersebut dijumlahkan, *power* yang dimiliki China masih lebih unggul.

Dengan kondisi yang demikian, China merasa tidak perlu bernegosiasi dengan negara-negara tersebut. China menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan mengenai kedaulatan di wilayah tersebut sebab keseluruhan Laut China Selatan berada dibawah kekuasaan China. Menyadari kapabilitasnya yang jauh lebih unggul, China juga melakukan aksi-aksi yang asertif dalam upaya menegakkan kedaulatannya di Laut China Selatan.

Kesimpulan berikutnya adalah bahwa negara yang memiliki *power* cenderung lebih unilateral kepada negara yang lebih lemah. Sengketa wilayah tidak hanya terjadi antara China dengan 5 negara lainnya di Laut China Selatan tetapi juga dengan Jepang di Laut China Timur akan tetapi tindakan-tindakan China yang sepihak lebih banyak terjadi di Laut China Selatan dibandingkan di Laut China Timur. Hal ini dikarenakan kapabilitas militer Jepang dan kapabilitas militer China masih sebanding.

Selain *power* sebagai pendorong China untuk bersikap unilateralis di Laut China Selatan, keinginan China atas pengakuan terhadap *power* yang dimilikinya diwujudkan salah satunya dengan menjadi pemenang di Laut China Selatan. Dinamika dalam politik internasional menyebabkan perubahan pada distribusi

kekuasaan. Kemunduran kekuasaan Amerika menjadi akhir dari dunia yang unipolar. Aktor-aktor dalam sistem internasional tidak lagi melihat Amerika sebagai *superpower* yang kuat melainkan sebagai *superpower* yang mengalami kemunduran. Kondisi tersebut dilihat oleh China sebagai peluang untuk menjadi kekuatan penyeimbang atau bahkan sebagai kekuatan yang lebih besar.

Struktur Kawasan Asia berubah akibat ketegangan China. Rasa percaya diri sebagai pemilik kekuatan terbesar di Asia mendorong China untuk menjadi pemimpin yang menentukan keamanan di Asia. China menginginkan Asia sebagai kawasan yang memiliki otoritas sehingga *superpower* tidak lagi mencampuri urusan wilayah tersebut. China hanya mau bernegosiasi dengan pihak yang terlibat langsung dengan konflik.

Jika China berhasil menguasai Laut China Selatan maka hal tersebut menjadi satu proses legitimasi kekuatan China. Negara-negara lain menjadi pihak yang kalah dan China berdaulat sepenuhnya di kawasan tersebut. Tidak hanya mengejar kedaulatan atas wilayah, dan akses terhadap segala sumber daya namun China juga bertujuan menunjukkan kekuatannya di Asia. Dengan demikian dunia internasional dapat melihat besarnya kekuatan China dan tidak lagi melakukan intervensi yang besar terhadap Asia.

Untuk memperbesar dan memantapkan dirinya sebagai *superpower*, China membenahi diri dengan *hard power* maupun *soft power*. Selain meningkatkan kapabilitas ekonomi dan militer, China juga membangun kerjasama yang lebih luas dengan lebih banyak pihak. China berusaha membangun citra baru sebagai negara besar yang 'ramah' yang membuka diri dan memberi bantuan kepada negara-negara lain. Dengan demikian China juga akan dapat membentuk suatu norma yang menjadi panutan bagi negara lain. Bahkan, China juga membangun hubungan dengan Amerika.

Dengan kondisi ekonomi yang sangat kuat dan ketergantungan yang tinggi negara-negara di dunia, dapat diprediksi bahwa tidak ada negara lain yang akan menyaingi China dalam periode hingga 2025. Strategi pertumbuhan China yang dirancang sedemikian baik dan sudah terbukti mengangkat China akan berlangsung secara berkesinambungan.

Dengan menjadi pemegang kekuatan paling dominan, China akan mengembangkan kemampuan negaranya dengan memaksimalkan kemampuan dan potensi aliansinya, dan di lain sisi juga melemahkan kekuatannya. Akses terhadap segala aspek baik militer, ekonomi dan politik akan dapat dimiliki lebih mudah dengan menjadi pemilik kekuasaan yang dominan. Dengan demikian China bisa beranjak ke fase berikutnya, menjadi kekuatan terbesar di dunia. Dari jumlah pendapatan negara yang diukur dengan GDP dan jumlah belanja militer *superpower* lainnya maka China masih memiliki kapabilitas yang jauh lebih tinggi.

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki China akan semakin meningkatkan klaimnya di Laut China Selatan. Upaya negosiasi masih akan mengalami kegagalan. Kehadiran Amerika menjadi aliansi negara-negara ASEAN akan cenderung menimbulkan status quo namun tidak akan menjadi jalan penyelesaian sengketa.

Situasi di Laut China Selatan masih akan stabil jika masing-masing pihak dapat menjalankan diplomasi yang cerdas, didukung dengan aliansi dengan negara pemilik klaim lain untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika. Akan tetapi kecenderungan saat ini, negara-negara ASEAN berlomba-lomba untuk kemajuan negara masing-masing sehingga konflik Laut China Selatan tidak menjadi isu yang menjadi fokus organisasi ASEAN dan sesama negara anggota ASEAN juga tidak memberi dukungan yang kepada negara anggota lain yang terlibat sengketa. Padahal, konflik ini dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kemitraan dan keterikatan dalam organisasi kawasan terlebih memperkuat integrasi kawasan sehingga ASEAN dapat menjadi lebih kuat.

Diplomasi dan negosiasi akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan ketentuan-ketentuan untuk implementasi hal-hal yang telah disepakati bersama. Kerangka perjanjian dan garis-garis kesepakatan yang sudah disepakati selama terjadinya konflik Laut China Selatan hingga kini belum ada yang bisa diimplementasikan dengan baik.

Dengan mengikuti pola distribusi *power* Buzan dan Waever yang menyatakan bahwa dalam sistem internasional pasca Perang Dingin terdapat 1 *superpower* dan empat *great power* di tingkat global: Amerika sebagai

Universitas Indonesia

superpower dan Rusia, Jepang, China, serta EU sebagai *great power* maka dalam tesis ini peneliti menyimpulkan bahwa distribusi *power* di Asia adalah sebagai berikut: satu *dominant power* yaitu China, dua *potential power* yaitu Jepang dan India, serta satu *challenger* yaitu Korea Selatan. China sebagai *dominant power* memiliki penduduk terbanyak dan anggaran belanja militer terbesar sedangkan India dan Jepang adalah *potential power* dan Korea Selatan sebagai *challenger*, yaitu negara yang memungkinkan untuk menyusul *power* Jepang dan India. Korea, sebagai *potential power* yang berpotensi untuk menyaingi kekuatan China dan Korea Selatan sebagai negara yang memungkinkan untuk menyaingi kekuatan Jepang dan India. Akan tetapi proposi kekuatan yang dimiliki Korea Selatan sangatlah sedikit dibandingkan dengan tiga negara lainnya sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Korea belum dapat diperhitungkan sebagai *power* yang potensial untuk menyaingi Jepang dan India, terlebih China. Struktur *power* di Asia yang akan dipegang oleh tiga negara paling kuat yaitu China, Jepang dan India.

5.2 Saran

Penelitian ini tidak menemukan suatu hal yang baru. *Power* memang adalah elemen terbesar dalam membangun kepercayaan diri suatu negara untuk bersikap unilateralis. Akan tetapi, penelitian ini memberikan distribusi *power* yang baru. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk memprediksi peta kekuasaan di masa yang akan datang dan juga prediksi aktor-aktor yang terlibat serta pengaruhnya pada peta politik internasional maupun regional.

Selain itu, ketegangan-ketegangan yang terjadi pertengahan tahun 2012 tentunya akan menimbulkan dampak-dampak yang cukup signifikan terutama menguatnya aliansi Filipina dengan Amerika. Tema lain yang juga dapat diteruskan oleh peneliti lain adalah untuk mengetahui pengaruh kerjasama Amerika dan Filipina terhadap organisasi kawasan.

Penelitian ini juga dapat dilanjutkan untuk mencari prediksi kemungkinan yang terjadi di tahun 2015 apakah konflik antara China dan Filipina akan semakin berkembang atau justru Vietnam akan menjadi mitra dagang China.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acharya, Amitav . *Constructing a Security Community in Southeast Asia, ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: International Institute for SecurityStudies, 2001
- Bryman, Alan. *Social Reserach Methods* third edition. Oxford: Oxford University Press. 2008
- Barry, Buza & Weaver, Ole. *Regions and Powers The Structure of International Security*. Cambridge University Press, 2003
- Gilpin, Robert . *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Pres,2001
- Katzenstein, Peter J. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, New York: Columbia University Press, 1996
- Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Keohane, Robert, and Nye, Joseph. *Power and Interdependence*, Boston: Little Brown, 1977
- Nye, Joseph S. Jr . *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, New York: Basic Books, 1990
- Prasetya Irawan. 2003. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

JURNAL/ARTIKEL

- Amitav Acharya , "ASEAN's Dilemma: Courting Washington without Hurting Beijing", ASia Pacific Bulletin, Numver 133/October,2011
- Barbara Mae Dacanay, "China and Philippines agree to peace over South ChinaSea" diakses dari <http://philippinenews.com/-us-news/3737-china-and-philippines-agree-to-peace-over-south-china-sea.html>
- Bonnie S. Glaser, 'Tensions Flare in the South China Sea' :By CSIS Center for Strategic and International Studies
- Conway *et al.*, 'A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower' (henceforth

‘A Cooperative Strategy’), October 2007

David Shambaugh, ‘China Engages Asia: Reshaping the Regional’,
International Security, Vol. 29, No. 3 (Winter, 2004/2005)

Dibb, Paul (1995): *Towards a New Balance of Power in Asia*, London:
International Institute for Strategic Studies: Adelphi Paper no. 295

Dobson, William J., and M. Taylor Fravel, “Red Herring Hegemon: China in the
South China Sea”. *Current History*, September, 1997

Hyer, Eric. 1995. “The South China Sea Disputes: Implications of China’s
Earlier Territorial Settlements”. *Pacific Affairs* 68, no. 1 (Spring): 34–54.

Ian Storey, “China and the Philippines: Implications of the Reed Bank Incident,”
China Brief, Volume 11, Issue 8, May 6, 2011. Joseph Santolan.
*Chinese patrol boats confront Vietnamese oil exploration ship in South
China Sea*. Diakses dari:
<http://www.wsws.org/articles/2011/may2011/chin-m31.shtml>

Katzenstein, Peter J. (2000) (ed.): *Re-examining Norms of Interstate
Relations in the New Millennium*, Kuala Lumpur: Paper for the 14th
Asia-Pacific Roundtable

Michael Barnett and Raymond Duvall, ‘Power in International Politics’.
International Organization, Vol. 59, No. 1 (Winter, 2005), Cambridge
University Press

Michael dan Raymond Duwall, “Power in International Politics” diakses dari
<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=278382>

Michael Wines, “Dispute Between Vietnam and China Escalates Over Competing
Claims in South China Sea” diakses dari
http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html?_r=1

Mearsheimer, John J. (1990): ‘Back to the Future: Instability in Europe After the
ColdWar’, *International Security* 15 (1): 5–56

Peter Dutton, “Three Disputes and Three Objectives, China and the South China
Sea” diakses dari <http://www.usnwc.edu/getattachment/feb516bf-9d93-4d5c-80dc-d5073ad84d9b/Three-Disputes-and-Three-Objectives--China-and-the>

Richard Rousseau, “South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the
Horizon” diakses dari
<http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/>

Ross H. Munro, 'Eavesdropping on the Chinese military: where it expects war where it doesn't', *Orbis*, Summer 1994.

Samantha Blum 'Chinese views of US Hegemony', dalam *Journal of Contemporary China* 12: 35,

Shelly Zhao, "China's Territorial Disputes in the South China Sea and East China Sea" diakses dari <http://www.china-briefing.com/news/2011/05/31/chinas-territorial-disputes-in-the-south-china-sea-and-east-china-sea.html>

Smith, 1994. Edward D. "China's Aspirations in the Spratly Islands". *Contemporary Southeast Asia* 16, no. 3 (December): 274–90.

Shee Poon Kim. "The South China Sea in China's Strategic Thinking". *Contemporary Southeast Asia* 19, no. 4 (March). 1998.

Zha, Daojiong. 2001. "Localizing the South China Sea Problem: The Case of China's Hainan". *Pacific Review* 14

Vijay Sakhuja, 'Indian navy: keeping pace with emerging challenges', in Prabhakar *et al.* (2006)

Vice Admiral Hideaki Kaneda, 'Japan's national maritime doctrines and capabilities', in Prabhakar *et al.* (2006)

Vikram Nehru, "Rising tensions in the South China Sea" diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2012/03/03/rising-tensions-in-the-south-china-sea/>

Wyatt Olson, "East China Sea pact does little to defuse tensions between Japan and China" diakses dari <http://www.stripes.com/east-china-sea-pact-does-little-to-defuse-tensions-between-japan-and-china-1.171397>

TESIS

Sri Winingsih, "Kebijakan Luar Negeri Amerika" Tesis Universitas Indonesia, 2009

Haiyyu Moenir Darman, "Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi ASEAN: Studi Kasus 200-2008) Tesis 2010

MEDIA

Barbara Mae Dacanay. *China and Philippines agree to peace over South China Sea* diakses dari : <http://philippinenews.com/-us-news/3737-china-and-philippines-agree-to-peace-over-south-china-sea.html>

Darwin Wally T. Wee. *China Upgrade Bilateral Trading Agreement* diakses

dari : <http://www.mindanews.com/top-stories/2011/08/16/philippines-china-upgrade-bilateral-trading-agreement/>

China knocks US-ASEAN statement on South China Sea diakses dari:
<http://asiancorrespondent.com/40569/china-knocks-us-asean-statement-on-south-china-sea/>

South China Sea Conflict? No Way diakses dari : <http://the-diplomat.com/2011/10/23/south-china-sea-conflict-no-way/>

Sengketa Kepemilikan Luat China Selatan diakses dari:
http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratly_conflict.shtml

China, Vietnam Seeks Way to Improve Bilateral Relations diakses dari
<http://english.cri.cn/6909/2011/10/05/2021s661381.htm>

China's 1st aircraft carrier to be deployed in August” diakses dari
<http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-china-s-first-aircraft-carrier-to-be-deployed-in-august/20120309.htm>

Vaudine England, “Why are South China Sea tensions rising?” diakses dari
<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11152948>

Richard Rousseau. South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon diakses dari:
<http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/>

LAPORAN

ASEAN: *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*,

United Nation, General Assembly, Distr.: General 14 April 1999, International Law Commission Fifty-first session Geneva, 3 May–23 July 1999 :
Second report on unilateral acts of States

WEBSITE:

Vu Hai Dang. *Approach for the implementation of regional cooperative activities in the South China Sea: An analysis*. Diakses dari:
<http://southchinaseastudies.org/en/conferences-and-seminars-/second-international-workshop/605-approach-for-the-implementation-of-regional-cooperative-activities-in-the-south-china-sea-an-analysis-by-vu-hai-dang>

Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea diakses dari:
<http://www.aseansec.org/13163.htm>

China's three-point naval strategy. Diakses dari:
<http://www.iiss.org/publications/strategic-comments/past-issues/volume-16-2010/october/chinas-three-point-naval-strategy/>

Tensions Escalate Over the South China Sea. Diakses dari: <http://www.china-defense-mashup.com/tensions-escalate-over-the-south-china-sea.html>

Paracel (Xisha) Islands – 1974. Diakses dari:
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/paracel.htm>

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2174rank.html>.

Joshua Kurlantzick. Growing US Role in South China Sea diakses dari:
<http://www.cfr.org/china/growing-us-role-south-china-sea/p26145>
<http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/>

Vice Foreign Minister Fu Ying met with Charge D'affaires of the Philippine Embassy in China Again over the Incident at Huangyan Island diakses dari: <http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t929748.htm>